

**UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002**

**Pasal 2**

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan PemegangHak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 72**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, meng­edarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana di­maksud pada Pasal 2 ayat (1), di­pidana dengan pidana penjara pa­ling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyakRp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. H. A. Umar, MA.

Dinamika Sistem Pendidikan Islam & Modernisasi Pesantren/A. Umar,—Semarang: Fatawa Publishing, 2015.

ISBN 978-602-0887-05-0

DINAMIKA SISTEM PENDIDIKAN ISLAM & MODERNISASI PESANTREN

Penulis:  
Dr. H. A. Umar, MA.

Desain Isi & Cover:  
Tim Fatawa Publishing

Penerbit:

FATAWA PUBLISHING

Jl. Beringin Raya KM. 02, RT/RW. I/VIII Ngaliyan, Semarang,   
Telp. (024) 024-74019660, 0813-2668-3562

Website: www.fatawa-publishing.com

Email: fatawapublishing@gmail.com

ISBN: 978-602-0887-05-0

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No. 19 Th. 2002

*All rights reserved*

Cetakan Pertama, September 2015

KATA PENGANTAR

MODERNISASI PESANTREN: DINAMIKA SISTEM PENDIDIKAN ISLAM

P

erkembangan Islam di Indonesia telah memberi gam­baran menarik tentang sebuah keunikan pengalaman, yang tidak kurang dramatisnya daripada even-even yang tengah berlangsung di Timur Tengah, dan tidak kurang spek­takuler pengaruhnya untuk masa sekarang dan masa depan Islam itu sendiri. Islam di Nusantara merupakan la­pang­an riset dan studi yang relatif terabaikan oleh para islamisis (*Islamicist*).

Kalau dewasa ini tengah marak diskursus Islam Nusan­tara, sesungguhnya *strong hold* Islam nusantara adalah dunia pe­­santren. Sistem pendidikan pesantren merupakan dinamika sistem pendidikan Islam yang bersumber dari pendekatan dan ke­arif­an Walisongo yang pada masa berikutnya diikuti dan di­lem­bagakan dalam intisari tradisi pesantren dengan rangkaian kesatuan historis dan ideologis mereka. Kontinuitas ini ter­cer­min dalam hubungan filosofis dan religius antara *taqlid* dan *mo­deling (uswah hasanah)* di dalam komunitas ini. Melalui ajaran ini, ke­be­saran Muhammad dan kharisma Walisongo, yang diperankan oleh para wali dan kiai sangat dihormati dari masa ke masa.

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam telah membuktikan keberadaan dan keberhasilannya dalam pe­­ningkatan sumber daya manusia *human resources develop­ment.* Banyak pesantren yang cikal bakalnya merupakan lem­baga pendidikan al-Qur’an. Di sana santri diajarkan membaca, menghafal, dan memahami al-Qur’an, di samping kitab-kitab kuning.

Dalam perkembangan terakhir ini, telah terbukti bahwa dari pesantren telah lahir banyak pemimpin bangsa dan pe­mim­pin masyarakat. Pesantren juga telah memberikan nuansa dan mewarnai corak dan pola kehidupan masyarakat di se­ki­tar­nya. Dengan kata lain, pesantren juga merupakan “benteng pertahanan” yang kokoh dalam menghadapi dah­syat­nya ge­lom­bang budaya dan peradaban yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ilahiah.

Sejarah telah mencatat prestasi pesantren, baik sebagai pem­­bentuk kultur maupun sebagai benteng per­ta­hanan bagi nilai-nilai religius. Namun ada suatu pertanyaan yang menarik untuk disampaikan di sini, yaitu dapatkah ca­paian pesantren itu dipertahankan atau diting­katkan di masa depan, yang pada masa itu kita segera masuk pada era pasar bebas. Pada masa itu bukan hanya komoditas ekonomi yang be­bas masuk ke pasaran domestik, melainkan juga pengaruh budaya asing akan ikut serta berpengaruh.

Ronald Lukens-Bull, antropolog USA meng­in­di­kasikan keuletan dan ketangguhan dunia pesantren dalam merespons glo­­balisasi. Bahwa dalam menyikapi modernisasi dan glo­ba­lisasi, ternyata kaum pesantren memilih dunia pen­didikan se­ba­gai alat yang paling utama untuk penegakan jihad damai. Dengan jihad damai di jalan Allah melalui sistem pendidikan pesantren, komunitas ini mencoba memenuhi tuntutan dan ke­bu­tuhan Indonesia modern dan globalisasi dengan tetap ber­sandar pada stabilitas dan identitas agama.

Dari tahun ke tahun jumlah pesantren di seluruh Indonesia menunjukkan adanya peningkatan. Ini merupakan salah satu indikasi politik terhadap pertanyaan di depan. Na­mun, di sisi lain belakangan ini banyak disinyalir dengan ada­nya pesantren yang mengalami krisis kepemimpinan dan ma­na­jerial yang serius, begitu ditinggal oleh kyai atau pen­diri­nya, sebab tidak adanya anak kyai yang *capable* melan­jutkan tong­kat estafet kepemimpinan.

Dalam kaitan ini, barangkali pesantren perlu dikonservasi, dan peran serta fungsinya, baik sebagai pembentuk kultur mau­­pun sebagai “benteng pertahanan” perlu ditingkatkan. Untuk itu, semua mutlak diperlukan, bahwa pesantren itu ko­koh dan memiliki daya saing yang prima. Hal ini sulit dicapai jika pesantren tidak memiliki visi yang kuat dan prospektif, serta mempunyai sistem manajerial yang efektif.

Selanjutnya prospek pesantren tergantung pula pada ke­mam­puannya berpacu dengan waktu dengan lembaga-lembaga pendidikan lain. Perpacuan dengan lembaga pen­di­dikan lain bisa berbentuk kompetitif atau distributif. Ke­mam­puan secara kompetitif, yakni pesantren menangani ber­bagai macam disiplin ilmu, misalnya dengan cara mendirikan per­gu­ruan tinggi yang mempunyai fakultas-fakul­tas sebagai­mana yang dimiliki oleh perguruan tinggi negeri. Perpacuan secara kom­pe­titif ini tergantung pada kualifikasi yang dikem­bang­kan, baik kualifikasi dirinya maupun kualifikasi merekrut te­naga-tenaga dan mencetak kader.

Kemampuan secara distributif, yakni pengkhususan diri dalam satu bidang dan menyerahkan penanganan bidang ke­ilmuan selebihnya pada lembaga pendidikan lain. Di sini pe­san­tren menyediakan isi pendidikan dalam bidang minta ter­ten­tu pula. Distribusi semacam ini tentu saja tidak mesti ter­capai lewat perundingan antara para pemimpin pesantren ka­rena hal itu merupakan perkembangan natural yang dialami masing-masing pesantren.

Jakarta, September 2015

**Kepala Badan Litbang dan Diklat  
Kementerian Agama RI**

**Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, Ph.D.**

PENGANTAR PENULIS

S

ebagai lembaga pendidikan tertua asli Indonesia, pesan­tren menampilkan suatu sistem pendidikan tradisional. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, sebagian besar pesan­tren mengadakan berbagai perbaikan dan pem­be­nah­an seba­gai upaya modernisasi pendidikan yang diseleng­ga­rakannya.

Modernisasi pendidikan pesantren, diyakini sebagai suatu upaya pesantren untuk tetap bertahan dan eksis di tengah per­gu­mulannya dengan lembaga pendidikan modern yang mena­war­kan sistem pendidikan sekuler melalui sistem pendidikan sekolah.

Modernisasi pesantren pada mulanya, dilakukan sebagai respon terhadap penjajah Belanda yang memperkenalkan sis­tem pendidikan modern. Modernisasi pesantren dilakukan dengan mengembangkan kurikulum pesantren dengan mema­suk­kan mata pelajaran umum, yang selanjutnya berimplikasi terhadap diversifikasi lembaga pendidikan pesantren, sistem penjenjangan, kepemimpinan dan manajemen pendidikan pe­santren.

Buku “Dinamika Sistem Pendidikan Islam & Modernisasi Pesantren” ini merupakan refleksi dan hasil *research* yang per­nah dilakukan penulis dalam bentuk disertasi. Dalam buku ini penulis memaparkan, bahwa mo­der­nisasi pendidikan Islam dan pendidikan pesantren merupakan jawaban terhadap per­ubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pesantren telah melakukan perubahan-perubahan yang dalam skala terbatas untuk menjamin keber­lang­sungan dan ke­ta­hanan pendidikan yang diselenggara­kan­nya. Perubahan-perubahan di atas menyentuh aspek-aspek kurikulum (materi pembelajaran), metode, dan sistem eva­luasi.

Menurut penulis, hal yang sebaiknya dilakukan adalah pe­santren sebagai lembaga pendidikan yang secara *istiqamah* men­jaga nilai-nilai dan ajaran Islam, tetap mempertahankan sistem pendidikan tradisional yang menekankan pada pengua­sa­an kitab-kitab klasik, dan pada sisi lain tetap melakukan ino­vasi pendidikan yang dilaksanakan.

Selanjutnya atas terbitnya buku ini, penulis mesti ber­teri­ma kasih kepada semua pihak yang telah memberikan du­kung­­an dan masukan kepada penulis. Utamanya kepada yang terhormat bapak Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemen­terian Agama RI, Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, Ph.D., yang ber­kenan memberikan catatan, saran dan sekaligus mem­beri­kan kata pengantar. Terima kasih dan doa selalu penulis hatur­kan kepada almarhum ayahanda KH. Abdurrahman, dan al­mar­humah ibunda Hj. Kastini atas semua cinta kasihnya hing­ga akhir hayat. Juga terima kasih kepada istri (Ir. Tri Hartini) dan anak-anakku (Isyna Izzal Muna & Marwa Nailul Muna) yang menjadi penyemangat dalam penulisan buku ini.

Semoga buku yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi pe­­merhati pendidikan pesantren, setidaknya menjadi inspirasi dan bahan pertimbangan bagi pendidikan pesantren dalam me­­lakukan modernisasi, sehingga jauh hari telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mempertahankan tradisio­na­lis­­me sebagai ciri khas pesantren dan mengejar kemajuan dan hal-hal positif dari sistem pendidikan modern.

Pekalongan, Juni 2015

Penulis

**Dr. H. A. Umar, MA.**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar v

Pengantar Penulis v

Daftar Isi vii

Bab I Pendahuluan 1

Bab II Sistem Pendidikan Tradisonal Pesantren 13

A. Pesantren dan Tradisionalisme 28

B. Pesantren Sebagai Pusat Pendidikan 37

Bab III Tantangan Modernisasi Pesantren 45

A. Pengaruh Modernisasi terhadap   
Pesantren 45

B. Peluang dan Tantangan Pesantren di Era Modern 51

Bab IV Pesantren Darul Ulum sebagai Potret   
Dinamika Sistem Pendidikan Islam   
Modern 61

A. Dinamika Kepemimpinan Pesantren Darul Ulum 67

B. Tujuan Pendidikan Pesantren Darul Ulum 90

C. Bentuk-bentuk Pendidikan 97

D. Materi Pelajaran di Pesantren 106

E. Dinamika Tarekat 111

F. Profil Guru 113

G. Profil Santri 115

H. Profil Alumni 117

Bab V Implikasi Modernisasi Pesantren 121

A. Pergeseran Tujuan Pendidikan Pesantren 125

B. Pergeseran Orientasi Pendidikan   
Putra-putri Kiai 131

C. Fragmentasi Otoritas Kiai 134

D. Pergeseran Pola Interaksi Santri-Kiai 138

Bab VI Problem Pascamodernisasi Pesantren 147

A. Sentralisasi Kekuasaan 148

B. Timbulnya Konflik Pascamodernisasi   
Pesantren 149

C. Implikasi bagi Pengembangan Pesantren 150

Bab VII Penutup 153

A. Kesimpulan 153

B. Penutup 154

Daftar Pustaka 155

Tentang Penulis 161

BAB I

PENDAHULUAN

P

esantren dari berbagai segi, menawarkan eksotisme ke­hidupan yang unik. Berbagai karya mengenai pesan­tren telah lahir dari hasil telaah ataupun penelitian. Buku ini meng­eksplorasi tentang dinamika dan implikasi modernisasi yang terjadi di Pesantren Darul Ulum Jombang. Sebuah pesantren yang oleh penulis merupakan po­tret Pesan­tren Modern. Meskipun pada awalnya pesantren tersebut me­ne­rapkan model pen­didikan tradisional, yaitu model pen­di­dikan yang cenderung hanya melahirkan alumni ahli agama saja, tetapi saat ini telah meng­alami lom­patan dan transformasi yang luar biasa.

Mengenai topik penulisan buku ini tentang modernisasi pesantren, penulis mempunyai beberapa alasan yang men­dasarinya. *Pertama,* secara teoritis disinyalir bahwa gelom­bang modernisasi[[1]](#footnote-1) yang terjadi di Indonesia tidak hanya mem­ba­wa perubahan yang posistif, tetapi juga melahirkan per­soalan-per­soalan baru yang lebih rumit dan kompleks. Mastuhu dalam hal ini mengatakan bahwa proses modernisasi yang ditandai dengan semakin me­ning­katnya kebutuhan hidup, kemajuan pembangunan, dan perkembangan ilmu penge­tahuan tekno­lo­gi pada saatnya dapat mengancam eksistensi pesantren serta menimbulkan terjadinya pergeseran-pergeseran nilai di pesan­tren, baik nilai yang menyangkut sumber belajar maupun nilai yang menyangkut pengelolaan pendidikan.[[2]](#footnote-2)

Dari konteks historis, berdirinya beberapa sekolah umum yang merupakan salah satu produk modernisasi dalam bi­dang pendidikan dapat menjadi ‘ancaman’ bagi perkem­bang­an pe­san­tren di Indonesia, karena masuknya model se­kolah umum yang didirikan dan dikenalkan oleh peme­rin­tah kolonial Belanda dapat menjadi saingan pesantren. Sekolah umum te­lah terlebih dahulu menerapkan model pendidikan modern, se­­dangkan pesantren masih menerapkan model pen­di­dikan tra­disional.

Realitas itu menunjukkan dinamika pesantren yang di­tim­bulkan oleh kehidupan modern. jika Pesantren tidak ber­ubah dengan menyesuaikan ‘selera’ mo­dern, maka ek­sis­tensi pesan­tren terancam akan terganggu. Sedangkan jika pesantren dengan mudah menyesuaikan dengan alam mo­dern, ada ke­khawatiran akan terjadi per­geseran-pergeseran tata nilai dan kode etik pesantren. Dengan demikian, moderni­sa­si pesantren menjadi isu menarik untuk diteliti dan dilihat secara empiris bagaimana dinamika dan implikasi modernisasi pesantren ter­sebut.

Tuntutan pesantren dalam menjawab tantangan tersebut di atas merupakan langkah awal dalam mewujudkan moder­ni­sasi pendidikan pesantren.[[3]](#footnote-3) Hal ini merupakan tanggung jawab dunia pendidikan pesantren yang sering diklaim se­ba­gai lambang keterbelakangan, ketertutupan dengan dunia luar dan anti perubahan, sehingga pendidikan pesantren lebih di­kenal sebagai lembaga tradisional.[[4]](#footnote-4)

Pesantren di­sebut se­ba­­gai lembaga tradisional, karena ma­sih mengajarkan Islam secara tradisional.[[5]](#footnote-5) Selain itu, Ziemek sering memilah pesan­tren sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran tra­di­sional yang berbeda dengan lembaga pen­didikan Barat yang modern.[[6]](#footnote-6)

*Kedua*, dunia pesantren mempunyai keunikan-keunikan tersendiri. Abdurrahman Wahid menilai bahwa pesantren me­mi­liki daya tarik keluar yang memungkinkan masyarakat se­kitar menganggapnya sebagai alternatif ideal bagi sikap hidup yang ada di masyarakat dan terdapat proses saling mem­pe­nga­ruhi antara pesantren dan masyarakat di luarnya, sehingga terbentuk nilai-nilai baru yang secara universal diterima oleh kedua belah pihak.[[7]](#footnote-7)

Sisi menarik pendidikan pesantren yang menunjukkan di­namika perubahan sosial inilah yang kemudian dikenal se­ba­gai lembaga pendidikan yang unik. Karena keunikan pen­di­dikan pesantren ini, Ki Hadjar Dewantoro, seorang tokoh pen­didikan nasional, pernah mencita-citakan model pen­di­dik­an pesantren sebagai sistem pendidikan yang ingin dikem­bang­kan di Indonesia.[[8]](#footnote-8) Keunikan sebagai kekecualian (berbeda dari yang lain) itu justru yang menjadi salah satu potensinya. Mas’ud mengatakan:

*The pesantren as an educational institution has been very poten­tial and exceptional… Its uniqueness rests on its combination bet­­ween local culture and its substance as a holistic Islamic way of life. It is noteworthy that the more oppression the colonists offered the more repellent move­ment the pesantren community reacted. From this illus­tration, it isunderstandable why pesan­tren****s*** *have been more indigenous and “Indonesian”.This should also explain why pesantrens in Indonesia, socio-culturally and ideologically developed so massively.[[9]](#footnote-9)*

Daya tarik yang menjadikan lembaga pendidikan ini unik adalah adanya pengawasan langsung dari kiai, keakraban dalam interaksi sosial, kesederhanaan dalam pola hidup, biaya pendidikan yang murah, dan keluwesan alumni dalam men­cari pekerjaan. Keunikan lain juga dinyatakan Dawam:

*The uniqueness of the pesantren lies precisely in its di­versity. This characteristic permits the flexibility very necessary to an institution which wants to play the role of an umbrella for various kinds of non-formal education.[[10]](#footnote-10)*

Keunikan pesantren itu semakin bertambah kuat dalam pandangan masyarakat karena kemampuannya untuk tetap ber­tahan di tengah derasnya arus modernisasi bahkan memi­liki kemampuan adaptasi dan daya tahan terhadap perubahan sosial.[[11]](#footnote-11) Hal itu digambarkan oleh Azra:

Sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi pen­di­dik­an Islam di berbagai kawasan Dunia Muslim, tidak banyak lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pe­san­tren yang mampu bertahan. Kebanyakannya lenyap se­telah tergusur oleh ekspansi sistem pendidikan umum, untuk tidak menyebut sistem pendidikan “sekuler”; atau meng­alami transformasi menjadi lembaga pen­didikan umum; atau setidak-tidaknya menyesuaikan diri dan se­di­kit banyak mengadopsi isi dan metodologi pen­di­dikan umum.[[12]](#footnote-12)

Penyesuaian diri lembaga pendidikan itu tentu meru­pa­kan sikap yang rasional. Sebab, hal itu merupakan dinamika pe­santren dan tuntutan terhadap perubahan sosial yang terjadi akibat proses modernisasi. Kenyataan inilah yang ditekankan oleh K.H. A. Wahid Hasjim (wafat 1953 M) sewak­tu menjabat Menteri Agama RI, untuk tidak membiar­kan sekolah-sekolah agama termasuk pondok pesantren terting­gal dalam meng­isi pembangunan masyarakat sehingga dapat ikut serta dalam proses kehidupan kenegaraan.[[13]](#footnote-13)

Lebih lanjut, A. Mukti Ali (wafat 2004) juga mengusulkan perlunya diadakan pembaruan sistem pendidikan di pesan­tren,[[14]](#footnote-14) karena beberapa pesantren dan madrasah menge­luh ten­tang kurangnya efek sosial, malahan yang lebih mem­pri­hatinkan adalah alumni pendidikan dari pondok pesantren dan madrasah yang merasa sulit memperoleh lapangan ke­hidupan (kerja) di luar bidang keagamaan.[[15]](#footnote-15) Di samping itu ada kekhawatiran lain yang sering muncul adalah tergesernya kedudukan pesantren dari lembaga keagamaan dan pen­di­dikan menjadi lembaga swadaya masyarakat (LSM). Padahal tugas pesantren adalah mengurus perkembangan agama, ka­rena masyarakat muslim Indonesia masih membutuhkan se­ke­lompok orang yang mendalami ilmu agama Islam (*tafaqquh fi al-din*).[[16]](#footnote-16)

Pesantren sesuai fungsinya, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama.[[17]](#footnote-17) Sehubungan dengan ketiga fungsi itu, maka pesan­tren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya.[[18]](#footnote-18) Dengan demikian, tantangan yang dihadapi pe­san­tren, selain mempertahankan eksistensi nilai-nilai ke­aga­ma­an yang telah ada, sekaligus menjawab tuntutan perkem­bang­an masyarakat sebagai bentuk perubahan sosial bagi lem­baga pendidikan keagamaan.

Namun, harus disadari bahwa perubahan sosial budaya yang sangat kuat ternyata di satu sisi telah membawa per­ubah­an secara signifikan dalam pola pikir dan pola sosial buda­ya di pesantren. Realitas ini ditunjukkan oleh pandangan dan sikap positifnya terhadap berbagai produk budaya maupun tek­no­lo­gi modern yang merupakan tantangan telah mam­pu meng­ge­ser sistem nilai yang ada di pesantren.[[19]](#footnote-19) Sedang­kan di sisi lain, perubahan yang menjadi sebuah dina­mi­ka itu tidak hanya dapat berperan sebagai kekuatan yang dapat mem­per­ce­pat laju proses modernisasi, tetapi juga bisa menstabi­li­sasikannya dan menentukan proses perkembangan Indonesia secara his­toris sampai sekarang.[[20]](#footnote-20)

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pesantren di­pan­dang sebagai alat transformasi kultural, karena ia memba­wa santri dan masyarakat ke dalam lingkup pengaruh sumber-sumber nilai akhlak dan norma-norma yang cukup luas, juga me­rupakan kerangka acuan bagi sikap yang ideal menurut ajaran Islam. Sebab, pesantren berdiri sebagai ja­wab­an atas panggilan keagamaan untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai agama melalui pendidikan keagamaan dan peng­ayoman serta dukungan kepada kelompok yang bersedia men­ja­lan­kan perintah agama dan mengatur hubungan di antara mereka.[[21]](#footnote-21)

Tuntutan yang sekaligus menjadi tantangan modernisasi pesantren, adalah menemukan cara yang tepat untuk mem­perluas wacana yang menjadi pusat perhatian masyarakat su­pa­ya bermanfaat bagi generasi muslim selanjutnya.[[22]](#footnote-22) Fenome­na itu yang harus menjadi titik perhatian kajian-kajian tentang pesantren masa depan dalam menjaga relevansinya dengan realitas masyarakat,[[23]](#footnote-23) sehingga masa depan pesantren tergan­tung pada kemampuannya berpacu dengan waktu dan lem­ba­ga lain secara kompetitif dengan menangani berbagai macam disiplin ilmu maupun secara distributif dengan meng­khu­sus­kan satu bidang tertentu.[[24]](#footnote-24)

Upaya tersebut masih ditentukan oleh otoritas pimpinan pesantren (kiai) karena model pengelolaan (manajemen) pen­di­dikan di pesantren yang bersifat sentralistik. Aspek inilah yang sering luput dari perhatian para peneliti dan pemer­ha­ti pendidikan Islam dan justru menjadi problem uta­ma dalam upa­ya modernisasi pendidikan pesantren.[[25]](#footnote-25) Aku­mulasi dari ma­salah yang ada dalam dunia pesantren itulah yang menye­babkan lembaga ini dipandang tidak *marketable*. Hubungannya dengan pernyataan tersebut, Amin Abdullah mengatakan:

…kegiatan pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama Islam pada khususnya adalah serupa atau mirip dengan barang komoditi yang perlu dipasarkan dengan cara yang canggih dan simpatik. Untuk itu kaidah-kaidah “pemasaran” yang menarik perlu dipelajari. Dengan begi­tu, diperlukan manajemen dan mentalitas penyeleng­ga­raan pendidikan Islam yang tidak bersandar pada pola pe­mi­kiran yang bersifat pasif-represif-reparatif, tetapi di­per­­lukan pola pikir dan mentalitas yang kreatif-dinamis-inovatif.[[26]](#footnote-26)

Mengacu pada pernyataan Amin Abdullah di atas, Pesan­tren harus menjadi representasi lembaga pendidikan tradi­sio­nal yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama semata, tetapi sudah mengarahkan program pen­di­dikan dengan memper­tim­bangkan pangsa pasar dan menge­jar keterting­gal­an pesantren dengan sekolah-sekolah umum yang modern. Dari sinilah, pe­san­tren juga harus mampu melakukan lom­pat­an strategis dari pesantren tradisional men­jadi pesan­tren modern.

Dari paparan di atas, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa konsep modernitas dan modernisasi bukanlah konsep yang berperspektif tunggal. Melihat banyaknya per­spek­tif tentang modernitas tersebut, konsep modernitas dan mo­dernisasi yang digunakan dalam penulisan buku ini lebih merujuk pada konsep modernisasi yang dibuat oleh Durkheim *(The Division of Labor)* dan Weber *(Rationalisation and Declining Tradition),* yaitu tumbuhnya beberapa lembaga pendidikan umum yang menawarkan beberapa spesialisasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia modern. Sebelum adanya gelom­bang modernisasi pendidikan yang juga merambah dunia pe­santren, pesantren hanya berkutat pada ajaran keagamaan, se­perti membaca al-Qur’an dan kajian kitab kuning klasik. Dalam konteks ini, alumni pesantren cenderung gagap dan tidak siap menghadapi tantangan modernitas. Kemudian pas­ca modernisasi di pesantren, para alumni pesantren men­jadi le­bih siap menghadapi tantangan modernitas, karena mereka telah dididik dan dibekali dengan pengetahuan dan keteram­pilan yang dibutuhkan dunia modern, di samping pe­nge­tahuan-pengetahuan keagamaan sebagai ciri khas awal dari pesantren.[]

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN TRADISIONAL PESANTREN

P

endidikan merupakan suatu kekuatan inovatif dan di­na­mis yang dapat mempengaruhi perubahan di masya­ra­kat. Josept S. Szyliowies mengatakan bahwa pen­di­dikan memiliki pengaruh utama dalam perubahan sosial dan dapat mengubah pikiran manusia dari tradisional menjadi mo­dern.[[27]](#footnote-27) Sebab, dengan pendidikan, saluran penting yang me­nyang­kut gagasan dan nilai-nilai baru dapat muncul seka­ligus memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan ma­sya­rakat.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan proses yang melibatkan transformasi manusia, masyarakat dan buda­ya­nya, serta memiliki inti kepercayaan fundamental dalam pemikiran ilmiah. KH. Wahid Hasyim, seperti yang dijelaskan Ahmad Zaini, mengatakan bahwa pendidikan harus meng­ajar­kan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang siap meng­ha­dapi modernisasi Barat.[[28]](#footnote-28) Sebab, pendidikan akan meng­an­tar­kan masyarakat yang statis dan tradisional berubah men­jadi bangsa yang maju dan mampu membangkitkan ma­sya­rakat dalam menghadapi perubahan zaman.[[29]](#footnote-29) Dengan demi­kian, dapat dikatakan bahwa tatanan masyarakat yang maju di­pe­nga­ruhi adanya modernisasi, sementara modernisasi itu sen­di­ri sangat tergantung dari dunia pendidikan.

Pesantren sebagai basis pendidikan Islam tradisional di Indonesia dipandang telah mampu menggerakkan masyarakat dalam melakukan pembinaan lingkungan dan perubahan ma­sya­rakat.[[30]](#footnote-30) Bahkan pada masa penjajahan, aktivitas pesan­tren juga telah berperan aktif dalam pengusiran penjajah dari tanah air menuju Indonesia merdeka pada tahun 1945. Disamping itu, komunitas pesantren telah berhasil melakukan perubahan sistem pendidikan yang tradisional mengarah pada pen­di­dik­an yang modern.

Pendidikan pesantren dijuluki sebagai lembaga tradi­sio­nal. Sebab lembaga pendidikan ini dikembangkan dari tradisi yang sangat kuat di lingkungan masyarakat Indonesia. Bahkan pesantren merupakan salah satu simbol budaya pendidikan asli Indonesia dan sistem pendidikan yang dikembangkan di pesantren memang berakar pada tradisi pendidikan keaga­maan,[[31]](#footnote-31) di mana aktivitas pendidikannya semata-mata difokus­kan pada kajian kitab-kitab klasik yang mengarah pada *tafaq­quh fi al-din*, yakni pendalaman pengalaman, perluasan penge­ta­huan, dan penguasaan khazanah ajaran Islam. Sehing­ga, pen­didikan pesantren diberi sebutan sebagai lembaga pen­di­dik­an yang tradisional, konservatif, dan terbelakang.

Pada awal abad XX, julukan ‘tradisional’ yang melekat pada lembaga pendidikan pesantren sudah tidak lagi relevan untuk zaman sekarang, karena label itu sudah berkurang ke­mam­puannya untuk menjelaskan fenomena atau realitas sosial yang ada. Ciri khas pesantren perlu dijaga supaya tidak ter­je­bak ke dalam sikap eksklusif yang anti kemajuan karena ada­nya tuntutan modernisasi, kontak dengan budaya luar, per­kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemauan sikap terbuka, toleransi dan sebagainya atau sering disebut dengan modernisasi. Modernisasi merupakan cara pandang terhadap suatu hal atau peristiwa yang menempatkan faktor mentalitas manusia menjadi penyebab perubahan dalam kehidupan ma­sya­rakat.[[32]](#footnote-32) Oleh karena itu, modernisasi pen­didikan pesantren dimaknai sebagai suatu proses perubahan tatanan kehidupan pesantren dari yang tradisional menuju ta­tanan kehidupan yang lebih maju dan modern.

Selanjutnya, perubahan sosial menurut Samuel Koenig se­ba­gaimana disitir oleh Soekanto menunjukkan pada modi­fi­kasi-modifikasi yang terjadi karena faktor-faktor ekster­nal dan internal.[[33]](#footnote-33) Faktor internal bisa terjadi mungkin karena ter­jadi ke­tegangan (*tension*)[[34]](#footnote-34) di antara sesama pengelola pesantren untuk mempertahankan ciri khas pesantren atau beradaptasi dengan tuntutan masyarakat. Sementara faktor eksternal bisa terjadi karena perubahan sosial budaya sebagai ekses dari kontak budaya dan akulturasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lain sehingga menghasilkan bentuk kebu­da­yaan baru.[[35]](#footnote-35) Namun, semua konsep tentang perubahan itu sesungguhnya merujuk pada proses suatu peralihan dari suatu tahapan keadaan sosial ke tahap beri­kut­nya, serta perubahan itu melibatkan faktor waktu. Dengan demikian, perubahan so­sial merupakan proses yang ber­kesi­nam­bungan dalam suatu kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan pengadopsian teknologi.

Selanjutnya perubahan yang disebabkan karena penye­su­aian diri dan terjadi secara penuh kesadaran itu disebut *social change, cultural change, sociocultural adaptation,* atau *adjust­ment*.[[36]](#footnote-36) Untuk itu, tantangan yang dihadapi pesantren harus dimaknai sebagai peluangnya dalam merespon era modern. Pesantren dengan tradisi dan nilai-nilai yang dimiliki akan mampu men­jadi solusi alternatif bagi problem pendidikan di dunia mo­dern. Hal ini menuntut adanya peningkatan kualitas dan per­baikan manajemennya, sehingga peran besar lembaga ke­islaman ini harus bisa mengimbangi dan memberikan arah arus atau proses modernisasi yang cenderung hanya mene­kan­kan aspek lahiriah dan mengesampingkan aspek batiniah se­hing­ga yang terjadi adalah runtuhnya nilai-nilai moral.

Bertolak dari konsep perubahan sosial yang turut mem­pe­nga­ruhi terjadinya perubahan sosial yang meliputi perubahan nilai dan ide serta sikap, pengalaman, persepsi dan bahkan re­flek­si dari perubahan yang terjadi dalam struktur masya­ra­kat,[[37]](#footnote-37) maka transformasi yang terjadi di dunia pesantren juga me­nyangkut aspek-aspek itu. Sebab, antara agama dengan ma­sya­­rakat terdapat hubungan integral. Joachim Wach ber­pen­dapat bahwa hubungan agama dan masyarakat itu se­ti­daknya memiliki tiga aspek. *Pertama,* aspek teoritis yang beru­pa sistem kepercayaan. *Kedua*, adanya sistem kaidah yang mengikat peng­anutnya sebagai aspek praktis. *Ketiga*, aspek so­sio­logis, yakni nilai-nilai keagamaan yang secara alamiah membentuk dan mempertahankan hubungan sosial.[[38]](#footnote-38)

Secara sosiologis, agama akan mempengaruhi integritas masyarakat secara positif atau melekat, di samping itu juga da­pat membawa pengaruh destruktif, memecah belah, dan hal-hal negatif lainnya. Kohesi yang kuat dalam jalinan ke­lompok masyarakat antara lain dipengaruhi oleh agama, sebab hu­bungan individu dalam suatu kelompok yang didasarkan atas kesamaan ideologi dan agama dapat memun­culkan ikatan batin dan persaudaraan yang kuat. Melihat le­kat­nya kohesi itu, maka fungsi sosial dan agama hampir nampak sebagai ikatan yang sempurna.[[39]](#footnote-39) Semua fungsi sosial yang dilakukan dalam berbagai cara untuk mengintegrasikan kelompok-kelompok ma­sy­arakat mungkin dianggap sebagai ungkapan loyalitas ter­hadap nilai-nilai yang lebih tinggi yang mengambil makna semi-religius. Maka, untuk memperkuat ikatan-ikatan sosial yang ada dapat dilaksanakan dengan cara mengajak berbuat ibadah secara lebih mendalam, agar realitas ini menjadi hal yang wajar dalam kehidupan sosial.

Adapun perubahan budaya (*cultural change*) merupakan proses perubahan tatanan sosial atau masyarakat dari bentuk lama ke bentuk lain. Perubahan ini mencakup struktur ke­hidup­an masyarakat, organisasi tradisional atau lokal, bentuk pemukiman, sistem kepercayaan, pendidikan, dan pola kon­sum­si sehari-hari.[[40]](#footnote-40) Oleh karena itu, perubahan dalam dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masya­ra­kat, seperti adanya penemuan (*discovery*) dalam berpikir, pem­­baruan hasil (*invention*) teknologi, kontak dengan kebu­da­ya­an lain yang menyebabkan terjadinya difusi, dan pemin­jaman kebudayaan. Maka, dimensi perubahan budaya itu me­li­puti inovasi, difusi, dan integrasi.[[41]](#footnote-41) Adapun perubahan pada dimensi interaksional berkaitan dengan perubahan relasi sosial yang menyangkut kuantitas (frekuensi) dan jarak sosial adalah intimitas, peralatan yang digunakan, keteraturan, dan sebagai­nya.

Berkaitan dengan terjadinya perubahan sosial itu menye­bab­kan pembicaraan tentang peran pesantren menjadi penting untuk dikaji karena sampai sekarang lembaga pendidikan ini masih menjadi magnet sistem sosial yang dapat menarik ber­ba­gai pihak untuk berakomodasi, bahkan menumbuhkan vi­ta­li­tas dan sumber inspirasi baru dalam menghadapi tan­tangan modernitas dewasa ini. Namun, dalam menghadapi derasnya perubahan sosial budaya akhir-akhir ini, nampaknya pe­san­tren perlu memperluas peran-peran tradisionalnya dengan ber­bagai terobosan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin komplek.

Dengan demikian, upaya inovasi pesantren sebagai insti­tusi sosial ini masih perlu dilakukan sebagai konsekuensi dalam merespon tuntutan modernitas. Dalam memenuhi tun­tutan ini, problem modernisasi pesantren terletak pada or­ga­nisasi dan sistem pendidikan dan pengajaran. Jika pesan­tren meng­­alami sebuah perubahan orientasi, maka selayaknya ke­pu­tusan untuk mengubah itu ditentukan oleh pemimpin pesantren itu sendiri. Namun, standar tujuan dan sistem pen­di­dikan itu harus sesuai konsep luar (kebutuhan) luar.[[42]](#footnote-42) Sehingga, kemapanan suatu institusi itu ditentukan oleh adanya konsensus bersama ter­hadap tujuan yang sama pula.[[43]](#footnote-43)

Tujuan pendidikan pesantren yang berusaha untuk me­wu­judkan “terbentuknya manusia yang memiliki ke­sa­dar­an yang setinggi-tingginya akan bimbingan agama Islamyang bersifat menyeluruh, dan dilengkapi dengan kemampuan se­ting­gi-tingginya untuk mengadakan respons terhadap tan­tangan dan tuntutan hidup dalam kon­teks ruang dan waktu yang ada...”.[[44]](#footnote-44) Tujuan pendidikan Islam menghendaki ada­nya keseimbangan antara ilmu agama dengan mem­per­timbangkan fenomena sosial dan formulasi kenyataan yang terjadi di ma­syarakat.[[45]](#footnote-45) Hal ini sesuai dengan pesan al-Qur’an sebagai berikut;

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah ke­padamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah te­lah berbuat baik kepadamu”. **(QS. Al-Qashash [28]: 77)**[[46]](#footnote-46)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan masyarakat akan berubah sesuai dengan tuntutan proses mo­dernisasi, maka tujuan pendidikan pesantren juga di­harap­kan bisa mengantarkan masyarakat sesuai harapan itu. Dengan demikian, pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh pesan­tren didasarkan kaidah *al-muhafazah ‘ala al-qadim al-shalihwa al-akhzubi al-jadid al-ashlah* (melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik). Kaidah ter­se­but di atas telah menjadi acuan yang cukup kuat dalam kul­tur pesantren dan sekaligus sebagai pegangan bagi upaya pem­ba­ruan yang dilakukan oleh masyarakat santri yang tersebar di Indonesia.[[47]](#footnote-47) Semangat itu ditopang oleh ayat al-Qur’an seba­gai berikut:

“Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perum­pa­maan”. **(QS. Ar-Ra’d [13]: 17)**[[48]](#footnote-48)

Dari sini dapat dipahami bahwa sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan berguna bagi masyarakat, maka hal itu akan tetap eksis dan dipelihara oleh masyarakat. Sedangkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan sudah tidak berguna lagi, maka hal itu akan segera musnah. Dengan demikian, ka­lau suatu saat nanti tidak ada lagi santri yang belajar di pe­san­tren, berarti lembaga itu dipandang oleh masyarakat sudah kurang atau tidak lagi bermanfaat.

Atas dasar itulah sistem pendidikan pesantren pada masa yang akan datang diharapkan menjadi model pendidikan al­ter­natif. ’Pendidikan alternatif’ merupakan bagian dari ke­bu­tuhan untuk menemukan kembali makna pendidikan for­mal dan nilai praktiknya bagi semua kelompok sosial, bukan hanya untuk sejumlah kecil orang tertentu.[[49]](#footnote-49) Pen­di­dikan alternatif sebagai wujud dalam merespon tantangan zaman di masa depan, yakni menjawab kebutuhan lembaga pesantren yang mampu melahirkan manusia beriman dan ber­takwa sekaligus menguasai IPTEK secara profesional. Peme­nuhan kebutuhan sumber daya manusia semacam itu sangat memacu laju per­kem­bangan pembangunan pada umum­nya.[[50]](#footnote-50) Maka, pen­di­dik­an sebagai *agent of change* yang membawa perubahan sosial itu menuntut adanya perubahan dan pembaharuan kurikulum.[[51]](#footnote-51)

Selanjutnya, modernisasi pendidikan pesantren[[52]](#footnote-52) diharap­kan dapat berperan aktif dalam mendorong terwujudnya per­ubahan sosial yang berfungsi untuk memformulasikan pe­santren dari pranata Islam yang semata-mata hanya mem­pro­duksi ulama yang bersifat kerahiban dan tertutup menjadi pusat pengembangan masyarakat akibat perubahan sosial.[[53]](#footnote-53) Munculnya perubahan sosial itu menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut :

Diduga perubahan sosial budaya dan cara berpikir di­do­rong oleh faktor internal, yakni kemauan seluruh elemen untuk berubah. Keinginan untuk berubah atau mem­per­baharui cara pandang dan berpikir dalam menyikapi per­ubah­an sosial budaya sebagai akibat dari laju mo­der­nitas ini sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada ma­sya­rakat yang berhenti (*stagnant*) pada satu titik tertentu sepanjang masa.[[54]](#footnote-54)

Pendapat di atas menyebabkan terjadinya pergeseran pe­ne­kanan dalam materi kitab-kitab tradisional yang tampak­nya akibat pengaruh modernisme.[[55]](#footnote-55) Realitas ini terjadi hampir di semua pesantren yang mengalami perubahan menuju ke­bang­kitan kembali ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di dunia Islam. Namun, hal ini dipersyaratkan adanya kemau­an pesantren untuk membuka diri terhadap iptek dengan me­ma­sukkan unsur-unsurnya ke dalam kurikulum dan kegiatan­nya tanpa menggeser materi keagamaan, sekaligus untuk meng­an­ti­sipasi perubahan pada masa kini dan yang akan datang.[[56]](#footnote-56) Dalam kaitan inilah Rahman menawarkan dua pen­de­katan untuk mendapatkan pengetahuan modern, sebagai­mana di­katakannya:

*Two basic approaches to modern knowledge have been adopted by modern Muslim theorists: (1) that the acquisition of modern knowledge be limited to the practical technological sphere, since at the level of pure thought Muslims do not need Western in­tellectual products—indeed, that this should be avoided, since they may create doubt and disruption in the Muslim mind, for which the traditional Islamic system of belief already provides satisfactory answers to ultimate questions of world view; and (2) that MuslimswithoutfearcanandoughttoacquirenotonlyWestern technology but also its intellectualism, since no type of know­led­ge canbeharmful,andthat in any case science and any pure thought were assiduously cultivated by Muslims in the early me­dieval centuries, whence they were taken over by Europeans themselves.[[57]](#footnote-57)*

Dengan demikian, dimensi sosial pesantren harus dapat dikembangkan menjadi lembaga pusat kegiatan belajar masya­ra­kat (*community learning centre*) yang berfungsi menyam­pai­kan teknologi baru yang cocok bagi masyarakat setempat dan memberikan pelayanan sosial dan keagamaan. Selain itu, pe­san­tren juga bisa berperan sebagai laboratorium sosial yang me­lakukan eksperimentasi pengembangan masyarakat, di mana antara pesantren dan masyarakat terjadi simbiosis mu­tua­lisme.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka pesantren agar membekali alumninya dengan iman yang tangguh se­ka­ligus terampil dalam bekerja (*religious skillful people*), men­jadi peng­gerak masyarakat (*religious community leader*), dan ilmuwan yang tanggap terhadap masalah sosial (*religious intellectual*).[[58]](#footnote-58) Dengan demikian, yang dimaksud modernisasi adalah *“The critical reassessment of religious doctrines and previous theological interpretations in an effort to increase the social relevance of Islam in light of the challenges of modernity”*.[[59]](#footnote-59) Atau dengan kata lain, terjadinya transformasi pendidikan Islam di Indonesia itu melalui penggabungan nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modern,[[60]](#footnote-60) sehingga alasan pesantren untuk bersikap optimis dalam menghadapi perubahan sosial itu tetap memiliki peluang yang cukup besar.

Tahapan yang harus dilakukan untuk menuju modern­i­sa­si pendidikan pesantren adalah melalui penataan kelem­ba­gaan, kepemimpinan kolektif, pelibatan partisipasi dan ber­bagai kalangan yang *concern*terhadap kelangsungan hidup pe­san­tren, revitalisasi ruh Islami, semangat egalitaria­nis­me, dan antisipasi ke depan yang cukup menjanjikan serta mem­beri­kan harapan di masa mendatang.[[61]](#footnote-61) Dalam hal kepe­mim­pinan ko­lek­tif, modernisasi pendidikan pesantren tidak harus menia­da­kan peran kiai.[[62]](#footnote-62) Sebab, peran kiai dengan kharis­ma­nya pada suatu saat juga tetap dibutuhkan, karena terpusatnya kewe­nangan kiai yang menjadi ciri khas pesantren itu pada satu sisi menjadi kekuatan dan pada sisi lain menjadi ke­lemahan.

Independensi pesantren dalam memberikan tanggapan konstruktif terhadap tantangan dari luar relatif lemah, seperti pengenalan sekolah umum yang berorientasi pada pendidikan keterampilan dengan tujuan agar para alumni pesantren mam­pu hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat,[[63]](#footnote-63) sekaligus mem­buka wawasan befikir keduniaan.[[64]](#footnote-64) Langkah berani pe­san­tren tersebut merupakan sebuah otonomi dan mem­beri­kan ke­luwesan bagi pesantren dalam mempelopori konsep pen­didikan baru yang secara kultural sebagai peranan kom­ple­menter dengan kesadaran ideologis untuk menyediakan dasar yang kuat bagi transformasi fundamental.

Dari beberapa rumusan teori yang dipaparkan di atas, se­tidaknya cukup kuat dasar teori yang dapat diguna­kan untuk membangun sebuah konsep pendidikan Islam yang me­miliki dimensi dinamis dan bisa dikembangkan menjadi se­buah alter­natif model partisipasi. Bahkan, Komarudin Hidayat mem­pertegas bahwa alternatif model partisipasi ter­sebut sebagai kepeloporan dalam konteks pembangunan bangsa.[[65]](#footnote-65)

Melalui sistem pendidikan madrasah dan model pen­di­dik­an umum yang dikembangkan di pesantren, maka ke­ma­juan pendidikan pesantren akan mampu menghadapi per­ubahan sosial. Sehingga, secara sosiologis, lembaga pen­didik­an berfungsi untuk menyiapkan individu untuk tugas-tugas sosial yang diharapkan.[[66]](#footnote-66) Gambaran sosiologis ini menem­patkan pesantren sebagai institusi yang menjadi wacana untuk mengekspresikan pengalaman agama dalam bentuk konkret.

Perubahan sosial merupakan suatu perkembangan yang tidak dapat dihindari, karena dalam kehidupan masyarakat tidak ada yang pasti dan stabil.[[67]](#footnote-67) Oleh karena itu, untuk meng­hadapi perubahan yang terjadi dimasyarakat sangat diperlu­kan peran pendidikan. Lebih tegas Ziemek menjelas­kan, bahwa pesantren sebagai basis pendidikan Islam tradi­sional di Indonesia telah berhasil menggerakkan masyarakat dalam melakukan pembinaan lingkungan dan perubahan ma­sya­ra­kat[[68]](#footnote-68) bahkan pada masa penjajahan, aktivitas pesan­tren ber­hasil mengusir penjajah dari tanah air sehingga Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Keberhasilan pendidikan dalam perubahan sosial antara lain dibuktikan komunitas pesantren yang telah berhasil me­lakukan perubahan sistem pendidikan yang tradisional men­jadi pendidikan yang modern. Horikoshi mengatakan bahwa kiai berperan kreatif dalam perubahan sosial, bahkan kiai tidak saja meredam akibat perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi menjadi pelopor perubahan sosial dengan caranya sendiri.[[69]](#footnote-69) Dengan demikian, peranan pendidikan sebenarnya merupa­kan saluran penting yang menyangkut gagasan dan nilai-nilai baru dapat muncul sekaligus memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat.

A. Pesantren dan Tradisionalisme

Istilah pondok pesantren terdiri dari dua suku kata, yaitu pondok dan pesantren. Secara etimologis, pondok berasal dari bahasa Arab *funduq* yang berarti ruang tidur, wisma, hotel sederhana,[[70]](#footnote-70) dan juga dapat berarti kamar, gubuk kecil, dan rumah. Sedangkan istilah pesantren[[71]](#footnote-71) berasal dari akar kata “santri” yang mempunyai makna berbeda-beda. Nurcholis Madjid misalnya, memberikan pemaknaan terhadap kata “santri” dilihat dari asal usul kata tersebut. Dalam bahasa Sansekerta, kata santri berarti *melek huruf,* sedangkan dalam bahasa Jawa, kata santri bisa berakar dari kata *cantrik* yang ber­arti seseorang yang mengikuti gurunya menetap.[[72]](#footnote-72)

Selanjutnya, perkembangan istilah santri tidak bisa lepas dari sebuah dorongan yang kuat dari masyarakat untuk belajar pengetahuan agama kepada seorang kiai yang dianggap sarat keahlian dalam bidang agama. Karenanya, pada perkem­bang­an selanjutnya istilah santri selalu identik dengan seseorang yang mempunyai motivasi belajar agama Islam, baik kitab-kitab kuning ataupun sumber-sumber belajar lainnya. Sehing­ga institusi pesantren merupakan sebutan khas untuk pen­di­dikan Islam di Indonesia. Namun, penyebutan nama pe­santren berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Di daerah Pasundan, pesantren dikenal dengan *pondok*, *Dayah Rengkang* (di Aceh), *Meunasah* (di Aceh), *Surau* (di Minahasa) dan pondok pesantren (di Jawa).[[73]](#footnote-73)

Secara tradisional, pesantren memiliki lima elemen pen­ting, yaitu: pondok, masjid, kitab kuning, kiai, dan santri.[[74]](#footnote-74) Lima elemen yang saling terkait satu sama lain itu harus ada dalam sebuah pesantren. Pondok merupakan tempat di mana santri tinggal dan menetap selama belajar di pesantren, masjid berfungsi sebagai tempat para santri belajar agama Islam di pesantren, dan kitab kuning sebagai pembelajaran, karena me­mang materi pelajaran yang diajarkan di pesantren tradisional hampir semua bersumber dari kitab-kitab kuning dalam berbagai bidang seperti fikih, hadits, tafsir, dan akhlak.

Kemudian kiai juga merupakan salah satu elemen terpen­ting dalam sebuah pesantren, karena dialah pendiri sekaligus pemimpin pesantren yang bertugas mengatur segala aturan main pesantren, seperti kurikulum, metodologi pembelajaran, dan sebagainya. Sedangkan elemen terakhir dari pesantren adalah santri itu sendiri, sebabpesantren tidak bisa berkem­bang jika tidak ada santri yang belajar agama Islam kepada kiai di pesantren. Dalam konsep santri tradisional, hubungan patron-klien antara santri dan kiai masih sangat kental. Santri tak ubahnya seperti klien yang merupakan subordinat dari kiai sebagai patron-nya.

Hubungannya dengan peran kiai dalam kelembagaan dan pendidikan, Mastuhu dalam bukunya *Dinamika Sistem Pen­di­dikan Pesantren* mengatakan bahwa sistem kelembagaan pe­santren dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu milik pribadi dan milik institusi.[[75]](#footnote-75) Lebih lanjut Mastuhu men­jelaskan bahwa masing-masing bentuk kelembagaan pesantren itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mastuhu menulis:

Kelebihan pesantren dengan status pribadi antara lain adalah mereka memiliki kebebasan menentukan jalan hidupnya sendiri dan bebas merencanakan pola pengem­bangannya. Tetapi kelemahannya antara lain sangat ter­gan­tung pada kemauan dan kemampuan per­orangan yang seringkali kurang berbobot dan kurang konsisten dalam melaksanakan kebijakan, karena tidak terstruktur dalam suatu pola yang dapat memberikan kaya masukan-masukan dan objektif, sehingga dapat dikontrol dan di­evaluasi kemajuan dan kemundurannya. Di samping itu, umur pesantren dengan status milik pribadi tergan­tung pada umur pemiliknya, yang biasanya lebih pendek daripada umur institusi.

Sebaliknya, kelebihan pesantren dengan status milik in­sti­tusi antara lain adalah tidak tergantung kepada per­se­orang­an, tetapi tergantung pada institusi lengkap dengan mekanisme-sistemnya, sehingga dapat dikontrol dan di­eva­luasi kemajuan dan kemundurannya dengan meng­gu­na­­kan tolok ukur yang objektif. Sedangkan kelemahan­nya antara lain adalah adanya kemungkinan terbelenggu dengan aturan-aturan birokrasi sehingga tidak lincah dalam mengambil keputusan yang dapat menghambat kemajuan.[[76]](#footnote-76)

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tra­disional tertua di Indonesia.[[77]](#footnote-77) Keberadaannya diakui telah ada jauh sebelum berdirinya sekolah umum bahkan madrasah. Predikat “tradisional” yang senantiasa melekat pada institusi pesantren tersebut pada giliranya melahirkan stigma negatif bahwa pesantren identik dengan agen tradisionalisme, keter­be­lakangan, dan anti kemajuan. Clifford Geertz dalam sebuah *The Religion of Java* masih menganggap pesantren dan kiainya pada hal-hal tertentu masih merupakan inti struktur Islam pedesaan dan merupakan agen tradisionalisme.[[78]](#footnote-78) Lebih lanjut, Geertz mengklaim bahwa visi-misi pesantren hanya ber­orien­tasi pada soal “kuburan” dan “ganjaran”[[79]](#footnote-79) yang tidak peka ter­hadap perubahan sosial yang senantiasa terjadi.

Azyumardi Azra mengutip pendapat Sutan Takdir Alisjahbana, seorang eksponen sistem pendidikan zaman Belanda, mengusulkan agarsistem pendidikan yang ada di pesantren segera ditinggalkan atau diupayakan transformasi pesantren “sehingga mampu mengantarkan kaum muslim ke gerbang rasionalitas dan kemajuan.”[[80]](#footnote-80) Stigma negatif seperti itu dinilai wajar karena memang pesantren harus diakui tum­buh dan berkembang dalam sistem pendidikan yang masih tradisional. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan pesantren lebih diorientasikan pada kepentingan ukhrowi yang *ngawang-ngawang* sehingga para lulusannya kurang mampu bersaing di dunia modern yang menuntut kualifikasi keilmuan yang lebih fungsional.

Namun demikian, penting dicatat di sini bahwa label “tradisional” yang dialamatkan kepada pesantren tersebut tidak berarti bahwa pesantren itu statis, *mandeg* atau stagnan, melainkan pesantren dinilai selalu dinamis, apresiatif dan akomodatif dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, Zamakhsyari menulis:

*Certainly the pesantren is a traditional institution in the sense that it has and is founded on a centuries-old tradition. But being a traditional Islamic educational institution does not mean that pesantrens are stagnant or out of date. What is out of date is that opinion itself, not the pesantren, because the pesantren is constantly changing.... [[81]](#footnote-81)*

Lebih dari itu, nada pejoratif yang selalu ditujukan kepada pesantren nampaknyasemakinbergesermenjadinadasim­patik seiring dengan beberapa transformasi yang terjadi di pesan­tren, baik yang menyangkut aspek kepemimpinan maupun sistem pendidikan sebagai dampak modernisasi.[[82]](#footnote-82) Dengan de­mi­kian, pergulatan pesantren dengan modernitas adalah feno­me­na kekinian yang unik dan menjadi sorotan dalam pem­bahasan pembaruan pendidikan.

Modernisasi yang terjadi pada lembaga-lembaga pen­didikan Islam tradisional seperti pesantren (Jawa) atau surau (Minangkabau) banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, daripada faktor internalnya. Hal ini sebagaimana ditulis Zamakhsyari dalam artikelnya yang disunting oleh A.G. Muhaimin, *“This does not mean that any change which takes place in the Pesantren is merely internal. It is obvious that this kind of change is significantly motivated by the outside community*.”[[83]](#footnote-83) Senada dengan Dhofier, Azyumardi Azra memandang bahwa “modernisasi paling awal dari sistem pendidikan di Indonesia, harus diakui, tidak bersumber dari kalangan kaum muslim sendiri.” Lebih lanjut Azra mengatakan bahwa modernisasi sistem pendidikan Islam tradisional banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan modern yang diintrodusir oleh Belanda[[84]](#footnote-84) melalui sistem Sekolah Umum.

Selain itu, akar modernisasi pesantren di Indonesia juga tidak bisa lepas dari pengaruh gerakan pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan oleh kaum reformis atau modernis mus­lim yang berpandangan bahwa “untuk menjawab tantangan kolonialisme dan Kristen diperlukan reformasi sistem pen­didikan Islam.”[[85]](#footnote-85) Pada aras ini, pesantren sebagai sebuah lem­ba­ga pendidikan Islam tradisional mendapat tantangan tidak hanya dari sistem pendidikan modern ala Belanda, tetapi juga dari sistem pendidikan modern Islam. Dua preseden penting inilah yang kemudian menginspirasi pesantren untuk mela­ku­kan beberapa akomodasi dan penyesuaian *(adjustment)*. Oleh karena itu, ada dua bentuk kelembagaan pendidikan modern Islam: *pertama*, sekolah-sekolah umum model Belanda tetapi diberi muatan pengajaran Islam, seperti SD Islam Terpadu (SDIT), SMP Islam Terpadu (SMPIT), SMA Islam; *kedua*, madrasah-madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda. Dalam bentuk pertama, misalnya Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh Abdullah Ahmad di Padang pada tahun 1909, dan se­kolah-sekolah umum model Belanda yang didirikan organisasi seperti Muhammadiyah.[[86]](#footnote-86)

Namun demikian, munculnya gelombang modernisasi pendidikan Islam seperti yang telah dijelaskan di atas ternyata menimbulkan aneka respon bagi kalangan pesantren. Menurut pengamatan Karel Steenbrink, ada dua respon yang ditunjuk­kan oleh lembaga pendidikan tradisional Islam, seperti surau (Minangkabau) dan pesantren (Jawa) yaitu “menolak sambil mengikuti” dan “menolak dan mencontoh.” Sistem surau di­ni­lai mengambil bentuk pertama, sedangkan bentuk kedua ba­nyak didominasi oleh kebanyakan pesantren di Jawa.[[87]](#footnote-87) Ke­ti­ka beberapa ormas keagamaan seperti Al-Washliyah, Muham­ma­diyah, Persis, dan NU mulai mengadopsi sistem pen­didikan modern ala Belanda, sisitem pendidikan pesantren tetap diper­tahan­kan sebagi pendidikan masyarakat di luar peng­awasan pemerintah Belanda.

Dua respon itu menunjukkan bahwa kehadiran moder­ni­sasi bagi dunia pesantren menimbulkan dilema. Di satu sisi, dunia pesantren khawatir akan terjadi reduksi otentisitas dan jati diri pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fi al-din*, tetapi di sisi lain, pesantren juga semakin terdesak dengan beberapa per­ubahan sosial *(social change)* akibat modernisasi yang terjadi di masyarakat. Dari sinilah modernisasi pesantren di Jawa mu­lai melakukan sejumlah penyesuaian dengan cara pandang dan paradigma modern. Pesantren Mambaul Ulum Surakarta disebut-sebut sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang kemudian melakukan transformasi menuju modernisasi. Pesantren inilah yang menjadi pelopor bagi pesantren-pe­san­tren lainnya untuk mengintrodusir beberapa mata pe­la­jaran umum yang sering diklaim ‘sekuler’ seperti membaca [tulisan latin], aljabar, dan berhitung dalam pendidikan pesantren.[[88]](#footnote-88)

Proses akomodasi dan transformasi itu diakui tidak hanya bermanfaat bagi pesantren itu sendiri demi menjaga konti­nui­tas­nyadi tengah desakan arus modernisasi, tetapi juga ber­man­faat bagi santri berupa sistem penjenjangan, kurikulum yang lebih jelas, dan sistem klasikal[[89]](#footnote-89) yang memungkinkan santri untuk bisa *survive* di tengah kompetisi modernitas yang se­ma­kin ketat. Dinamisasi pendidikan pesantren tersebut menye­bab­kan pesantren menjadi diskursus yang menarik di ka­langan para peneliti dan pakar pendidikan. Bahkan sistem pen­didikan pesantren pada masa mendatang diprediksi dapat menjadi model pendidikan alternatif yang menemukan kem­bali makna pendidikan formal dan nilai praktiknya bagi semua ke­lompok sosial, bukan hanya untuk sejumlah kecil orang tertentu.[[90]](#footnote-90) Model pendidikan alternatif tersebut dimak­sudkan sebagai wujud kepedulian pesantren dalam merespon tan­tang­an zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Melalui perjalanan dan lika-liku yang panjang, wacana pe­santren makin eksis seiring dengan tuntutan untuk mampu menjawab tantangan global.[[91]](#footnote-91) Variasi tata nilai yang dinamis ini akan tumbuh dan berkembang menurut perjalanan situasi dan kondisi. Kemajuan pesantren tergantung pada kepemim­pinan kiai. Ziemek menyebut kiai sebagai sosok yang kuat ke­cakapan dan pancaran kepribadiannya sehingga menentu­kan kedudukan dan kaliber suatu pesantren,[[92]](#footnote-92) karena kiai memiliki otoritas dan wewenang yang menentukan semua aspek ke­giatan pendidikan dan kehidupan agama.

B. Pesantren Sebagai Pusat Pendidikan

Sebagai pusat pendidikan, maka sistem pembelajaran di pesantren mengandalkan pada kegiatan fisik dan non-fisik. Pada aspek fisik berupa pondok atau dikenal dengan asrama/ pondokan santri. Sedangkan unsur non-fisik berupa kuri­kulum/materi pembelajaran yaitu kitab kuning. Martin Van Bruinessen berpendapat, alasan pokok munculnya pesantren adalah untuk mentransmisikan Islam yang tradi­sio­nal seperti yang terdapat pada kitab-kitab klasik atau kitab kuning kepada santri di pondok. Di Indonesia kitab klasik merupakan khasanah keilmuan Islam yang sudah terstruktur dari aspek dok­trin agama, sehingga dalam sistem memahami sifatnya hanya memperjelas dan merumuskan kembali yang terdapat dalam kitab.[[93]](#footnote-93)

Eksistensi kitab kuning di lingkungan pesantren meru­pa­kan hal yang wajib diajarkan, bahkan kalau tanpa ada peng­ajaran kitab kuning belum dapat dikatakan pesantren. Hal yang demikian berbeda dengan kecenderungan pesantren di perkotaan yang kurang memperhatikan pengajaran kitab-kitab klasik.[[94]](#footnote-94) Keterikatan antara pesantren dan kitab kuning itu dianggap sebagai tradisi yang kaku bahkan pesantren diang­gap lembaga pendidikan yang ortodok *(*salaf*)*.[[95]](#footnote-95)

Meskipun muncul kritikan dari internal dan eksternal pesantren, serta kemajuan dan tuntutan persoalan ortodok masih banyak para tokoh mengalami perbedaan dalam mem­beri definisi tentang sebutan ortodok (baca: klasik). *Pertama,* bahwa ortodok diartikan pemegang otoritas dan pakem tradisi fikih yang ditulis ulama abad pertengahan (Imam Syafi’i). *Kedua,* ortodok diartikan memegang suatu konsep bahwa segalanya adalah otoritas al-Qur’an dan al-Hadits. *Ketiga,* to­koh barat seperti Van Ronkel 1896, Drewes 1955, meng­artikan tradisi ortodok mengikuti pendapat (dalam mazhab fikihnya mengikuti ImamSyafi’i, madzhab teologi mengikuti paham al-Asy’ari dan tasawuf/akhlak mengikuti al-Ghazali dan tanpa pengaruh lokal. Walaupun proses arus globalisasi dalam suatu bangsa terjadi, posisi kitab kuning masih tetap diperhitungkan dan sekaligus *established* di pesantren. Sebab, secara akademis, kitab kuning juga menjadi bahan rujukan dalam pengem­bangan ilmu keislaman yang dapat mendukung dalam pene­muan suatu masalah agama secara empiris.

Kitab kuning yang dipakai di lingkungan pesantren se­ba­gai kurikulum itu merupakan unsur mutlak dan di pondok pesan­tren yang non-formal (salaf). Oleh karena, itu secara umum memiliki ciri-ciri: kitab yang dipakai dan tertulis dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa *(pegon),* Sunda, dan se­bagainya. Huruf-hurufnya tidak memakai tanda baca, baik harokat, syakal, tanda seru, tanda tanya, dan seterusnya. Umum­nya kitab tersebut dicetak di atas kertas warna kuning sehingga disebut kitab kuning,[[96]](#footnote-96) atau kitab gundul (tanpa harakat).Segi historis kitab kuning kalau di negara Timur Tengahdisebut *al-kutub al-khdima* (kitab-kitab lama) sebagai tandingan dari *al-kutub al-asriyah* (kitab-kitab modern).

Kitab kuning yang dipakai dalam dunia pesantren me­li­puti ilmu fikih, tasawuf, tafsir, hadis, tauhid dan tarikh,di dukung pula oleh ilmu bahasa seperti nahwu*,* shorof, i’lal, ba­laghoh*,* sering disebut ilmu alat. Dan kitab-kitab lainnya se­bagai penunjang dalam kurikulum pesantren. Dan ulama shalaf dalam menulis kitab ternyata mempunyai klasifikasi menjadi tiga macam, *Pertama, Matan,* yaitu kitab yang berisi kaidah-kaidah dan pokok masalah. Kitab tersebut umumnya ringkas, tata letaknya ada di samping kanan atau kiri kitab sarah. Dan kitab matan kebanyakan ditulis berupa prosa *(nasyar)*. Seperti *al-Taqrib*, maupun bentuk syair (nadlam) biasa­­nya digunakan dalam kitab-kitab nahwu atau *shorof* seperti *al-Jurumiyah, Alfiyah* dan lain-lain.

*Kedua,Syarah,* yaitu kitab penjelasan dari kitab matan, letaknya di tengah halaman, berada dalam garis persegi em­pat. Kitab ini berisi penjabaran yang disertai argumentasi dan pendapat yang dikritik, dikomentari oleh ulama-ulama. Seperti syarah Ibnu Aqil atas Alfiyah*. Ketiga,Hasyiah,* yaitu kitab yang berisi uraian lebih lanjut (pendalaman), lengkap, digunakan dalam tingkatan yang lebih tinggi atas rujukan syarah dan matan sebagai perbandingan penjelasan kitab satu dan kitab lainnya yang masih relevan, contoh Hasyiah al-Khudri atas Syarah Ibnu Aqil.

Adapun jumlah kitab yang dipakai di kalangan pondok pesantren Indonesia pada tahun 1886 seperti yang dikutip oleh Steenbrink menemukan 49 judul kitab Arab yang dipakai di pesantren-pesantren besar Madura dan Jawa.[[97]](#footnote-97) Kemudian dalam *Serat Centini* versi Keraton Surakarta yang ditulis 1815-1830 mencatat 54 judul kitab[[98]](#footnote-98) yang sampai sekarang di pasaran terdapat 500 judul karya ulama tradisional Indonesia yang isinya beraneka ragam. Di samping itu, Martin men­jelas­kan bahwa pada abad ke XVI ulama-ulama Indonesia mener­je­mah­kan kitab-kitab klasik ke dalam bahasa Melayu dan Jawa, bahkan sekitar tahun 1600 teks-teks tersebut dibawa ke Eropa berisi tentang kajian akidah dan tasawuf.[[99]](#footnote-99) Lebih lanjut, Martin menggolongkan sekitar 900 judul kitab populer yang tersusun, 20% kitab fikih, 17% akidah, 12 kitab tata baha­sa Arab, 8% kumpulan hadis dan 7% tasawuf dan tarekat. Dengan de­mi­kian, telah terjadi perubahan orientasi dari kitab tasawuf ke­pada kitab fikih dan tata bahasa Arab *(*nahwu dan shorof*)*.

Kurikulum antara pesantren satu dengan pesantren lain berbeda, tetapi dalam menerapkan sistem kurikulum seca­ra esensi sama. Sebab, dalam pembagian pelajaran (*tadris*) ilmu-ilmu keagamaan di pondok yang meliputi bidang fikih, bahasa Arab, tafsir masih memakai dari tingkat ke tingkat, misal­nya kitab *mabsutat* (kitab kecil dan ringkas), kitab *mutawasitat* (kitab sedang) dan tarap belajar memahami makna dan maksud, kitab *muthawalat* sistem belajar mengarah pema­haman pikiran muj­tahid dan proses pemikirannya.[[100]](#footnote-100)

Kurikulum pesantren sebagai pusat pendidikan di pe­san­tren salaf mempunyai kecenderungan khusus mem­pe­la­jari kitab-kitab klasik meliputi tafsir, fikih dan hadits tanpa dibarengi *analitis-kontruktif* tetapi bersifat tekstualis. Sedangkan pesantren modern sudah mengedepankan *analitis-kontruktif* dalam mempelajari kitab-kitab klasik dan bersifat konteks­tua­lis. Di samping itu, kurikulum di pesantren biasa­nya tidak ada pembakuan yang pasti dalam sistem belajar-meng­ajar. Yang terpenting berorientasi pada pemahaman kitab-kitab klasik ke­pada santri.

Kurikulum pesantren yang menyelenggarakan pen­di­dikan formal seperti madrasah kurikulumnya beberapa persen mengikuti kebijakan Departemen Agama dan Departeman Pen­didikan bagi sekolah SMP dan SMA, SMK sebagai sekolah pondok pesantren. Maka, di dalam kelembagaan pondok pe­san­tren apabila ada sistem pendidikan formal dan non-formal akhirnya terjadi simbiosis mutualisme adanya sistem pen­di­dikan nasional dan pendidikan pesantren.[[101]](#footnote-101) Tetapi ada pesan­tren yang membuat kurikulum sesuai dengan selera dan ke­ya­kinannya contoh Pondok Pesantren Modern Gontor.[[102]](#footnote-102)

Dalam sistem pendidikan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi lebih dari itu lembaga pen­didikan pesantren dapat berfungsi sebagai lembaga sosial ke­agamaan dan penyiaran agama Islam. Dengan fungsi ter­se­but, maka pendidikan pesantren sebagai lembaga pen­di­dikan non-formal yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat dan bersumber dari hasil pemikiran para ulama salaf yang mengkaji kitab fikih, tafsir, hadits, tauhid dan tasa­wuf yang hidup antara abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi.[[103]](#footnote-103)

Pesantren sebagai lembaga sosial menampung anak didik dari segala lapisan masyarakat muslim, yang tanpa membeda-bedakan tingkat sosial-ekonomi orang tuanya.[[104]](#footnote-104) Sehingga pe­san­tren memiliki integritas yang tinggi dengan masyarakat se­ki­tar­nya, serta menjadi rujukan moral bagi kehidupan ma­sya­rakat umum. Peran pesantren yang demikian itulah, maka ma­sya­rakat umum memandang lembaga pesantren sebagai ko­mu­nitas khusus yang ideal, terutama dalam bidang kehidupan moral keagamaan sekaligus sebagai tempat mencari ilmu *(al-talabu al-ilmu)* dan mengabdi.

Posisi pesantren dalam lingkungan masyarakat menjadi sangat strategis, sehingga lembaga pendidikan pesantren men­da­pat julukan sebagai pusat pendidikan Islam. Hal ini me­rupakan suatu hal yang wajar, karena: P*ertama,* pesantren se­ba­gai pusat pengembangan dan pendalaman ilmu-ilmu ke­islaman yang merujuk pada kitab-kitab klasik. *Kedua*, seba­gai penjaga kemurnian ilmu Islam yang dibawa oleh Rasulullah. *Ketiga,* sistem pendidikan agama dalam pesantren sebagai nilai yang mampu memberikan kontribusi moral ter­ha­dap ma­sya­ra­kat.[[105]](#footnote-105) Berarti corak pendidikan pesantren dalam aplikasi pe­mi­kiran mampu membuat struktur pemi­kir­an yang mengarah pada kontektualisasi dari ajaran agama yang secara empirik dalam suatu kasus masyarakat justru da­pat dikaji melalui khazanah kitab klasik dengan cara dekon­teks­tualisasi.

Upaya ini dapat dilakukan oleh santri dan kiai (pengasuh) dengan berangkat dari nilai kebenaran Tuhan sebagai nilai dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, meliputi hukum, eko­nomi, dan politik. Oleh sebab itu, pesantren sebagai pusat pen­didikan dalam menghadapi tantangan modernitas hen­dak­nya melakukan rekontruksi terhadap kurikulum pen­didikan­nya, misi dan visi, manajemen, dan corak kepemimpinan dengan tetap tidak kehilangan jati diri pesan­tren sebagai ciri khas pendidikannya.[]

BAB III

TANTANGAN MODERNISASI PESANTREN

A. Pengaruh Modernisasi terhadap Pesantren

D

alam sudut pandang tradisi, pesantren merup­akan salah satu simbol budaya pendidikan asli Indonesia (Nusantara). Secara historis, sistem pendidikan yang dikembangkan di pesantren memang berakar pada transisi pen­didikan ke­agamaan semasa agama Hindu dan Budha ber­kem­bang di Indonesia.[[106]](#footnote-106) Islamisasi yang berlangsung sangat in­tensif di Nusantara sejak awal abad XIII telah mentrans­for­masikan budaya pendidikan tersebut menjadi bentuk pondok pesantren. Mulai dari sini, Islamisasi Nusantara memberikan muatan pemaknaan baru dari versi Islam terhadap sistem pen­di­dikan keagamaan Hindu dan Budha tersebut.

Modernisasi merupakan simbol kemajuan suatu per­adaban di era globalisasi yang memiliki karakteristik tersen­diri. Modernisasi dapat mempengaruhi sendi kehidupan manusia yang terkecil sampai yang terbesar, baik dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Lebih dari itu, modernisasi setelah berubah menjadi modernisme me­­rupakan fase sejarah dunia yang paling akhir yang ditandai dengan kepercayaan terhadap sains, perencanaan, sekularis­me, dan kemajuan.[[107]](#footnote-107) Karena sebelum ada langkah modernisasi, sistem pesantren tradisional memang menunjukkan ciri khas sebagai sebuah pusat pendidikan ilmu-ilmu keagamaan di mana terdapat di dalamnya paling sedikit empat unsur utama, yakni; pondok, masjid, santri dan kiai. Keempat unsur tersebut merupakan struktur dasar kelembagaan seluruh pesantren tra­disional yang ada di Indonesia.

Modernisasi dalam pendidikan berarti suatu proses pe­ning­katan partisipasi pendidikan oleh kelompok-kelompok sosial dari seluruh masyarakat melalui perkembangan institusi baru dan kelompok interes dalam rangka partisipasi masya­ra­kat. A. Qodri Azizy mengutip pendapat Robert N. Bellah, men­je­laskan bahwa modernisasi dianggap sebagai fenomena spi­ri­tual atau sesuatu mentalitas, tidak selalu ber­konotasi pada po­litik dan ekonomi.[[108]](#footnote-108) Modernisasi itu pada prinsip­nya mene­kan­kan pada *organizing* (pengorganisasian), *doing* (tindakan), yang juga memperlihatkan pada pendekatan sosiologis dan psi­kologis.

Dampak modernisasi terhadap pesantren, sangat berbeda dengan modernisasi yang terjadi dalam bidang politik dan eko­nomi. Sebab, pesantren sebagai institusi pendidikan juga sebagai kekuatan pendidikan sosial keagamaan yang mem­pu­nyai corak dan karakteristik tersendiri. Modernisasi sistem pen­­­­didikan di Indonesia dipengaruhi oleh alumni Timur Tengah yang mengadopsi pemikiran Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh dengan sistem pendidikan Barat, se­per­ti HIS, MULO, dan AMS pada zaman Belanda.[[109]](#footnote-109) Dengan demikian, modernisasi pendidikan di pesantren tidak serta mer­­­ta mengadopsi pemikiran Barat yang sekuler, tetapi etika tata nilai Islam tetap menjadi pertimbangan yang sangat pen­ting.

Modernisasi yang diperkenalkan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia bermula dari perluasan kesempatan bagi pribumi dalam paruh abad ke-19 untuk mendapatkan pen­didikan yang diselenggarakan oleh kolonial Belanda bernama *volkschoolen*, sekolah rakyat, atau sekolah desa (nagari) dengan masa belajar selama 3 tahun. Di samping itu beberapa lembaga pendidikan Islam mulai memasukkan pelajaran umum sebagai ciri khas pendidikan Barat yang dikembangkan oleh kolonial Belanda, antara lain surau di Minangkabau waktu itu di­jadi­kan sekolah nagari model Belanda.

Kemudian yang lebih merangsang pesantren untuk mem­berikan respon modernisasi justru datang dari kaum re­formis atau modernis muslim. Di mana awal abad 20 justru untuk menjawab tantangan kolonialisme dan Kristen diper­lukan re­for­masi sistem pendidikan Islam. Dalam konteks ini­lah akhir­nya muncul dua bentuk kelembagaan pendidikan modern Islam; *pertama,* sekolah-sekolah umum model Belanda tetapi diberi muatan pengajaran Islam; *kedua,* madrasah-mad­rasah modern, yang secara terbatas mengadopsi subtansi dan me­to­do­logi pendidikan modern.[[110]](#footnote-110)

Maka wujud nyata implikasi dari modernisasi terhadap pesantren adalah memasukkan pengajaran umum atau model pendidikan sekolah Barat dalam sistem pendidikan pesantren. Model pendidikan yang demikianhampir terjadi di pesantren-pesantren Indonesia, di mana komunitas pesantren menolak paham modernis dan asumsi keagamaan kaum reformis, tetapi unsur pendidikan modern tetap diadopsi. Misalnya, sistem pen­didikan komunitas pesantren akhirnya menerapkan sistem klasikal dan penjenjangan yang asalnya unsur dari sistem pen­didikan kaum modern. Sehingga pesantren dalam batas ter­tentu melakukan sejumlah akomodasi dan “penyesuaian” yang dianggap mereka akan mendukung kontinuitas pesan­tren itu sendiri.[[111]](#footnote-111)

Dekade 1950-an dan awal 1960-an, dalam masa kesulitan ekonomi, modernisasi komunitas pesantren banyak berkenaan dengan memberikan ketrampilan dalam bidang pertanian, dengan alasan untuk *self supporting* dan *self financing* selanjut­nya digunakan untuk membiayai pesantren. Bahkan di pesan­tren-pesantren besar, seperti Gontor, Tebuireng, Denanyar, Tambakberas, dan Tegalrejo mendirikan dan me­ngem­­­­bangkan koperasi, yang bertujuan memberi bekal santri setelah kembali ke masyarakat.[[112]](#footnote-112) Dengan cara demikian, im­pli­kasi modernisasi ter­­hadap pesantren semakin mene­mu­kan mo­men­­tumnya, maka persaingan pesantren dengan sistem ke­lem­­bagaan mad­rasah modern pada tahun 1950-an banyak madrasah swasta yang dinegerikan oleh Departemen Agama sebagai langkah pembaruan madrasah di lingkungan pondok pesantren.

Di samping itu, pesantren mendirikan madrasah di dalam kompleks pesantren masing-masing. Dengan cara ini, pesan­tren tetap berfungsi sebagai pesantren dalam pengertian asli­nya, yakni tempat pendidikan dan pengajaran bagi para santri (mukim) yang ingin memperoleh pengetahuan Islam secara mendalam; dan sekaligus merupakan madrasah bagi anak-anak di lingkungan pesantren. Boleh jadi, sebagian murid-murid madrasah ini juga menjadi santri mukim di pesantren yang bersangkutan. Tetapi, setidaknya dengan terdaftar se­ba­gai murid madrasah, mereka kemudian mendapat pengakuan dari Departemen Agama, dan memiliki akses lebih besar tidak hanya dalam melanjutkan pendidikan, tetapi juga dalam lapangan kerja. Dalam perkembangan selanjutnya, tidak jarang ditemukan pesantren yang memiliki lebih banyak murid mad­rasah daripada santri yang betul-betul melakukan *tafaqquh fi al-din.*

Pengaruh modernisasi juga menimbulkan kecenderungan kuat pesantren dalam organisasi dan kelembagaan, khususnya pada aspek kepemimpinan dan manajemen, tidak lagi dipe­gang oleh satu atau dua orang kiai, tetapi semenjak ada mad­rasah dan sekolah umum, kepemimpinan tunggal kiai tidak memadai lagi, yang ada adalah kepemimpian kolektif.[[113]](#footnote-113) Dengan diketahui asal-usul pengaruh modernisasi sejak zaman kolo­nial Belanda, kaum reformis pendidikan Islam, hingga ke­kua­saan orde baru, dampak modernisasi pesantren dari masing-masing masa mengalami penyempurnaan sesuai dengan ke­bu­tuhan organisasi dan kelembagaan komunitas pesantren.

Tranformasi kelembagaan pondok pesantren ini meng­indikasikan terjadinya keberlangsungan dan perubahan di dalam pondok pesantren. Dalam konteks ini, pesantren di samping mampu terus menjaga eksistensinya, juga sekaligus bisa mengimbangi dan menjawab perubahan dan tuntutan aki­bat modernisasi. Agar tradisi pesantren dapat menunjuk­kan bahwa tradisi pesantren memiliki kelenturan budaya yang me­mungkinkannya bisa tetap hidup dan berkembang di tengah ma­syarakat. Dengan alasan terpenting bahwa trans­formasi tidak menggeser ciri khas dan sekaligus kekuatannya sebagai lembaga pendidikan Islam.

B. Peluang dan Tantangan Pesantren di Era Modern

Dilema pesantren dalam era modern sekarang ini berakar dari pandangan bahwa teknologi dan organisasi dalam ma­sya­ra­kat akan menjadi faktor utama dari perubahan sosial, ter­masuk dalam dunia pendidikan. Sebaliknya, kemajuan bidang pendidikan dalam semua aspek dengan sendirinya menjadi pe­nentu perkembangan politik, ekonomi, dan pendidikan. Sebab, masyarakat akan berubah secara dinamis yang diarah­kan pada perencanaan sosial yang matang. Boyer yang dikutip oleh Soekamto menjelaskan:

*The tail usually wags the dog; and we do what is teknologically possible, whether or not is humanly desireble. A society without control over change is a society with its future out of control.[[114]](#footnote-114)*

Sejalan dengan hal itu, pendidikan yang berpeluang baik di masa mendatang adalah model pendidikan yang mampu mengaitkan pengetahuan dan perubahan sosial sedemikian rupa sehingga anak didik yang dihasilkannya mampu ikut ser­ta merencanakan dan mengembangkan masa depan. Ini meru­pa­kan jalan keluar terbaik dari problem yang dihadapi se­karang, yang salah satu penyebabnya adalah menyempitnya arti relevansi yang hanya dikaitkan dengan pasaran kerja modern dan menyesuaikan dengan kehendak sejarah.Per­nya­ta­an terebut lebih tegas diungkapkan oleh Utami Munandar, bahwa pendidikan menuntut tingkat kemampuan kreatif yang lebih tinggi dari para pendidik agar dapat memenuhi tuntutan dari kebutuhan peserta didik,[[115]](#footnote-115) yaitu tuntutan terhadap ter­wu­jud­nya kebutuhan lapangan kerja. Dengan demikian, model pendidikan yang baik di masa mendatang adalah lembaga pen­­didikan yang dapat menyiapkan lulusannya menjadi te­naga terampil dan siap berkompetisi dalam dunia kerja.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan, setidaknya pesan­tren modern telah memenuhi harapan dan memiliki peluang dimasa mendatang, sebab model pendidikannya telah disiap­kan menjadi tenaga kerja yang siap berkompetisi di ma­sya­ra­kat, yaitu dengan pemberian materi pendidikan umum, ke­te­ram­pilan kerja, dan pembinaan moral yang sangat diper­lu­kan dalam dunia kerja. Hamzah Ya’qub menjelaskan bahwa sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, tidak sedikit manusia yang cerdas akalnya tetapi tidak ber­akhlak.[[116]](#footnote-116) Sehingga dalam era modern seperti ini dibutuhkan te­naga ahli dan terampil yang jujur dan amanah, sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang baik dan optimal. Dengan demikian, munculnya tenaga terampil dari lulusan pesantren modern dan sekaligus memiliki wawasan agama yang luas, akan dapat membantu para pengusaha dalam menyediakan te­naga kerja yang ahli dan terpercaya, serta meningkatkan pro­duktivitas usahanya.

Hubungannya dengan perencanaan pendidikan menuju dinamika pendidikan yang lebih baik merupakan otoritas para cendekiawan dan intelektual. Sebab, refleksi kritis mengenai peran pendidikan sebagai upaya perubahan sosial sangat erat dengan konsep objektivitas di dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, semua pengetahuan memiliki sumber eksistensial masing-masing di dalam konteks struktural mereka meru­mus­kannya, dan pendidikan pada dasarnya senantiasa memainkan peran sebagai“juru bicara” dari kelompok sosial atau kelas sosial yang kepentingan-kepentingan mereka artikulasikan.[[117]](#footnote-117)

Di antara kelemahan manajemen pesantren adalah pim­pinan pesantren yang lebih memilih mengubah pesan­tren­nya menjadi institusi seperti sekolah tanpa fasilitas atau penge­ta­huan yang cukup yang akhirnya menjadikan pesan­trennya tanpa bentuk.[[118]](#footnote-118) Sehingga independensi pesantren dalam mem­berikan tanggapan konstruktif terhadap tantangan dari luar relatif lemah, seperti pengenalan sekolah Barat yang meru­pa­kan sebuah otonomi dan memberikan keluwesan bagi pe­san­tren dalam mempelopori konsep pendidikan baru yang secara kultural sebagai peranan komplementer dengan kesa­daran ideo­­logis untuk menyediakan dasar yang kuat bagi trans­for­masi fundamental.

Dengan demikian, pesantren memiliki dimensi dinamis yang bisa dikembangkan untuk menjaga eksistensi dan kon­ti­nuitas kehidupan pesantren dan sekaligus pesantren dapat meng­hadirkan sebuah alternatif model partisipasi bah­kan ke­peloporan kiai dalam konteks pembangunan bangsa sangat penting dalam mengubah paradigma pendidikan di pe­san­tren.[[119]](#footnote-119) Dengan menerapkan sistem pembelajaran dan kuri­ku­lum pendidikan yang baik, pengasuh pesantren dapat meren­ca­na­kan dan menentukan tahapan program dan pe­ngem­bangan lembaganya.

Untuk membangun pendidikan dalam menghadapi per­ubahan sosial, usaha-usaha operasional dan strategis harus di­ker­jakan oleh para pemikir muslim, meskipun ini meru­pa­kan pekerjaan berat. Hal ini akan meliputi strategi peren­ca­naan pen­didikan, beserta lembaganya, sampai pada pelatihan-pelatihan jangka pendek untuk mempersiapkan SDM yang ber­­kualitas termasuk pengembangan ilmu dan teknologi se­cara serius, sehingga siap menghadapi era globalisasi di semua jajaran dan tingkatan masyarakat.

Pendidikan yang merupakan salah satu bentuk ter­wu­jud­nya *human capital* harus didesain sedemikian rupa sekiranya mampu mencetak SDM yang tetap kukuh keimanan dan ke­tak­waannya. Realitas negatif umat Islam, seperti kebodohan, kemalasan, kepasrahan negatif, sikap rendah diri *(inferior)*, ke­mis­kinan, keterbelakangan, bahkan juga ketertindasan oleh bangsa lain dan semacamnya harus diubah dan diciptakan untuk menjadi sebaliknya. Pendidikan umat Islam sejak dini, termasuk majelis ta’lim dan pengajian di mushala atau masjid dan pesantren, hendaknya mencakup materi kurikulum untuk pembentukan karakter penyiapan SDM yang berkualitas dan maju untuk kemenangan dalam berkompetisi global.[[120]](#footnote-120)

Perubahan yang disebabkan karena penyesuaian diri dan terjadi secara penuh kesadaran itu disebut *social change, cultural change, socio-cultural adaptation,* atau *adjustment*.[[121]](#footnote-121) Untuk itu, tantangan yang dihadapi pesantren harus dimaknai sebagai peluangnya dalam merespon era modern. Pesantren dengan tradisi dan nilai-nilai yang dimiliki akan mampu menjadi so­lusi alternatif bagi problem pendidikan di dunia modern. Hal ini menuntut adanya peningkatan kualitas dan perbaikan mana­­jemennya. Sehingga peran besar lembaga keislaman ini harus bisa mengimbangi dan memberikan arah arus atau pro­ses modernisasi yang cenderung hanya menekankan aspek lahiriah dan mengesampingkan aspek batiniah sehingga yang terjadi adalah runtuhnya nilai-nilai moral.

Mempersoalkan peluang dan tantangan erat sekali dengan strategi dan solusi, secara kebetulan pendidikan meru­pakan sub-sistem dalam keseluruhan satuan budaya. Pesan­tren dan pendidikan dapat dipandang sebagai refleksi ke­hi­dupan intelektual dan kultural umat Islam dalam misi sejarah dan sistem yang disandangnya. Bertolak dari pemi­kiran stra­te­gi semacam ini, maka pembaruan sistem pendidikan di pesan­tren merupakan keharusan, guna menciptakan peluang pen­didikan dan sekaligus menghadapi tantangan modernitas bagi pesantren di masa mendatang.

Sebagai salah satu institusi pendidikan Islam, sudah ba­rang tentu pesantren yang mengemban misi penyebaran ajaran Islam mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat. Pesantren kemudian tidak lagi ber­peran sebagai institusi tradisional yang terbatas geraknya di dalam lingkungan pesantren saja, akan tetapi lebih luas lagi. Bisa dikatakan bahwa peluang pesantren adalah sebagai ujung tombak sekaligus yang bertanggung jawab atas penyebaran Islam di seluruh Indonesia.[[122]](#footnote-122)

Dalam konteks pendidikan modern bentuk peluang dan tantangan yang diciptakan dan dihadapi oleh pesantren adalah langkah penyempurnaan dari bentuk sistem pesantren tradi­sional dengan transformasi dari sistem organisasi dan kelem­bagaan. Salah satu yang membuat peluang sangat baik bagi komunitas pesantren dalam mengadapi tranformasi era mo­dern adalah “sistem nilai” yang dimiliki oleh pesantren itu sendiri berbeda dengan masyarakat luas. Sistem nilai yang berbeda dan unik tersebut oleh Abdurrahman Wahid[[123]](#footnote-123) belum memiliki dasar-dasar ilmiah yang kuat, namun gagasan ter­se­but tetap memiliki arti penting setidaknya dalam upaya me­lacak dan mengkaji keunikan pesantren yang sangat me­non­jol walaupun harus diakui pada saat ini sudah terdapat banyak perubahan yang terjadi di lingkungan pesantren.

Menurut Abdurrahman Wahid, untuk bisa disebut sub­kultur setidaknya terdapat beberapa aspek dalam dunia pesan­tren yang dapat merepresentasikan pernyataan subkul­tural ter­sebut, antara lain: *pertama,* eksistensi pesantren sebagai lembaga kehidupan yang menyimpang dari kehidupan umum di negeri ini; *kedua,* terdapatnya sejumlah penunjang yang men­jadi tulang punggung kehidupan pesantren; *ketiga,* ber­lang­sungnya proses pembentukan tata nilai yang tersendiri dalam pesantren, lengkap dengan simbol-simbolnya; *keempat,* adanya daya tarik ke luar, sehingga memungkinkan masya­ra­kat sekitar menganggap pesantren sebagai alternatif ideal bagi sikap hidup yang ada di dalam masyarakat itu sendiri; *kelima,* berkembangnya suatu proses saling mempengaruhi dengan ma­­syarakat di luarnya yang akan berkulminasi pada pem­bentukan nilai-nilai baru yang secara universal dapat diterima kedua belah pihak.[[124]](#footnote-124)

Pesantren dengan kemandiriannya memiliki masa depan yang sangat strategis dalam pengembangan pendidikan Islam yang modern dengan tetap mempertahankan ciri khas tra­di­sio­nal­nya. Dhofier menjelaskan bahwa masa depan pesantren terletak pada khas pendidikan swasta yang memiliki otoritas dalam pengelolaan pendidikan, perencanaan kurikulum, bah­kan pada sistem pendidikannya.[[125]](#footnote-125) Bahkan secara tegas Dhofir menjelaskan bahwa beberapa perguruan tinggi terkenal di Amerika dan Australia, seperti Universitas Harvard dan Cambridge, adalah lembaga pendidikan swasta yang dahulu ber­asal dari lembaga pendidikan agama (seminari). Demikian halnya pesantren di Indonesia yang merupakan lembaga pen­didikan agama (Islam) memiliki peluang menjadi lembaga pen­­didikan yang maju dengan cara mengadopsi sistem pen­di­dikan umum, seperti membuka pendidikan umum bahkan per­guruan tinggi yang ada jurusan ekonomi, politik, bahkan kedokteran.

Dalam era modernisasi dan kemajuan teknologi saat ini, di samping peluang berkembangnya pesantren di masa men­datang semakin terbuka, tetapi terdapat tantangan baru bagi pendidikan pesantren di masa mendatang, yaitu pergeseran peran kiai, pergeseran tujuan belajar santri, dan melemahnya budaya santri.[[126]](#footnote-126)Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pesantren mempunyai peluang sekaligus tantangan. Di antara peluang pesantren adalah: 1) pesantren dengan kemandirian­nya dapat merencanakan sendiri kuruikulum yang sesuai dengan tuntutan zaman, 2) pemerintah memberikan kesem­patan yang cukup luas dan memungkinkan berkembangnya pendidikan pesantren, 3) kebutuhan masyarakat terhadap pem­binaan agama, sebagai akibat dari krisis yang dialami bangsa Indonesia, akan memberikan peluang kepada alumni pe­santren untuk berperan lebih aktif dalam masyarakat.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi oleh pesantren dalam era modern antara lain: 1) perkembangan ilmu penge­ta­huan, teknologi, dan komunikasi yang sangat cepat, sehingga pimpinan pesantren dituntut untuk selalu menye­suaikan diri, 2) ciri utama dunia modern adalah gaya dan pola hidup ma­te­ria­listik, kritis, dan terbuka, merupakan tantangan dunia pe­san­tren yang (langsung atau tidak langsung, sedikit atau banyak) dapat mempengaruhi pola hidup santri, bahkan meng­ancam eksistensi pesantren, 3) sebagai salah satu lem­baga pendidikan Islam yang modern, tradisi keilmuan barat yang bersifat sekuler dan sumber keilmuan yang sangat ter­buka luas menjadi ancaman pesantren, terutama dalam tradisi pemikiran pesantren menjadi liberal dan berkembangnya bu­daya santri yang rasional.[]

BAB IV

PESANTREN DARUL ULUM SEBAGAI POTRET DINAMIKA SISTEM PENDIDIKAN ISLAM MODERN

P

esantren Darul Ulum termasuk kategori pesantren yang cukup tua di Indonesia. Meski tanggal dan bulan ber­dirinya pesantren yang sejak awal lekat dengan nuansa tasawuf ini belum diketahui secara persis, namun berdasarkan catatan dokumentasi, Pesantren Darul Ulum didirikan pada tahun 1885.[[127]](#footnote-127) Pada awalnya, Pesantren Darul Ulum lebih di­kenal dengan Pesantren Rejoso. Bahkan, para peneliti pesan­tren nampaknya lebih suka menggunakan istilah Pesantren Rejoso daripada Pesantren Darul Ulum. Hal ini wajar karena memang pesantren yang semula hanya me­rupakan surau kecil yang berfungsi untuk kegiatan pengajian al-Qur’an itu terletak di desa Rejoso, kira-kira 6 km arah timur kota Jombang. Lagi pula, menurut sejarahnya, pemberian nama Pesantren Darul Ulum itu sendiri baru dilakukan oleh generasi terakhir di pe­riode pertama yang mengadopsi nama Madrasah Darul Ulum di Makkah.[[128]](#footnote-128)

Keberadaan Pesantren Darul Ulum tidak bisa lepas dari peranan seorang tokoh muda kharismatik asal Bangkalan Madura yang bernama Kiai Tamim Irsyad (wafat 1326 H).[[129]](#footnote-129) Beliaulah pendiri utama Pesantren Rejoso yang kemudian di­kenal luas dengan nama Darul Ulum. Konon, Kiai Tamim Irsyad adalah santri Kiai Kholil Bangkalan pada saat beliau masih tinggal di Madura. Beberapa saat kemudian, Kiai Tamim Irsyad memutuskan untuk mengembara ke Jawa. Se­lama pengembaraannya itu, ternyata Kiai Tamim juga men­dalami ilmu al-Qur’an dan ilmu *kanuragan* yang dinilai sangat penting untuk melakukan misi dakwah Islam di masyarakat.

Kiai Tamim Irsyad juga pernah berguru kepada K.H. Hasyim Asy’ari, tokoh kharismatik dan salah satu pendiri or­ganisasi Nahdlatul Ulama. Bahkan, menurut Kiai B, ber­dirinya Pesantren Darul Ulum sesungguhnya tidak bisa lepas dari izin atau *ijazah* dari ulama besar K.H. Hasyim Asy'ari (wafat 1947 M) dari Tebuireng.[[130]](#footnote-130) Hal ini dapat dipahami karena dalam tra­disi pesantren, seorang kiai mempunyai otoritas yang sangat dominan terhadap para santrinya, sehingga kiai sering dijuluki sebagai “raja kecil” dalam pesantren.[[131]](#footnote-131) Selain itu, konsep *barokah* juga menjadi salah satu tradisi pesantren yang sangat kental, sehingga seorang santri tidak berani melangkah lebih jauh seperti mendirikan pesantren kecuali atas izin atau *ijazah* dari sang kiai.[[132]](#footnote-132)

Berdirinya Pesantren Darul Ulum tidak bisa dilepaskan dari misi agama, yaitu sebagai agen penyebaran agama Islam. Karena itu, cikal bakal Pesantren Darul Ulum dapat dirunut dari keberadaan sebuah surau kecil yang digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu keagamaan terutama pengajian al-Qur’an oleh Kiai Tamim.[[133]](#footnote-133) Hal ini sejalan dengan kecen­de­rung­an umum cikal bakal berdirinya pesantren yang biasanya ber­mula dari sebuah kegiatan pengajian di langgar atau surau. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan masjid, langgar, atau surau merupakan bentuk pesantren yang paling awal dan sederhana, bahkan merupakan institusi pendidikan Islam yang paling awal. Karenanya, masjid, langgar, dan surau merupakan elemen penting dalam sebuah pesantren.

Berdirinya Pesantren Darul Ulum secara khusus juga ter­kait dengan *setting* sosial masyarakat Rejoso yang dikenal luas sebagai daerah hitam yang paling rawan.[[134]](#footnote-134) Kondisi demikian yang diantaranya menginspirasi Kiai Tamim Irsyad untuk ber­usaha (berjihad) menegakkan ajaran Islam kepada ma­sya­ra­kat Rejoso pada khususnya dengan cara mengubah perilaku ma­sya­rakat yang jauh dari nilai-nilai Islam menuju masyarakat yang senantiasa mengamalkan syariat Islam yang benar.

Pesantren Darul Ulum seperti dijelaskan di atas, pada mulanya lebih dikenal sebagai pesantren tasawuf. Tipologi pe­santren tasawuf itu sebenarnya bukanlah hal yang terlalu unik bagi dunia pesantren. Dalam sejarahnya, pesantren dan tasa­wuf sesungguhnya mempunyai hubungan yang erat. Bahkan, nuansa dan aroma tasawuf termasuk tarekat sangat melekat dalam dunia pesantren, terutama dalam pesantren-pesantren tua. Diakui atau tidak, aroma tasawuf itu sampai sekarang pun sulit dihilangkan. Ini terbukti dengan banyak dijadikannya pesantren sebagai pusat kegiatan tarekat, seperti yang terjadi di Pesantren Darul Ulum. Sampai sekarang, Pesantren Darul Ulum Jombang masih dikenal luas sebagai sebuah pusat Tarekat Qodiriyah wan Naqsabandiyah.

Dalam konteks Pesantren Darul Ulum, predikat “Pesantren Tasawuf” sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sosok Kiai Tamim Irsyad yang merupakan pendiri utama Pesantren Darul Ulum yang memang dikenal bukan saja sebagai seorang *'alim* yang mempunyai kepakaran dalam bidang ilmu agama (baca: fikih), tetapi juga sebagai sosok yang takuti (baca: sakti) masyarakat karena mempunyai ilmu *kanuragan* dan ilmu-ilmu hikmah yang sangat berguna dalam mem­bantu penyiaran agama Islam di wilayah Rejoso yang ko­non termasuk daerah basis kejahatan.[[135]](#footnote-135) Karena pendirinya adalah seorang yang ahli tasawuf dan tarekat, maka wajar jika pesantren yang dipimpinnya juga sedikit banyak terpengaruh dengan latar belakang keilmuan pendirinya tersebut. Sampai sekarang pun ciri khas sebagai “Pesantren Tasawuf” nam­pak­nya belum sepenuhnya hilang, bahkan cenderung masih di­per­tahankan, meski pesantren tersebut sudah demikian res­pon­sif dalam berpacu dengan modernitas.

Di bawah kepemimpinan seorang ulama besar dan ino­va­tor pendidikan Kiai Musta’in Romly (wafat 1985 M) sejak 1960-an, justru Pesantren Darul Ulum semakin memperkuat visi-misi pesantrennya dengan mengembangkan sebuah kon­sep pen­didikan pesantren yang kemudian dinamakan “Trisula,” meliputi Pesantren, Tarekat, dan Sekolah Umum,[[136]](#footnote-136) kini Pesantren Darul Ulum berkembang cukup pesat dan meru­­pakan salah satu pesantren modern terbesar di Jombang.[[137]](#footnote-137)

Pesantren Darul Ulum tidak saja mengajarkan al-Qur'an dan tasawuf seperti yang dirintis oleh Kiai Tamim Irsyad, te­ta­pi pesantren itu juga senantiasa melakukan beberapa program pembaruan seiring dengan semakin gencarnya per­ubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Munculnya konsep “Trisula” merupakan langkah dan strategi yang sangat tepat dalam menghadapi tuntutan zaman yang modern dengan tidak me­ning­galkan visi-misi utama pesantren sebagai lem­baga *tafaqquh fi al-din*. Inilah sebenarnya keunikan[[138]](#footnote-138) Pesantren Darul Ulum dalam merespon tantangan modern diban­dingkan dengan pesantren-pesantren lainnya.

A. Dinamika Kepemimpinan Pesantren Darul Ulum

1. Fase Cikal Bakal (1885-1937)

Kepemimpinan pada Pesantren Darul Ulum hampir tidak berbeda dengan kepemimpinan pesantren lain di Indonesia pada umumnya, yaitu kepemimpinan yang mengandalkan oto­ritas kiai. Karenanya, posisi dan kedudukan kiai dalam pe­san­tren tersebut sangat besar.[[139]](#footnote-139) Proses pergantian kepemim­pian didasarkan atas pewarisan keluarga (baca: kematian kiai), tidak adanya peningkatan kualitas kepemim­pinan yang ber­sifat demokratis.[[140]](#footnote-140)

Pesantren Darul Ulum dilacak dari aspek kesejarahannya merupakan buah perjuangan rintisan seorang kiai kharismatik bernama Kiai Tamim Irsyad. Dalam perkembangan selanjut­nya, Kiai Tamim dibantu oleh salah seorang menantunya yang juga bekas santrinya yang bernama Kiai Kholil (wafat 1937 M) dari Demak.[[141]](#footnote-141)

Kiai Kholil adalah nama lain dari Muhammad Djuremi sepulang dari berhaji. Kedatangan Muhammad Djuremi ke Jawa Timur awalnya adalah mengikuti ayahnya tinggal di Pare (sekitar 30 km dari Jombang). Karena tertarik dengan *karamah* dan keluasan ilmu yang dimiliki oleh Kiai Tamim Irsyad yang memang sudah dikenal khalayak saat itu, Kiai Kholil kemudian menjadi santri dekat Kiai Tamim. Bahkan, Kiai Kholil juga diberi kepercayaan untuk membantu mengajar di Pesantren Kiai Tamim. Barangkali karena kedekatannya itulah kemudian Kiai Kholil dijadikan menantu oleh Kiai Tamim Irsyad.[[142]](#footnote-142)

Dengan demikian, rintisan pendidikan Islam sebagai cikal bakal berdirinya Pesantren Darul Ulum sesungguhnya bisa dirunut dari sepak terjang duet Kiai Tamim Irsyad dan Kiai Kholil. Duet kiai karismatik itu dianggap sebagai figur yang cakap dan dapat diandalkan dalam menegakkan cita-cita Islam yang luhur, terutama di masyarakat sekitar. Keduanya tidak hanya berbekal ilmu keagamaan yang kuat sebagai modal dasar mendirikan pesantren, tetapi beliau juga memiliki keahlian lain seperti ilmu *kanuragan* yang cukup hebat sebagai sarana pendukung melakukan dakwah melawan kemung­karan. Dengan berbekal dua keahlian itu, duet ulama tersebut berhasil mulai merintis cikal bakal Pesantren Darul Ulum Jombang yang mempunyai misi utama menyebar­luas­kan ajaran Islam seraya memberantas praktik-praktik kemaksiatan dalam masyarakat.

Pada fase ini, sistem pendidikan dan pengajaran masih menggunakan pola yang sangat sederhana. Hal ini bisa dilihat dari proses transmisi ilmu pengetahuan oleh kedua kiai karis­matik tersebut yang masih dilakukan di dua surau utama[[143]](#footnote-143) dengan menggunakan metode ceramah, sorogan, dan ban­dong­an sebagai ciri khas pesantren. Surau pertama dipakai oleh oleh Kiai Tamim Irsyad untuk memberikan pengajian al-Qur’an dan fikih. Sedangkan Kiai Kholil menempati surau ke­dua untuk menyampaikan materi ilmu tasawuf yang di­mani­festasikan dalam bentuk pengamalan Tarekat Qadi­ri­yah wa Naqsyabandiyah.[[144]](#footnote-144) Dari sini kita dapat melihat bahwa dis­tribusi kepemimpinan sesungguhnya sudah terjadi sejak awal berdirinya Pesantren Darul Ulum.

Berkat keuletan dan ketangguhan duet Kiai Tamim Irsyad dan Kiai Kholil, pesantren itu semakin berkibar. Jumlah san­tri­nya semakin meningkat.

Seiring dengan kecenderungan tersebut, untuk membantu kegiatan pengajian, terutama bidang ilmu tafsir dan ilmu alat, maka sekitar akhir abad ke-19 didatangkanlah Kiai Syafawi (wafat 1904 M), yaitu adik Kiai Kholil dari Demak.[[145]](#footnote-145) Sayang­nya, Kiai Syafawi begitu cepat dipanggil Yang Maha Kuasa pada 1904, sehingga kiprah Kiai Syafawi dalam pengem­bang­an Pesantren belum bisa terlihat maksimal. Dua puluh tahun kemudian, Kiai Tamim menyusul Kiai Syafawi meng­hadap Sang Khaliq pada 1924.

Sepeninggal kedua kiai tersebut, Pesantren Darul Ulum hampir saja mengalami kekosongan kepemimpinan. Praktis hanya Kiai Kholil seorang diri yang tersisa dalam meneruskan kelangsungan eksistensi pesantren yang semakin mendapat tantangan yang tidak ringan. Karena itulah, konon Kiai Kholil sempat mengalami depresi berat akibat beratnya beban yang harus beliau pikul. Meski demikian, sebenarnya selain Kiai Kholil ada kader pemimpin pesantren yang potensial, yaitu Kiai Romly Tamim (wafat 1958 M), putra kedua Kiai Tamim yang juga adik ipar Kiai Kholil.[[146]](#footnote-146) Kehadiran Kiai Romly Tamim dapat meringankan beban psikologis yang harus dipikul oleh Kiai Kholil. Dalam melaksanakan tugas-tugas pengajaran dan pengajian, beliau dibantu oleh Kiai Romly Tamim sehingga sepeninggal Kiai Tamim tidak terjadi gon­cangan sosial yang signifikan.

Dengan demikian, pola kepemimpinan dan juga sistem pen­­didikan yang dikembangkan pada fase ini masih sangat sederhana dan tradisional. Pola kepemimpinan masih didasar­kan pada karisma kiai sehingga berimplikasi pada hubungan patron-klien. Namun, penting diketahui bahwa karisma itu mun­cul karena kelebihan dan kompetensi keilmuan yang di­mi­liki oleh kiai. Dengan kata lain, Kiai Tamim Irsyad menjadi tokoh karismatik sesungguhnya bukan warisan dari orang tua­nya, tetapi karisma itu muncul karena keluasan ilmu ke­agamaan seperti fikih dan tasawuf yang dimiliki.[[147]](#footnote-147)

Inilah dinamika kepemimpinan Pesantren Darul Ulum pada fase cikal bakal, di mana kepemimpinan pesantren mun­cul secara alamiah tanpa pemilihan dan penunjukan yang di­dasar­kan atas keahlian dan keluasan ilmu seorang kiai ka­ris­matik Kiai Tamim, model pembelajaran bersifat tradisional berupa ceramah, sorogan, bandongan, dan sistem kepemim­pinan masih sangat sederhana, yaitu pembagian tugas bidang ilmu yang diajarkan dan tempat mengajar yang terpisah antara kiai yang satu dengan yang lain.

2. Fase Pengembangan (1937-1958)

Meninggalnya kiai pesantren sering kali menjadi petaka bagi pesantren yang dipimpinnya, terutama bagi pesantren yang pola kepemimpinanya masih bersifat sentral di tangan satu atau dua kiai. Hal itu karena tidak ada pembagian tugas kepemimpinan yang jelas dan rinci sehingga mening­galnya se­orang kiai sebagai pemimpin tunggal pesantren bisa me­la­hir­kan goncangan-goncangan yang dapat mengancam eksistensi pesantren itu sendiri.

Fenomena seperti itu juga mewarnai dinamika kepemim­pinan Pesantren Darul Ulum sepeninggal Kiai Tamim Irsyad yang merupakan *founding fathers* Pesantren Darul Ulum.[[148]](#footnote-148) Karena selama ini Pesantren Darul Ulum berkembang hanya mengandalkan karisma Kiai Tamim, tanpa didasari dengan pengelolaan pesantren yang baik, maka Kiai Kholil sempat mengalami hambatan dan beban tugas yang sangat berat. Pengalaman tersebut ternyata menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi Kiai Kholil dan generasi berikutnya dalam mele­tak­kan dasar-dasar kepemimpinan yang baik.[[149]](#footnote-149)

Tantangan yang dihadapi pada fase pertumbuhan ini se­makin berat. Hal ini dikarenakan pesantren senantiasa dituntut mengikuti dinamika perubahan sosial yang terjadi di ma­sya­ra­kat demi mempertahankan “ruh”nya sendiri di tengah deras­nya laju perubahan sosial *(social change)*. Karena itu, gagasan-gagasan pembaruan pesantren mulai muncul pada fase ini, meskipun belum sempurna. Gagasan pemba­ruan itu, misal­nya, adalah penerapan sistem klasikal dalam tradisi pem­be­lajaran pesantren. Ini merupakan sebuah lom­patan dan inovasi yang cukup berarti bagi perkembangan Pesantren Darul Ulum pada masa mendatang. Namun, karena gagasan-gagasan pem­baruan tersebut masih sederhana, maka fase ini belum bisa dikategorikan sebagai fase modernisasi.

Dengan demikian, fase pengembangan Pesantren Darul Ulum ini ditandai dengan munculnya generasi kedua pendiri Pesantren Darul Ulum yang memegang tongkat estafet ke­pemimpinan dari generasi awal pesantren, seperti Kiai Romly Tamim (wafat 1958 M), Kiai Dahlan Kholil (wafat 1958 M), Kiai Umar Tamim (wafat 1971 M), Kiai Bishri Kholil (wafat 1968 M), dan Kiai Ma'shum Kholil (wafat 1961 M).[[150]](#footnote-150) Pada fase ini, kepemimpinan Darul Ulum dipegang oleh Kiai Romly Tamim dengan dibantu oleh Kiai Dahlan Kholil dan Kiai Umar Tamim, yaitu pada kurun 1937-1940. Pada perkembangan selanjutnya (1940-1958), kepemimpinan Pesantren Darul Ulum dipegang oleh Kiai Romly Tamim dan Kiai Dahlan Kholil dengan dibantu oleh beberapa kiai seperti Kiai Umar Tamim, Kiai Bishri Kholil, dan Kiai Ma'soem Kholil.

Para pemimpin pesantren generasi kedua ini merupakan generasi muda pesantren yang mempunyai kecakapan kepe­mim­pinan dan kedalaman ilmu keagamaan yang tidak perlu diragukan sebagai modal memimpin pesantren untuk mene­rus­kan perjuangan para pendiri pesantren. Sebelum menimba ilmu di Timur Tengah, mereka mempelajari ilmu agama di Pesantren Tebuireng yang diasuh oleh Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari. Mereka memilih Madrasah Darul Ulum Makkah sebagai kiblat pendidikannya. Kiai Dahlan Kholil berangkat ke tanah suci tahun 1932 dan kemudian disusul adik­nya yang bernama Kiai Ma'soem tahun 1937.[[151]](#footnote-151)

Satu hal penting yang terjadi pada fase ini adalah lahirnya nama “Darul Ulum” secara resmi pada tahun 1938. Penamaan “Darul Ulum” itu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pendidikan yang dijalani oleh tokoh fase generasi kedua ini. Seperti telah dijelaskan, tokoh-tokoh generasi muda seperti Kiai Romly Tamim, Kiai Dahlan Kholil, dan juga Kiai Ma'soem Kholil adalah para alumni Madrasah Darul Ulum Makkah. Barangkali karena terinspirasi dengan pengalaman belajar mereka selama di madrasah tersebut, mereka mena­ma­kan pesantrennya dengan Pesantren Darul Ulum dengan ha­rapan dapat meniru popularitas dan fungsi Madrasah Darul Ulum Makkah sebagai salah satu pusat studi keislaman ter­kemuka saat itu.

Namun demikian, alasan penamaan “Darul Ulum” tidak­lah sesederhana itu. Seperti ditekankan oleh para tokoh-tokohnya, penamaan itu dimaksudkan untuk menawarkan alternatif model pendidikan yang 'lain' di antara beberapa model pendidikan saat itu. Dengan kata lain, mereka meng­ingin­kan Pesantren Darul Ulum mempunyai keunikan ter­sendiri dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain.[[152]](#footnote-152) Pada konteks ini, nampak bahwa Kiai Tamim te­lah melakukan pemahaman alternatif tentang fungsi pesan­tren.[[153]](#footnote-153) Itulah sebenarnya visi pendidikan yang dikem­bangkan Pesan­tren Darul Ulum hingga saat ini.

Dilihat dari gagasan tentang fungsi pesantren tersebut, Kiai Tamim ingin mewujudkan cita-cita pendidikan pesantren sebagai tempat penempaan cendekiawan muslim yang tidak hanya berkutat pada pengkajian keislaman, tetapi juga harus mempunyai keahlian-keahlian lain yang diperlukan di alam dunia ini. Visi ini nampaknya yang berhasil diterjemahkan secara baik oleh para generasi sesudahnya dalam mengem­bang­kan Pesantren Darul Ulum. Dalam konteks ini, inovasi pendidikan yang ditunjukkan oleh Pesantren Darul Ulum se­be­narnya sudah bermula dari sejak awal. Bahkan visi Pesan­tren Darul Ulum yang tidak tertulis adalah selalu melakukan inovasi-inovasi demi menghadapi tantangan zaman.[[154]](#footnote-154)

Pada fase pertumbuhan ini, Pesantren Darul Ulum sema­kin berkembang dan tumbuh pesat tidak hanya terbatas di wilayah Jombang, tetapi juga mulai menarik perhatian umat Islam di daerah lain untuk mengirimkan anak-anaknya untuk dididik di Pesantren Darul Ulum ini. Berbagai inovasi dan transformasi terutama dalam bidang kepemimpinan dan ke­lem­bagaan mulai terjadi di sini.

Dalam bidang kepemimpinan, Pesantren Darul Ulum mulai menerapkan pola kepemimpinan yang lebih baik dari sebelumnya. Pembagian tugas kepemimpinan mulai dirintis pada fase ini. Kiai Romly Tamim, misalnya, memegang ke­bi­jakan umum pondok pesantren serta ilmu tasawuf dan tarekat qodiriyah wan naqsabandiyah*-*nya, Kiai Dahlan Cholil meme­gang kebijakan khusus *siasah* (manajemen) dan penga­jian syariat plus al-Qur'an, sedang Kiai Ma'soem Cholil me­ngem­ban tugas bidang organisasi sekolah dan mana­jemen­nya. Semen­tara itu, Kiai Umar Tamim adik Kiai Tamim Romly se­bagai pembantu aktif di bidang ketarekatan.[[155]](#footnote-155)

Secara kelembagaan, Pesantren Darul Ulum juga meng­alami kemajuan yang cukup pesat. Pada fase ini, kelembagaan yang ada di dalam Pesantren Darul Ulum tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti penga­jian al-Qur’an dan halaqah-halaqah sebagaimana terjadi pada awalnya, melainkan sudah dilengkapi dengan lembaga-lembaga lain seperti Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1938 yang merupakan embrio pembaruan Pesantren Darul Ulum.[[156]](#footnote-156) Pada perkembangan selanjutnya, di dalam Pesantren Darul Ulum juga didirikan Madrasah Mu'allimin (khusus siswa laki-laki) pada tahun 1949 dan Mu'allimat (khusus siswa perem­puan) pada tahun 1954.[[157]](#footnote-157)

Berdirinya lembaga pendidikan yang bernuansa modern ini tidak menyurutkan semangat dan menghapus predikat Pesantren Darul Ulum sebagai pesantren tasawuf. Bahkan Pesantren Darul Ulum dikenal luas sebagai basis gerakan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah*.* Sistem tarekat yang dirintis oleh Kiai Kholil pada fase cikal bakal pesantren se­ma­kin berkembang pesat. Jam'iyah tarekat itu semakin populer tidak hanya di kalangan masyarakat Jombang, bahkan me­nem­bus berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, bahkan sampai Sulawesi Selatan.[[158]](#footnote-158) Para pengikut tarekat ini mengadakan perayaan khusus bagi jamaahnya tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Sya'ban, Muharram dan Rabiul Akhir.

Setidaknya ada dua tipologi alumni Pesantren Darul Ulum pada fase ini. *Pertama,* profil alumni berupa ahli tarekat qadiriyah wan naqsabandiyah yang merupakan lulusan pen­didikan tarekat yang diasuh oleh Kiai Romly Tamim. Sebagian besar mereka juga telah berhasil menjadi *mursyid* –sebuah tingkatan tertinggi dalam tradisi tarekat. *Kedua,* profil alumni berupa lahirnya para *huffadh* atau penghafal al-Qur'an. Ke­mam­puan mereka tidak diragukan lagi di masyarakatnya. Bahkan mereka merupakan *huffadh* andalan di daerahnya masing-masing. Mereka itu adalah profil alumni madrasah *huffadh* al-Qur'an yang diasuh langsung oleh Kiai Dahlan Kholil.[[159]](#footnote-159)

Meskipun pada fase ini sudah didirikan sekolah klasikal pertama pada tahun 1938, yaitu dengan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimat pada tahun 1954, hasilnya belum begitu terlihat, tetapi berdirinya beberapa madrasah tersebut telah berhasil memberikan lan­das­an filosofis dan motivasi yang kuat dalam rintisan ber­diri­nya beberapa sekolah umum dan perguruan tinggi yang ada di lingkungan Pesantren Darul Ulum yang dikembangkan pada fase pembaruan.[[160]](#footnote-160)

Elaborasi di atas menunjukkan bahwa sejak awal berdiri­nya Pesantren Darul Ulum telah mengalami inovasi dan trans­for­masi, baik dari ranah manajemen maupun kelem­bagaan. Lebih dari itu, embrio pola kepemimpinan kolektif yang meru­pa­kan karakteristik kepemimpinan modern di Pesantren Darul Ulum sebenarnya telah nampak sejak awal.[[161]](#footnote-161) Sebagaimana telah dijelaskan di atas, sering kali wafatnya kiai senior pesan­tren bisa menjadi ‘bencana’. Ini sesungguhnya merupakan problem klasik yang dialami oleh pesantren dalam masa tran­sisi kepemimpinan pesantren ketika seorang kiai senior me­ning­gal dunia. Generasi penerusnya terkadang be­lum siap memikul beban berat yang diwariskan oleh pen­dahulunya. Hal seperti ini juga terjadi lagi di Pesantren Darul Ulum ketika tiga tokoh kunci pada fase ini meninggal dunia, yaitu Kiai Dahlan Kholil, Kiai Romly Tamim, dan Kiai Ma’shum Kholil.[[162]](#footnote-162)

Wafatnya tokoh kunci pesantren ini mengakibatkan Pesantren Darul Ulum mengalami kesenjangan kepemim­pinan, terutama pengajaran dalam bidang tarekat dan ilmu al-Qur'an. Sebab, keahlian Kiai Romly Tamim dalam bidang tarekat dan Kiai Dahlan Kholil dalam bidang al-Qur’an telah diakui oleh masyarakat di daerah Jombang, bahkan di Jawa Timur pada umumnya.[[163]](#footnote-163) Ia terkenal sebagai ulama yang keras te­tapi konsisten dengan ilmunya.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pada fase ini pola kepemimpinan karismatik masih mewarnai kepemim­pinan Pesantren Darul Ulum. Di samping itu, kualifikasi ke­ilmuan para kiainya juga masih didominasi oleh para alumni pesantren, sehingga kompetensi ilmu agamanya tidak perlu diragukan lagi. Hal ini yang menjadi perhatian para generasi penerusnya, karena mereka dituntut untuk mempunyai ke­mampuan ilmu agama yang sama dengan para pen­dahulunya.

3. Fase Modernisasi (1958-sekarang)

a) Fase Modernisasi Awal (1958-1985)

Secara umum, pola kepemimpinan Pesantren Darul Ulum dalam fase modernisasi ini menunjukkan perkembangan yang lebih baik dan maju dibandingkan dengan pola kepemimpinan di periode-periode sebelumnya. Sejak tahun 1962, struktur organisasi yang ada di Pesantren Darul Ulum mulai berubah. Pola kepemimpinan kolektif kiai mulai diperkenalkan pada periode ini yang ditandai oleh adanya distribusi tugas secara lebih jelas dan terperinci. Pembagian tugas kepemimpinan mulai diterapkan dalam empat dewan, yaitu dewan kiai,[[164]](#footnote-164) dewan guru,[[165]](#footnote-165) dewan harian,[[166]](#footnote-166) dan dewan keuangan.[[167]](#footnote-167)

Masing-masing bidang itu dipimpin oleh seorang ketua. Sebagai ketua Dewan Kiai adalah Kiai Bishri Kholil (wafat 1968) dibantu oleh Kiai Musta’in Romly (wafat 1985). Di sam­ping sebagai wakil ketua Dewan Kiai, Kiai Musta’in Romly (wafat 1985) juga menduduki posisi ketua Dewan Guru. Se­dang­kan Kiai Badawi Kholil (wafat 1972) ditunjuk sebagai Ketua Dewan Harian. Sedangkan Kiai Badawi Kholil dikenal luas sebagai tokoh motor pembaruan manajemen organisasi pada periode ini ditunjuk sebagai Dewan Administrasi, dan Kiai Muh As'ad Umar dipercaya sebagai Ketua Dewan Keuangan.[[168]](#footnote-168)

Kepemimpinan Kiai Bishri Kholil pada fase pembaruan ini tidak berlangsung lama karena beliau wafat tidak lama setelah beliau memegang pucuk pimpinan Pesantren Darul Ulum. Kemudian posisi Kiai Bishri sebagai pemimpin utama pe­san­tren digantikan olehKiai Musta’in Romly.[[169]](#footnote-169) Di bawah ke­pe­mim­pinan kiai muda yang sarat keahlian dan dikenal dekat dengan para penguasa negara itulah, pembaruan Pesantren Darul Ulum dapat berjalan dengan baik.

Meskipun kepemimpinan kolektif telah dikenalkan pada fase ini, tetapi nuansa kepemimpinan karismatik-sentralistik pada Pesantren Darul Ulum masih nampak jelas di bawah kendali Kiai Musta’in Romly. Hal ini terlihat dari rangkap jabatan yang dimiliki oleh Kiai Musta’in Romly. Sebab, dalam saat yang sama, Kiai Musta’in Romly tidak saja sebagai pe­mim­pin utama pesantren, tetapi juga sebagai Rektor Uni­ver­sitas Darul Ulum dan pemimpin utama tarekat.[[170]](#footnote-170) Rangkap jabatan itu sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar, ka­re­na kualitas keilmuan dan keahlian yang dimiliki oleh Kiai Musta’in Romly telah diakui oleh masyatakat, baik dari dalam maupun luar pesantren. Sehingga kedudukan Kiai Musta’in Romly yang rangkap itulah yang kemudian melahirkan penga­ruh yang luar biasa bagi kemajuan pesantren yang di­pimpinnya.[[171]](#footnote-171)

Kepribadian Kiai Musta’in Romly yang karismatik itulah yang kemudian dapat memantapkan hubungan patron-klien di lingkungan Pesantren Darul Ulum. Sehingga kecende­rungan pola kepemimpinan sentralistik pada pesantren ini tidak dapat dihindari lagi, karena Kiai Musta’in Romly sebagai figur pesantren yang karismatik itu memimpin dan mem­ba­wa­hi tiga bidang pengajaran yang berbeda dalam satu pesan­tren, yaitu pondok pesantren, sekolah umum, dan tarekat.[[172]](#footnote-172)

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa meski pola ke­pe­mim­pinan kolektif Pesantren Darul Ulum sudah mulai di­kem­bangkan, tetapi kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Kiai Musta’in Romly lebih besar daripada kiai-kiai lainnya. Faktor kepemimpinan karismatik sentralistik inilah yang akhirnya ber­implikasi pada berhentinya kaderisasi yang sehat dan me­nye­babkan munculnya konflik berkepanjangan yang terjadi di Pesantren Darul Ulum.

b) Fase Modernisasi Kedua (1985-1995)

Fase Pembaruan tahap kedua ditandai dengan penerapan pola kepemimpinan kolektif yang lebih baik daripada pola kepemimpinan kolektif sebelumnya. Karena kepemimpinan kolektif pada fase ini telah menerapkan strukutur organisasi dan tata kerja yang lebih jelas dalam bentuk majelis yang bernama Majelis Pimpinan Pondok (MPP).[[173]](#footnote-173) Model kepemim­pinan kolekif ini lebih menekankan pada proses kepemim­pinan dan pengendalian organisasi dilakukan oleh majelis se­cara kolektif.

Kepemimpinan kolektif Pesantren Darul Ulum dilaksana­kan oleh Majelis Pimpinan Pondok (MPP) yang merupakan lembaga tertinggi pesantren, sehingga seluruh kebijakan ter­tinggi di Pesantren Darul Ulum berada pada lembaga MPP ter­sebut. Segala peraturan dan ketentuan yang mengatas­ nama­­kan Pesantren Darul Ulum harus dikonsultasikan dan setujui oleh lembaga ini.

Majelis sebagaimana tersebut di atas terdiri dari delapan orang anggota tetap yang merupakan representasi dari ke­turunan atau ahli waris Kiai Tamim Irsyad yang terdiri dari Nyai Fatimah (istri Kiai Kholil), Kiai Romly Tamim, dan Kiai Umar Tamim. Sistem pembagiannya disesuaikan dengan tata cara pembagian warisan dalam Islam, yaitu anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki.[[174]](#footnote-174) Dengan demikian, dari garis keturunan Nyai Fatimah cukup diwakili oleh dua orang yang masuk dalam struktur MPP karena Fatimah adalah seorang perempuan, sedangkan dari garis ke­turunan Kiai Romly Tamim dan Kiai Umar Tamim masing-masing mendapatkan kuota tiga orang yang bisa masuk dalam struktur MPP Darul Ulum.

Pada fase ini kepemimpinan kolektif Pesantren Darul Ulum di bawah kendali Kiai Muh. As'ad Umar sebagai Ketua Umum MPP. Kemudian untuk menjalankan kepemimpinan pesantren, Kiai Muh. As’ad Umar dibantu oleh beberapa kiai yang cakap dalam bidang tugas masing-masing, yaitu; Kiai Dimyathi Romly, S.H. sebagai Ketua Bidang Khusus Pen­didikan, Kiai Cholil Dahlan sebagai Sekretaris Umum, Kiai Tamim Romly, sebagai Koordinator Alumni & Ketua Ikatan Alumni Pondok Pesantren Darul Ulum (IKAPPDAR), Kiai Za'imuddin WA, sebagai Koordinator Keuangan, Kiai Muh. Iqbal Hasyim sebagai Koordinator Kesra & Olah Raga, Kiai M. Syarif Hidayatullah sebagai Koordinator Keamanan & Ke­ter­tiban, dan Kiai M. Hamid Bishri sebagai Koordinator Pengajian dan Kepondokan.[[175]](#footnote-175)

Secara umum, pola kepemimpinan Pesantren Darul Ulum sudah ditangani secara kolektif, tetapi aroma kepemimpinan berbasis keluarga tidak bisa sepenuhnya dihilangkan.[[176]](#footnote-176) Kecen­derungan model kepemimpinan seperti ini sesungguhnya sejalan dengan model kepemimpinan pesantren pada umum­nya, sehingga wajar kalau pesantren sering digambarkan sebagai sebuah kerajaan kecil dengan kiai sebagai rajanya. Di sini, aroma feodalisme pesantren sangat terasa kental sekali, meskipun pesantren ini telah mencoba melakukan langkah akomodasi dengan modernitas.

Kritik terhadap kepemimpinan pesantren yang cenderung tetap mempertahankan dominasi keluarga dan bersifat feodal di saat pesantren ini sedang mengembangkan lembaga pen­didikan yang modern mulai muncul dari kalangan gene­rasi muda pesantren. Karena kalangan muda pesantren ini mulai tumbuh daya kritisnya dan semakin variatifnya sumber belajar yang mereka miliki.[[177]](#footnote-177) Dengan demikian, pola kepemim­pinan yang dikembangkan di Pesantren Darul Ulum ini masih ber­basis keluarga, karena seluruh anggota MPP harus dari ke­tu­runan Kiai Tamim Irsyad.

c) Fase Modernisasi Ketiga (1995-2001)

Kepemimpinan Pesantren Darul Ulum pada fase ini ham­pir tidak ada perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan kepemimpinan pada fase modernisasi kedua. Sosok kiai senior masih berpengaruh dalam kepemimpinan pe­san­tren pada periode ini, meskipun kebesaran nama Pesantren Darul Ulum mulai terasa menurun dan telah terjadi krisis Kiai senior se­telah wafatnya Kiai Hanan Ma’soem pada tahun 2001,[[178]](#footnote-178) sehinga Pesantren Darul Ulum hanya menyisakan satu kiai senior, yaitu Kiai Muh. As’ad Umar.

Wafatnya Kiai Hanan tersebut di atas mendorong para kiai junior untuk tampil ambil bagian dalam kepemimpinan pesantren, meskipun peran kiai junior belum bisa menandingi kemampuan dan kualifikasi ilmu-ilmu agama para kiai senior. Karena telah terjadi pergeseran orientasi pendidikan keluarga kiai, yaitu pendidikan yang berbasis pesantren menjadi pen­didikan berbasis perguruan tinggi. Oleh karena itu, kiai junior yang masuk dalam Majelis Pimpinan Pondok (MPP) sebagian besar bergelar sarjana.[[179]](#footnote-179)

Corak kepemimpinan pesantren pada fase ini ditandai adanya pergeseran peran kiai yang lebih memerankan sebagai seorang manajer organisasidaripadasebagai figur kiai yang kapabel dalam bidang ilmu-ilmu agama. Meskipun demikian, model kepemimpinan kolektif tetap dipertahankan,[[180]](#footnote-180) karena model kepemimpinan yang demikian sangat tepat bagi pesan­tren yang memiliki jumlah santri cukup besar, bentuk pen­didikan yang beragam, serta jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Di samping itu, para ahli waris pendiri pesan­tren masih mempunyai ikatan kepemilikan pesantren yang sangat tinggi, sehingga mereka harus meneruskan dan mengem­bangkan pesantren.

Struktur Majelis Pimpinan Pondok (MPP) tidak meng­ala­mi perubahan yang berarti dibandingkan dengan struktur organisasi pesantren pada fase sebelumnya, kecuali beberapa bidang saja. Misalnya, pada fase sebelumnya, bidang pen­di­dikan tidak digabung dengan bidang orkes, tetapi pada fase ini kedua bidang tersebut digabung menjadi bidang pendidikan dan orkes. Majelis pesantren ini tetap dalam komando Kiai Muh. As’ad Umar sebagai pemimpin tertinggi Pesantren Darul Ulum, kemudian dibantu Kiai Dimyathi Romly sebagai Koor­dinator Pendidikan dan Orkes, Kiai Hanan Ma’soem (wafat 2001) sebagai Koordinator Pengajian dan Kepondokan, Kiai Kholil Dahlan sebagai Sekretaris Umum, Kiai A. Tamim Romly sebagai Koordinator Alumni Dan IKAPPDAR, Drs. M. Zaimuddin WA, SU sebagai Koordinator Keuangan, Drs. H.M. Iqbal Hasyim sebagai Koordinator Kesra, dan M. Zaini Taufan Sonhaji sebagai Koordinator Kamtib.

e)Fase Modernisasi Keempat (2001-Sekarang)

Secara umum, tidak ada sesuatu yang baru dalam pola kepemimpinan sampai pada fase modernisasi keempat ini,[[181]](#footnote-181) kecuali munculnya kiai-kiai junior yang masuk dalam struktur MPP. Meskipun munculnya kiai-kiai junior telah mewarnai kepemimpinan pesantren dalam struktur MPP, tetapi pucuk pimpinan majlis pada periode ini tetap dikuasai oleh kiai senior yaitu Kiai Muh. As’ad Umar sejak menggantikan Kiai Musta’in Romly pada tahun 1985.

Struktur MPP pada periode ini masih menempatkan Kiai Muh. As’ad Umar masih menduduki posisi tertinggi sebagai pemimpin tertinggi Pesantren Darul Ulum dengan dibantu oleh Kiai Dimyathi Romly sebagai Koordinator Pendidikan, Kiai Kholil Dahlan sebagai Sekretaris Umum, Kiai Tamim Romly sebagai Koordinator Alumni dan IKAPPDAR, Drs. M. Zaimuddin WA, SU sebagai Koordinator Keuangan, Drs. H.M. Iqbal Hasyim sebagai Koordinator Kesra dan Orkes, Hamid Bisyri, M.Si. sebagai Koordinator Kepondokan, dan M. Zaini Taufan Sonhaji sebagai Koordinator Kamtib.

Elaborasi di atas menggambarkan bahwa dinamika pola kepemimpinan Pesantren Darul Ulum senantiasa mengalami perubahan dan pembaruan. Tetapi pada aras ini, pola kepe­mim­pinan yang terjadi di Pesantren Darul Ulum belum me­ne­rapkan prinsip profesionalitas sebagai pertimbangan utama, tetapi pertimbangan garis keturunan masih sangat dominan.[[182]](#footnote-182) Hal yang demikian menutup kemungkinan peng­kaderan ek­s­ter­nal dari masyarakat umum untuk ambil ‘saham’ di Pesantren Darul Ulum tersebut.

Para profesional bidang pendidikan dari luar keluarga Bani Tamim hanya memiliki peluang untuk ikut membantu dalam kepemimpinan di Pesantren Darul Ulum, yaitu pada lembaga teknis yang membawahi lembaga pendidikan di ling­kungan Pesantren Darul Ulum, seperti kepala SMP, SMA, dan rektor UNDAR. Karena lembaga-lembaga pendidikan tersebut membutuhkan kader-kader profesional yang cakap dalam mengembangkan institusi yang bercorak modern tidak harus dari garis keturunan kiai pesantren. Kendati begitu, para pemimpin lembaga teknis tersebut tidak mempunyai kebe­basan mutlak karena mereka harus tunduk pada kebijakan Majelis Pimpinan Pondok. Dengan kata lain, kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga teknis tidak boleh ber­tentangan dengan dengan kebijakan tertinggi MPP.

Dilihat dari aspek kelembagaan pesantren, baik sebagai status milik pribadi maupun milik institusi, peran kiai tetap merupakan tokoh kunci, dan keturunannya memiliki peluang terbesar untuk menjadi penggantinya. Di sini pola peng­ka­der­an dan kepemimpinan pesantren belum sepenuh­nya bersifat umum dan terbuka. Hanya mereka yang mem­punyai “darah biru” yang paling berpeluang menjadi penerus pesantren di masa depan.

Fenomena yang terjadi pada Pesantren Darul Ulum se­sung­­­guhnya merupakan sistem kelembagaan milik institusi ter­batas. Artinya, pesantren ini tidak dipimpin oleh seorang figur kiai dengan kepemimpinan tunggal, tetapi Pesantren Darul Ulum telah melakukan akomodasi kepemimpinan yang ko­lektif meskipun masih bersifat terbatas dalam keturunan keluarga Bani Tamim.

Pelabelan predikat ‘modern’ pada Pesantren Darul Ulum dalam beberapa hal masih bersifat ambigu. Dilihat dari aspek manajemen organisasinya, Pesantren Darul Ulum masih sulit untuk bisa dikategorikan sebagai pesantren modern, karena pola kepemimpinan yang diterapkan masih berbasis keluarga, meski sudah menerapkan pola kepemimpinan kolektif. Suk­sesi kepemimpinannya juga masih belum menerapkan suksesi kepemimpinan yang lebih terbuka dan rasional sebagaimana lazimnya dalam manajemen organisasi modern.

B. Tujuan Pendidikan Pesantren Darul Ulum

Dalam sistem pendidikan modern, rumusan cita-cita dan tujuan pendidikan yang akan dicapai merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap penyelenggaraan pendidikan, sebab tujuan pendidikan pada hakekatnya merupakan arah dan orientasi pendidikan yang sekaligus sebagai salah satu faktor keberhasilan pendidikan di samping faktor pendidik itu sendiri. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[[183]](#footnote-183)

Secara historis, keberadaan pesantren tidak bisa lepas dari misi perubahan sosial keagamaan *(agent of socio-religious change)*. Dalam bentuknya yang paling awal, pesantren me­ru­pakan lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan beberapa materi dasar keislaman, seperti membaca al-Qur’an, mela­ku­kan shalat dan sebagainya. Pada aras ini, tujuan pendidikan pe­san­tren banyak didominasi dengan orientasi akhirat. Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi, pesan­tren dituntut untuk senantiasa menyesuaikan dan mengikuti selera ma­syarakat.[[184]](#footnote-184) Kebutuhan masyarakat modern cende­rung bersifat ekonomis, praktis, fungsional, dan materialis. Sehingga para kiai sebagai “raja kecil “ pesantren dituntut untuk selalu mem­baca perubahan zaman dan memenuhi selera kebutuhan ma­sya­rakat modern yang semakin berubah demi menjaga kon­tinuitas pesantren itu sendiri.

Merumuskan tujuan pendidikan pesantren di era modern sekarang ini tidaklah mudah. Pesantren dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. *Pertama*, orientasi pendidikan yang meng­arah padaselera pasar dengan resiko kemungkinan bergeser­nya tujuan pendidikan dan identitas pesantren sebagai lem­baga *tafaqquh fi al-din*. *Kedua*, orientasi pendidikan pesan­tren yang konsisten menjaga jarak dengan modernitas dan ber­ta­han seadanya karena akan semakin terisolasi dari impitan zaman.[[185]](#footnote-185) Tujuan pendidikan yang ideal di masa mendatang adalah berupaya untuk melakukan konvergensi dari kedua tantangan terebut, yaitu tujuan pendidikan yang dirancang untuk tetap berperan sanga tstrategis di era modern sekarang ini tanpa meninggalkan identitas kulturalnya sebagai 'penjaga gawang' moral masyarakat.

Rumusan tujuan pesantren banyak macamnya. Secara umum, rumusan tujuan pesantren dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum adalah mem­bimbing manusia menuju kepribadian muslim dan meng­arah­kan masyarakat melalui ilmu dan amal. Sedangkan tujuan khusus pesantren adalah untuk mempersiapkan santri menjadi alim/pandai ilmu agama, bermanfaat bagi diri dan ling­kungan­­nya. Hal itu sesuai dengan prinsip dasar Pesantren Darul Ulum, bahwa ada 3 tujuan utama dalam pendidikan pesantren,[[186]](#footnote-186) yaitu: *pertama,* mencetak ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama sesuai dengan yang tersirat dalam al-Qur’an. *Kedua,* mendidik muslim yang dapat melak­sanakan syari’at agama untuk mengisi, membina dan mengem­bangkan per­adab­an islami. *Ketiga,* mendidik santri agar memiliki keteram­pilan dasar yang relevan dengan masyarakat religius.

Dengan demikian, tujuan Pesantren Darul Ulum secara umum diarahkan pada pembentukan manusia bertakwa dan mampu hidup dengan kekuatan sendiri, tidak untuk ber­gan­tung menjadi pegawai negeri. Sehingga pendidikan di pesan­tren membekali para santri untuk tetap termotivasi hidup dalam kesederhanaan, mandiri, dan terampil.

Namun demikian, pada dasarnya tujuan pesantren belum terstruktur dan termaktub dalam garis-garis besar program kerja pesantren secara rinci, lengkap dan konsisten. Pada umum­­nya tujuan pesantren berkisar pada: *Pertama,* bentuk atau platform pesantren. Dalam sistem pendidikan pesantren yang tidak ada sekolah formalnya selalu menanamkan santri agar benar-benar dikondisikan untuk berfikir secara mandiri dalam menghadapi masa depannya. *Kedua,* sistem pengajaran pesantren, kepemimpinan kiai dan visi serta orientasi pesan­tren. Sebagaimana para peneliti mengatakan bahwa seorang kiai di pesantren mempunyai peran sentral dalam mengatur kelembagaan atau yang lainnya.

Dalam konteks Pesantren Darul Ulum, setidaknya ada dua rumusan tujuan pendidikan pesantren. *Pertama*, tujuan umum, yaitu “untuk mendidik manusia utuh dalam arti ma­nu­­sia yang berdedikasi tinggi dalam menyesuaikan diri ter­hadap perkembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan­nya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam.”[[187]](#footnote-187) Di sini nampak jelas bahwa tujuan Pesantren Darul Ulum diarahkan pada prinsip “menjadi modern tanpa harus meninggalkan tradisi.” Di sini juga nampak bahwa tradisionalisme dan mo­der­nisme merupakan bagian integral yang harus ada dalam meng­hadapi tantangan pesantren yang tidak ringan di era modern sekarang ini. Upaya penggabungan antara tradi­sio­nalisme dengan mo­der­nisme di Pesantren Darul Ulum dapat jelas kita lihat pada struktur kurikulum yang digunakan di Pesantren Darul Ulum. Ternyata, sistem pendidikan tradi­sional juga masih diper­ta­han­kan di pesantren ini di samping terdapat pembaruan-pembaruan dengan cara mengintrodusir beberapa ilmu se­kuler demi mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern.

Tujuan pendidikan Pesantren Darul Ulum secara filosofis dapat diketahui dari konsep Trisula yang digagas oleh Kiai Musta’in Romly pada kurun 1980-an. Berangkat dari konsep tersebut, rumusan tujuan pendidikan secara jelas dapat di­kem­bangkan oleh Pesantren Darul Ulum melalui visi pen­didikan yang meliputi tarekat, pondok pesantren, dan sekolah modern. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat menjadi ruh dalam sistem pendidikan Pesantren Darul Ulum.[[188]](#footnote-188) Pilar pertama adalah tarekat yang bertujuan untuk membina moral spiri­tua­litas para santri seiring dengan fenomena erosi moralitas di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Kesadaran terhadap dampak negatif modernisasi dan glo­balisasi bagi pembinaan moralitas anak, maka pimpinan pe­santren menganggap perlu membuat terobosan agar para santrinya bisa beradaptasi dengan lingkungan modern, tetapi tidak kehilangan moralitasnya. Dalam bingkai tarekat, di­harap­kan pola interaksi santri-kiai senantiasa bisa berlang­sung dalam suasana saling menghormati. Tarekat yang dikem­bang­kan di Pesantren Darul Ulum ini merupakan strategi bagai­mana mengembangkan pesantren sebagai pembina moral spiritua­li­tas masyarakat.[[189]](#footnote-189) Di Pesantren Darul Ulum, sistem tarekat yang berkembang adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah.

Pilar kedua adalah pendidikan pesantren. Pilar kedua ini sangat penting artinya dalam usaha mengembangkan pesan­tren sebagai lembaga *tafaqquh fi al-din* atau pusat studi ke­islaman. Hal ini penting dijaga karena pada awal berdirinya pesantren adalah sebagai lembaga kajian dan penyiaran agama Islam ini. Pilar kedua ini juga menjadi perhatian pesantren agar nilai-nilai ajaran Islam tetap terjaga dan kualitas pen­didikan keislaman dapat dipertahankan di tengah arus per­ubahan sosial yang terjadi di masyarakat.[[190]](#footnote-190)

Pilar ketiga adalah pendidikan umum. Pilar ketiga ini me­ru­pakan respon terhadap perubahan sosial akibat modernisasi. Lembaga pendidikan umum dikembangkan di pesantren ini tidak sekadar untuk mengejar kemajuan zaman tetapi juga sebagai simbol modernisasi pesantren.[[191]](#footnote-191) Oleh karena itu, tujuan pendidikan pesantren dari pilar ketigaadalah mem­be­kali para santri menjadi manusia unggulan yang siap meng­hadapi kehidupan modern, yaitu lulusan pesantren yang me­mi­liki kualifikasi keilmuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang bersifat pragmatis, fungsional, dan operasional.

Sebuah lembaga pendidikan dituntut untuk selalu meng­ikuti dan memahami kebutuhan masyarakat yang dari masa ke masa penuh dengan dinamika. Kegagalan dalam meng­ako­mo­dasi kebutuhan masyarakat, maka pendidikan akan masuk di ruang hampa karena tidak berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu, tujuan pendidikan dituntut untuk selalu kontek­s­tual dan senantiasa menyesuaikan kebutuhan masyarakat, se­hingga kehadiran pendidikan umum di dalam pesantren me­ru­pakan sebuah tuntutan agar fungsi dan eksistensi pesantren tidak larut oleh desakan modernitas.

Ketiga pilar pendidikan Pesantren Darul Ulum yang di­rumus­kan dalam visi dan tujuan pesantren melalui konsep “Trisula” itulah yang memungkinkan terjadinya lompatan-lompatan luar biasa dalam sistem pendidikan yang diterapkan di Pesantren Darul Ulum. Sehingga perkembangan pesantren ini tidak hanya ditentukan oleh faktor modernisasi dalam sim­bol pendidikan umum saja, tetapi perkembangan dan kema­juan pendidikan yang terjadi di Pesantren Darul Ulum sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam dalam konsep Trisula.

Dengan demikian, satu hal yang bisa digaris bawahi adalah bahwa pesantren diharapkan dapat memberi bekal kepada santri bukan saja ilmu agama, tetapi juga berbagai penge­ta­huan yang diperlukan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan pendidikan Pesantren Darul Ulum tidak hanya diarahkan pada penguasaan keimanan dan ketakwaan, tetapi juga di­orien­tasikan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan tekno­logi. Jargon ini sesuai dengan statemen yang disampaikan oleh Kiai Musta’in Romly, bahwa santri Darul Ulum dituntut untuk “berotak Jerman tetapi berakhlak Masjidil Haram”.

C. Bentuk-bentuk Pendidikan

Tujuan pendidikan yang merupakan penjabaran dari visi pendidikan Pesantren Darul Ulum di atas menggambarkan bahwa Pesantren Darul Ulum tidak hanya *concern* terhadap pengembangan ilmu-ilmu keagamaan saja, tetapi juga ber­usaha mengembangkan beberapa ilmu umum yang diper­lukan di alam modern sekarang ini. Berdirinya pendidikan madrasah yang kurikulumnya mengikuti Departemen Agama dan pendidikan umum yang kurikulumnya mengikuti Depar­temen Pendidikan Nasional merupakan wujud respon pe­santren terhadap perubahan sosial.

Wujud dari respon pesantren dilihat dari apek kelem­bagaan pendidikan adalah berdirinya lembaga pendidikan yang mengikuti kurikulum pemerintah. Hal ini merupakan langkah maju dalam proses pembaruan pesantren tahap yang paling awal, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (1938), Madrasah Mu’allimin (1949), dan Madrasah Mu’allimat (1954).[[192]](#footnote-192) Lom­patan pembaruan dalam sistem pendidikan yang paling spek­ta­kuler dalam sejarah Pesantren Darul Ulum adalah ketika pesantren tersebut mulai mengadopsi sistem pen­didikan modern, berupa madrasah dan sekolah umum di bawah kepemimpinan Kiai Musta’in Romly. Dalam konteks ini, Kiai Musta’in Romly berhasil memberikan pemahaman baru ter­ha­dap diskursus ilmu keislaman dalam sistem pendidikan Islam.[[193]](#footnote-193)

Dengan demikian, bentuk-bentuk pendidikan yang di­kem­­bangkan dalam pesantren ini tidak terbatas pada pengem­bangan studi keislaman tradisional, melainkan juga mulai mengintrodusir ilmu-ilmu 'sekuler' ke dalam pesantren. Pada tahapan awal pembaruan pesantren ini,sistem pendidikan ber­bentuk madrasah dan sekolah umum seperti SMP, SMA, dan SMK mulai didirikan di dalam lingkungan pesantren. Bahkan Pada tahun 1965 berdiri Universitas Darul Ulum (UNDAR)[[194]](#footnote-194) yang memiliki beberapa fakultas, antara lain: Fakultas Alim Ulama, Hukum, Sosial Politik, dan Pertanian. Pada tahun 1989 UNDAR memiliki enam fakultas, yaitu Hukum, Sosial Politik, Ushuluddin, Ilmu Pendidikan, dan Ekonomi.

Berdirinya Universitas Darul Ulum berdampak positif bagi kemajuan lembaga pendidikan di lingkungan pesantren, yaitu perubahan manajemen kelembagaan dan kurikulum pendidikan di madrasah dan sekolah yang ada di bawah naungan Pesantren Darul Ulum mulai tahun 1967. Oleh karena itu, beberapa madrasah yang di lingkungan Pesantren Darul Ulum mulai berafiliasi ke Departemen Agama. Sedangkan se­kolah umum yang berada di bawah naungan pesantren ber­afiliasi ke Departemen Pendidikan Nasional.

Munculnya gagasan pembaruan (baca: modernisasi) pen­di­dikan dalam sistem pendidikan Islam bukan datang dari kaum muslimin sendiri, melainkan diperkenalkan oleh pe­me­rin­tah kolonial Belanda melalui sekolah rakyat, yang telah mengajarkan model pembelajaran modern. Sistem pen­di­dikan modern yang telah dikembangkan Belanda di Indonesia pada pertengahan abad ke-19 bersinergi dengan gelombang pem­baruan pendidikan Islam tradisional itu mengilhami per­ubah­an dan pembaruan pendidikan di Pesantren Darul Ulum.[[195]](#footnote-195)

Sebagai konsekuensi modernisasi pendidikan Islam yang terjadi di Pesantren Darul Ulum, maka ada dua model sistem kelembagaan pendidikan modern Islam, yaitu: (1) madrasah modern, yang secara terbatas mengadopsi substansi dan meto­do­logi pendidikan modern ala Barat seperti MI, MTs, MA, dan (2) sekolah umum model Barat tetapi diberi muatan peng­ajar­an Islam, seperti SMP, SMA, STM yang berbasis Agama Islam.

a) Sistem Pendidikan Madrasah

Satu bentuk pembaruan dan inovasi yang terpenting dan paling awal dalam sistem pendidikan Pesantren Darul Ulum adalah berdirinya madrasah. Karena sebelum masuknya mo­der­nisasi era kepemimpinan Kiai Musta’in Romly pen­di­dikan pesantren tidak mengenal istilah madrasah tetapi peng­ajaran dengan sistem bandongan dan sorogan seperti pengajian al-Qur’an, Fikih, Akhlak dan Tarekat yang dilak­sana­kan di dalam masjid dan rumah kiai. Dengan demikian, madrasah meru­pa­kan inovasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada sebelumnya tersebut.

Sebelum adanya madrasah, model pengajaran yang ber­laku di pesantren masih bersifat sangat tradisional, dalam arti belum ada penjenjangan atau sistem klasikal dan kuri­kulum yang jelas yang merupakan karakteristik pendidikan modern. Karenanya, pesantren sering diklaim sebagai institusi yang sangat tradisional, baik dari segi motode pengajaran, sis­tem kelembagaan, maupun kurikulumnya. Namun, seiring dengan ekspansi gagasan modernisasi pendidikan di Pesan­tren Darul Ulum, maka pengajaran agama Islam seperti ter­sebut di atas mulai mengadopsi berbagai sistem pendidikan modern, se­per­ti sistem kelas, peralatan bangku, meja, dan papan tulis.

Dalam sejarah munculnya madrasah, Madrasah Mambaul Ulum yang lahir pada 1906 oleh Sesuhunan Pakubuwono merupakan madrasah pertama yang telah melakukan pem­ba­ruan sistem pendidikannya. Selain Pesantren Mambaul Ulum, beberapa pesantren juga mulai melakukan upaya modernisasi pendidikan dengan cara mendirikan madrasah di lingkungan pesantren, termasuk Pesantren Rejoso di Jombang (sekarang ber­nama Darul Ulum) yang mendirikan beberapa pendidikan Islam, seperti Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Madrasah Mu'allimin (khusus laki-laki), dan Mu'allimat (khu­sus perem­puan). Dengan demikian, berdirinya beberapa mad­rasah di bawah naungan Pesantren Darul Ulum merupakan tonggak sejarah dan momentum penting di mana pesantren tersebut mulai bergelut dan bergumul dengan modernitas.

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama pada fase pembaruan di bawah kepemimpinan Kiai Musta’in Romly, diversifikasi kelembagaan yang ada di Pesantren Darul Ulum semakin besar dan beragam. Sistem madrasah yang ada di bawah naungan Pesantren Darul Ulum juga semakin me­ning­kat, yaitu pendidikan yang berada di lingkungan Pesantren Darul Ulum terdapat tiga jenis pendidikan, yaitu madrasah (MI, MTs, MA) yang dikelola di bawah naungan dan kontrol Pesantren Darul Ulum.

Satu hal yang menarik dan cukup unik, bahwa di ling­kungan pesantren terdapat beberapa jenis pendidikan mad­ra­sah yang statusnya negeri, yaitu 1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Darul Ulum, 2) Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Darul Ulum, dan 3) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Darul Ulum.[[196]](#footnote-196) Meski demikian, peranan pimpinan pondok masih tetap besar, sehingga seluruh kebijakan pendidikan di lembaga-lembaga tersebut tetap berada di bawah kendali Ma­je­lis Pimpinan Pondok (MPP) yang anggota-anggotanya me­ru­pakan ahli waris Kiai Tamim Irsyad, pendiri utama Pesantren Darul Ulum.

Di samping bentuk-bentuk pendidikan pesantren formal di atas, Pesantren Darul Ulum juga masih mempertahankan bentuk-bentuk pendidikan pesantren non-formal, seperti 1) pengajian kitab-kitab klasik dalam bidang tafsir, hadits, ilmu alat, fikih, akhlak, dan lain-lain, 2) pengajian al-Qur’an, 3) la­tihan *muhadloroh* (penampilan dakwah), dan 4) latihan ke­terampilan. Ada beberapa hal yang ditekankan dalam la­tihan *muhadloroh* di atas, yaitu latihan kepemimpinan dan organisasi, dibaiyah, tahlil, dan olah raga. Sedangkan untuk bidang la­tihan keterampilan, setidaknya ada tujuh ketrampilan yang dikembangkan kepada para santri, yaitu penjahitan, keputrian, drum band, pembacaan al-Qur’an, kepramukaan, komputer, dan manajemen.[[197]](#footnote-197)

b) Sistem Sekolah Umum

Pesantren Darul Ulum tidak hanya sukses mengelola pendidikan madrasah, tetapi juga berhasil menyelenggarakan pendidikan umum yang diadopsi untuk memantapkan pem­ba­ruan sistem pendidikan pesantren setelah melakukan pem­ba­ruan awal berupa penerapan sistem madrasah. Agak ber­be­da dengan sistem pendidikan madrasah, sistem sekolah umum ini lebih memfokuskan pada kajian ilmu-ilmu ‘sekuler.’ Pen­di­riannya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kebutuhan ma­sya­rakat di era modern, seperti ilmu bahasa, ilmu kesehatan, dan ilmu komunikasi.[[198]](#footnote-198) Seiring dengan tantangan modernitas seperti itu, lulusan pesantren yang hanya dididik untuk men­jadi ahli agama ternyata gagap dalam menghadapi tantangan hidup modern yang lebih kompleks.

Tantangan modernitas tersebut, dunia pesantren perlu men­jaga kontinuitas dan eksistensi jati diri pesantren serta mem­buka diri dengan perubahan zaman dengan cara mela­ku­kan sejumlah penyesuaian dengan sistem pendidikan modern, seperti mendirikan sekolah umum di dalam ling­kung­an pesan­tren sebagai bekal hidup santri untuk bisa *survive* di tengah arus modernitas. Dengan demikian, bisa di­kata­kan bahwa kebijakan developmentalisme orde baru ter­nyata berpengaruh positif terhadap perubahan orientasi pen­didikan pesantren dari orientasi akhirat *an sich* menjadi orien­tasi dunia-akhirat.

Ada banyak keuntungan yang bisa dipetik dari keber­adaan sekolah umum di lingkungan pesantren. Di antaranya adalah santri selain berkesempatan untuk mempelajari kitab kuning, para santri juga dapat memperoleh ilmu dan pen­didikan lain yang akan membantu dalam masyarakat kelak. Hal ini juga yang dipraktikkan di Pesantren Darul Ulum, di mana semua santri, baik yang belajar di madrasah maupun di sekolah-sekolah umum, harus tetap mengaji kitab kuning se­suai ketentuan yang berlaku.[[199]](#footnote-199) Ini merupakan wujud konsis­ten­si Pesantren Darul Ulum untuk senantiasa memper­ta­hankan nilai-nilai tradisionalisme keagamaan di tengah arus modernisasi sistem pendidikan pesantren.

Pesantren Darul Ulum dalam rangka memantapkan sis­tem pendidikan yang modern mengelola beberapa sekolah umum, mulai dari tingkat SMP, SMA, SMK, bahkan per­guruan tinggi, yaitu SMP 1 Darul Ulum, SMP Negeri 3 Darul Ulum (Unggulan), Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Darul Ulum, SMA Unggulan Darul Ulum yang bekerja sama dengan BPP Teknologi, SMA 3 Darul Ulum, SMEA Darul Ulum, STM Darul Ulum, dan STM Telkom Darul Ulum yang merupakan salah satu STM Unggulan di daerah Jawa Timur.

Untuk jenjang pendidikan tinggi, pada awalnya di Pesan­tren Darul Ulum terdapat sebuah Universitas Darul Ulum yang didirikan oleh Kiai Musta’in Romly pada tahun 1965. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, universitas ter­sebut memisahkan diri secara kelembagaan dengan Pesan­tren Darul Ulum. Lepasnya UNDAR dari Pesantren Darul Ulum karena faktor konflik kepentingan antar keluarga, terutama antara keluarga Muh. As’ad Umar dan Bani Musta’in Romly. Bani Musta’in Romly menganggap bahwa merekalah yang berhak atas kepemimpinan UNDAR.[[200]](#footnote-200)

Melihat situasi seperti ini, maka Kiai Muh. As’ad Umar berinisiatif mendirikan perguruan tinggi baru–lepas dari UNDAR– di lingkungan Pesantren Darul Ulum. Perguruan tinggi tersebut kemudian dinamakan UNIPPDU (Universitas Pondok Pesantren Darul Ulum). Saat ini, universitas tersebut mempunyai 7 fakultas dan 1 program pascasarjana, yaitu Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Agama Islam, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan satu program pascasarjana dengan konsentrasi Manajemen Pen­di­dikan. Universitas tersebut juga membuka Akademi Ke­perawatan (Akper) dan Akademi Kebidanan (Akbid) yang merupakan embrio berdirinya Fakultas Ilmu Kesehatan.

Dilihat dari aspek tujuan ataupun sistem pendidikannya, penyelenggaraan pendidikan di Pesantren Darul Ulum adalah cukup menarik dan fenomenal, maka memberikan predikat “modern” pada Pesantren Darul Ulum merupakan suatu hal yang cukup beralasan. Dilihat dari sistem dan bentuk-bentuk pendidikan yang ditawarkan di pesantren ini, wajar jika Pe­san­tren Darul Ulum termasuk tipologi pesantren modern, karena sejak 1960-an diversifikasi keilmuan mulai dikem­bang­kan di pesantren tersebut. Tradisi keilmuan yang dikembang­kan di pesantren itu tidak hanya terbatas pada tradisi ilmu-ilmu ke­agamaan, melainkan tradisi ilmu sekuler juga mulai ditumbuh­kembangkan di pesantren yang dikenal luas sebagai pesantren tasawuf tersebut. Hal ini ditandai dengan berdirinya madrasah dan sekolah umum di lingkungan Pesantren Darul Ulum. Keberadaan madrasah dalam sebuah pesantren meru­pa­kan salah satu langkah awal pembaruan pesantren, sedang­kan ke­hadiran beberapa sekolah umum dalam pesantren me­ru­­pa­kan pemantapan pembaruan. Ini merupakan bentuk respon pesan­tren terhadap tantangan modernitas yang sulit terelakkan.

Dalam konteks inilah, cukup beralasan apabila Pesantren Darul Ulum termasuk kategori pesantren modern, mengingat diversifikasi keilmuan yang dikembangkan juga mempertim­bang­kan kebutuhan dan tuntutan modern. Apapun label yang pas diterapkan untuk Pesantren Darul Ulum, satu hal yang mesti diperhatikan adalah bahwa Pesantren Darul Ulum me­ru­­pakan salah satu pesantren yang berhasil melakukan penye­suaian dengan bentuk dan sistem pendidikan modern yang tidak hanya berorientasi akhirat, tetapi juga mem­pertim­bang­kan orientasi duniawi yang lebih pragmatis dan fung­sio­nal. Perjalanan panjang Pesantren Darul Ulum menjadi Pesan­tren modern bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, ke­sung­guh­an dalam menata administrasi dan manajemen ser­ta kebera­ni­an melakukan inovasi-inovasi yang mengagum­kan, sehingga predikat pesantren modern memang layak disan­dang.

D. Materi Pelajaran di Pesantren

Pesantren Darul Ulum yang telah berhasil mengadopsi be­be­rapa sistem pendidikan modern ternyata tidak berarti meng­hilangkan nilai-nilai tradisionalisme yang sudah sejak lama ditumbuhkembangkan dalam pesantren, seperti peng­ajian kitab-kitab kuning dan pelestarian tradisi pesantren yang ber­beda dengan tradisi modern. Pembelajaran agama yang di­baku­­kan sebagai kurikulum pendidikan tradisional juga menjadi perhatian pesantren ini, sehingga julukan sebagai pen­didikan pesantren modern belum dinilai berhasil apabila pola pen­di­dikan tradisional yang sejak lama diajarkan menjadi terabaikan.

Pembakuan kurikulum dengan sistem tradisional adalah sejumlah materi pelajaran agama yang disusun dan direncana­kan secara matang sehingga dapat diukur keber­hasilan pen­didikannya. Kurikulum tersebut memuat berbagai topik peng­ajaran keislaman seperti tafsir, hadits, fikih, tasawuf, akhlak, dan juga bahasa Arab,[[201]](#footnote-201) melalui berbagai kitab-kitab klasik yang standar. Model kurikulum seperti ini diajarkan kepada santri umumnya pada malam hari.[[202]](#footnote-202) Sedangkan kurikulum pendidikan modern adalah kurikulum yang menitikberatkan pada kebutuhan duniawi yang lebih bersifat praktis-fung­sio­nal, seperti ilmu-ilmu sekuler yang menunjang penguasaan IPTEK dan tantangan modernitas, seperti Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, Biologi.[[203]](#footnote-203)

Dalam kaitannya dengan pengajaran agama, Pesantren Darul Ulum tetap mempertahankan sistem pengajaran tradi­sio­nal seperti sorogan dan wetonan, sehingga para santri te­tap mempelajari kitab-kitab klasik, seperti *Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Qurtubi,* dan *Tafsir Khamami* (bidang tafsir); *Bukhori, Muslim, Tajrid al-Shorih*, *Bulugh al-Marom*, *Riyadu al-Sholihin, Jawahirul Bukhori, Arbain Nawawi* (bidang hadits); *Jurumiah, Imriti, Alfiah Ibnu Malik, Milhatul I'rab,* dan *Quwaidul Lughoh* (bidang ilmu alat); *Mabadi' Fiqiyah, Safinatunnajah, Sulam Taufiq, Fathul Qorib, Fathul Mu'in,* dan *Kifayatul Akhyar* (bidang fikih); *Akhlakul Banat, Akhlakul Banin, Uqudul Lujain, Ta'limul Mu­ta'alim, Durrotunnasihin, Bidayatul Hidayah, Nasoihul Ibad, Khikam dan Ihyaulumuddin* (bidang akhlak).[[204]](#footnote-204)

Berikut ini adalah jadwal kegiatan pengajian yangme­rupakan kurikulum inti pendidikan tradisional di Pesantren Darul Ulum.

**Tabel: 1**

**Jadwal Pengajian Kurikulum Tradisional**

| **No** | **Hari** | **Waktu** | **Kitab** | **Pengasuh** | **Tempat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Malam Sabtu | Ba’da Maghrib | *Bulugh  al-Marom* | K.H. Muh. As’ad Umar /  Gus Hemik / Gus Ulip | Kediaman |
| *Tafsir Jalalain* | Drs. K.H. Cholil Dahlan | Masjid |
| Ba’da Isya | *Hikam* | Kediaman |
| Ba’da Maghrib | *Bidayat  al-Hidayah* | Drs. K.H. Iqbal Hasyim | Ruang data |
| *Ta’lim  al-Muta’allim* | M. Syarif Hidayatullah, ST/Ust. Sururi Zulfa | Pendopo lama |
| *Arbai’  al-Nawawi* |
| 2 | Malam Ahad | Ba’da Maghrib | *Bulugh  al-Marom* | K.H. Muh. As’ad Umar /  Gus Hemik / Gus Ulip | Kediaman |
| *Tafsir Jalalain* | Drs. K.H. Cholil Dahlan | Masjid |
| Ba’da Isya | *Hikam* | Kediaman |
| Ba’da Maghrib | *Bidayat  al-Hidayah* | Drs. K.H. Iqbal Hasyim | Ruang data |
| *Fath al-Qarib* | Pendopo lama |
| Ahad | Ba’da Ashar | *Jawahir  al-Bukhari* | K.H. Mahmud Dahlan | Masjid |
| 3 | Malam Senin | Ba’da Maghrib | *Bulugh al-Maram* | K.H. Muh. As’ad Umar /  Gus Hemik / Gus Ulip | Kediaman |
| *Tafsir Jalalain* | Drs. K.H. Cholil Dahlan | Masjid |
| Ba’da Isya | *Shahih Bukhori* | Kediaman |
| Ba’da Maghrib | *Nashaih al-Ibad* | K.H. A. Tamim Romly, SH, M.Si. | Pendopo lama |
| *Bidayat al-Hidayah* | Drs. K.H. Iqbal Hasyim | Ruang data |
| Senin | Ba’da Ashar | *Riyadh al-Badi’ah* | K.H. Mahmud Dahlan | Masjid |
| 4 | Malam Selasa | Ba’da Isya | *Hikam* | Drs. K.H. Cholil Dahlan | Kediaman |
| Selasa | Ba’da Subuh | *Nashaih al-Ibad* |
| *Durrot al-Nasihin* | HM. Dahlan Bishri, Lc., M.Ag. | Masjid |
| 5 | Malam Rabu | Ba’da Maghrib | *Bulugh al-Marom* | K.H. Muh. As’ad Umar /  Gus Hemik / Gus Ulip | Kediaman |
| *Tajrid al-Sharih* | HM. Dahlan Bishri, Lc., M.Ag. | Masjid |
| *Fath al-Qorib* | Pendopo lama |
| *Bidayat al-Hidayah* | Drs. KH. Iqbal Hasyim | Ruang data |
| Rabu | Ba’da Subuh | *Hikam* | H. Shibih Hannan, S. Ag. | Kediaman |
| 6 | Malam Kamis | Ba’da Maghrib | *Bulughal-Maram* | K.H. Muh. As’ad Umar /  Gus Hemik / Gus Ulip | Kediaman |
| *Tafsir Yasin/ Riyadh as-Shalihin* | K.H. A. Dimyathi Romly, S.H. & K.H. A. Tamim Romly, S.H., M.Si. | Pendopo lama |
| *Shahih Bukhari* | Drs. K.H. Cholil Dahlan | Kediaman |
| *Bidayat al-Hidayah* | Drs. K.H. Iqbal Hasyim | Ruang data |
| *Tanbih al-Hidayah* | H. Shibih Hannan, S. Ag. | Masjid |
| 7 | Jum’at | Ba’da Jum’at | *Riyadl al-Sholihin* | K.H. A. Dimyathi Romly, S.H. & K.H. A. Tamim Romly, S.H., M.Si. | Masjid |

Sumber: Pondok Pesantren Darul Ulum, 2005

Daftar kitab kuning yang telah dibakukan menjadi kuri­kulum pendidikan tradisional tersebut belum sepenuhnya ber­jalan sesuai jadwal dan tujuan diselenggarakannya penga­jian kitab kuning. Sebab, masuknya kurikulum pendidikan mo­dern di pesantren menjadikan pelajaran kitab kuning semakin tidak diminati oleh para santri, bahkan belajar kitab kuning sudah tidak lagi menjadi tujuan primer mereka belajar di pe­san­tren. Hal yang demikian terkait dengan kebijakan pim­pinan pesantren sendiri yang seakan hanya mem­prio­ri­taskan pengembangan keilmuan yang ada di sekolah-sekolah formal sesuai dengan tuntutan zaman dan pasar. Sedangkan pelajaran kitab kuning hanya bertujuan untuk memberi bekal minimal santri dalam pembinaan moralitas dan pengetahuan agama.[[205]](#footnote-205)

Fenomena merosotnya minat santri dalam mempelajari ilmu-ilmu keagamaan di lingkungan Pesantren Darul Ulum antara lain dapat dilihat dari kecenderungan santri dalam memilih pendidikan formal di pagi hari. Untuk tahun pe­la­jaran 2005/2006, minat santri pada MTs Program Khusus Darul Ulum yang difokuskan pada kajian ilmu-ilmu ke­agamaan hanya terdapat 135 siswa, sedangkan santri yang memilih belajar di SMP Negeri 3 Darul Ulum mencapai 874 siswa.[[206]](#footnote-206) Fenomena yang sama juga terjadi di tingkat sekolah menengah atas. Jumlah santri yang memilih jurusan agama (MAK) se­banyak 492 siswa, sedangkan santri yang memilih jurusan umum (SMA) sebanyak 764 siswa. Data-data itu cukup untuk mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran tujuan belajar di pesantren. Para santri modern lebih memilih jurusan umum karena jurusan itulah yang lebih dekat mengantarkan pada lapangan pekerjaan.

E. Dinamika Tarekat

Sebagaimana telah disinggung di atas, keberadaan Pesan­tren Darul Ulum tidak bisa lepas dari keberadaan tarekat. Bahkan Pesantren Darul Ulum pernah menjadi Pusat Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah untuk wilayah Jawa Timur. Lima mursyid terakhir juga berasal dari pesantren tersebut, yaitu Kiai Khalil, Kiai Romly Tamim, Kiai Musta’in Romly, Kiai Rifai Romly, dan Kiai Dimyathi Romly.

Silsilah mursyid tarekat *Qadiriyah wa Naqsabandiyah* adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabi Muhammad | 23. | Nur al-Din |
| 2. | ‘Ali bin AbiThalib | 24. | Wali al-Din |
| 3. | Husein bin Ali | 25. | Husam al-Din |
| 4. | ZainalAbidin | 26. | Yahya |
| 5. | Muhammad al-Baqir | 27. | AbiBakr |
| 6. | Ja‘far al-Sadiq | 28. | ‘Abd Rahim |
| 7. | Musa al-Kazim | 29. | ‘Usman |
| 8. | Abu Hasan ‘Alibin Musa al-Riza | 30. | Kamal al-Din |
| 9. | Ma‘ruf al-Karkhi | 31. | ‘Abdul Fattah |
| 10. | Sari al-Saqati | 32. | Muhammad Murad |
| 11. | Abu Qasim al-Junaid al-Baghdadi | 33. | Syams al-Din |
| 12. | Abu Bakr al-Shibli | 34. | Ahmad Khatib al-Sambasi |
| 13. | ‘Abdul Wahid al-Tamimi | 35. | ‘Abdul Karim |
| 14. | ‘Abdul Faraj al-Tartusi | 36. | Ahmad Hasbullah bin Muhammad Madura |
| 15. | Abu Hasan ‘Ali Al-Hakkari | 37. | (Muhammad) Khalil |
| 16. | Abu Sa‘id al-Makhzumi | 38. | (Muhammad) RomlyTamim |
| 17. | ‘Abdul Qadir al-Jailani | 39. | ‘Usman al-Ishaq |
| 18. | ‘Abdul Aziz | 40. | (Muhammad) Musta‘inRomly |
| 19. | Muhammad al-Hattak | 41. | Rifai Romly Romly |
| 20. | Syams al-Din | 42. | Ma‘shum Ja‘far |
| 21. | Syarif al-Din | 43. | Dimyati Romly (Mursyid sekarang |
| 22. | Zain al-Din |

Di samping menjadi seorang mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, pada tahun 1975 Kiai Musta’in Romly juga memimpin sebuah organisasi yang dibentuk oleh Nahdla­tul Ulama pada tahun 1957, yaitu Jam’iyah Ahli Thariqah al-Mu’tabarah. Namun, menyusul bergabungnya Kiai Musta’in Romly ke dalam Partai Golkar menjelang Pemilu 1977, Jam’iyah Ahli Thariqah al-Mu’tabarah pecah. Melalui kongres di Semarang tahun 1979, NU sebagai organisasi yang me­nau­ngi Jam’iyah Tarekat tersebut kemudian membentuk Jam’iyah Tarekat baru yang bernama Jam‘iyah Ahli Thariqahal-Mu‘tabaroh al-Nahdliyah.

Meski jam’iyah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah pecah menjadi dua seperti yang telah dibahas di atas, perlu dicatat bahwa jam’iyah tarekat yang ada di Pesantren Darul Ulum masih berkembang dan mempunyai pengikut yang cukup diperhitungkan juga. Kini Jam’iyah Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Darul Ulum Jombang dipimpin oleh Kiai Dimyathi Romly. Di tengah arus modernisasi yang semakin berkembang di Pesantren Darul Ulum, nampak bahwa nuansa tarekat juga masih bisa dirasakan di pesantren tersebut.

F. Profil Guru

Pesantren Darul Ulum sejak kepemimpinan Kiai Musta’in Romly telah mengambil langkah yang cukup berani dengan meng­gandeng pemerintah (Golkar), secara kelembagaan Pesan­tren Darul Ulum dengan beberapa pilihan belajar santri baik di madrasah, sekolah, bahkan perguruan tinggi yang me­na­warkan kualifikasi ilmu-ilmu sekuler yang sangat relevan dengan kebijakan Orde Baru, maka pesantren ini cepat ber­kem­bang dan fasilitas pembangunan mulai didirikan di dalam kompleks Pesantren Darul Ulum.

Untuk mengawal kemajuan pendidikan di pesantren ini, peran guru sebagai tenaga pendidik sangat vital bagi ter­wu­jud­nya visi-misi pesantren. Oleh karena itu, peningkatan kua­litas guru di lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan yang tidak boleh ditawar. Lebih dari itu, kualifikasi guru yang mengajar di lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Pesantren Darul Ulum juga semakin beragam karena semakin beragam­nya bentuk-bentuk pendidikan yang ada di Pesantren Darul Ulum tersebut.

Adapun jumlah guru yang mengajar di madrasah dan sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Pesantren Darul Ulum adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2**

**Data Guru di Lingkungan Pesantren Darul Ulum**

| **No** | **Unit Pendidikan** | **Jumlah Guru** | | **Jumlah** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pa** | **Pi** |
| 1 | MIN Darul Ulum | 14 | 24 | 38 |
| 2 | MTs N Darul Ulum | 21 | 29 | 50 |
| 3 | MTs PK Darul Ulum | 20 | 19 | 39 |
| 4 | SMP Darul Ulum 1 | 22 | 14 | 36 |
| 5 | SMP Darul Ulum 2 | 7 | 5 | 12 |
| 6 | SMPN 3 Darul Ulum | 35 | 35 | 70 |
| 7 | MAN Darul Ulum | 31 | 44 | 75 |
| 8 | MAK Darul Ulum | 20 | 7 | 27 |
| 9 | SMA Darul Ulum 1 | 56 | 22 | 78 |
| 10 | SMA Darul Ulum 2 (BPPT) | 48 | 32 | 80 |
| 11 | SMA Darul Ulum 3 | 26 | 29 | 55 |
| 12 | SMK Darul Ulum 1 (SMEA) | 23 | 8 | 31 |
| 13 | SMK Darul Ulum 2 (STM) | 26 | 6 | 32 |
| 14 | SMK Darul Ulum3 (STM Telkom) | 40 | 10 | 50 |
| **Jumlah** | | **389** | **284** | **673** |

Dari data di atas, kita dapat melihat bahwa jumlah guru terbanyak adalah di SMA Darul Ulum 2 yang merupakan SMA unggulan yang bekerja sama dengan BPPT dan SMA Darul Ulum 1. Untuk tingkat SMP/MTs, jumlah guru ter­banyak juga terdapat di sekolah umum, yaitu SMPN 3 Darul Ulum. Kebutuhan guru di atas tentu tidak lepas dari rasio jum­lah siswa. Semakin besar jumlah siswa, maka semakin banyak pula kebutuhan guru. Satu hal yang penting dicatat di sini adalah bahwa popularitas sekolah umum di lingkungan santri Darul Ulum ternyata jauh lebih baik daripada insitusi mad­ra­sah yang *concern* pada kajian keagamaan, yaitu Mad­rasah Pro­gram Khusus. Sementara nasib madrasah umum seperti MTsN dan MAN masih lebih baik daripada madrasah keaga­ma­an, meski masih tetap kalah dengan sekolah-sekolah umum.

G. Profil Santri

Dari tahun ke tahun, perkembangan santri Darul Ulum menunjukkan trend fluktuatif sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel: 3**

**Perkembangan Santri Darul Ulum**



Sebagaimana terlihat dari tabel di atas, sejak tahun 1982 di mana pada saat itu pimpinan Pesantren Darul Ulum meru­mus­kan konsep Trisula, ternyata hal itu berimplikasi secara tidak langsung terhadap jumlah santri yang terus meningkat, yaitu jumlah santri pada tahun 1982 sebanyak 2100 santri, kemudian pada tahun 1983 menjadi sekitar 2500 santri, dan pada tahun1985 sebanyak 4000 santri. Pada tahun 1985, per­kembangan santri Darul Ulum mengalami kemerosotan men­jadi sekitar 3100. hal ini barangkali terkait dengan wafatnya Kiai Musta’in Romly yang meninggal pada tahun 1985.

Seperti yang terlihat dalam tabel, kemerosotan itu tidak berlangsung lama. Di bawah kepemimpinan Kiai Muh. As’ad Umar yang dikenal lincah dalam mencari terobosan-terobosan pengembangan kelembagaan, jumlah santri Darul Ulum se­ma­kin menunjukkan *upward trend* sampai tahun 2002 yang men­capai hampir 6000 santri yang merupakan jumlah santri Darul Ulum terbanyak. Perkembangan itu tentu sangat terkait dengan semakin berkembangnya beberapa kelembagaan yang ada di Pesantren Darul Ulum di bawah kepemimpinan Kiai Muh. As’ad Umar.

Banyak lompatan dan kemajuan dalam bidang pengem­bangan kelembagaan pada masa ini, seperti berdirinya SMA Unggulan yang bekerja sama dengan BPPT, berdirinya Akademi Keperawatan dan Kebidanan, serta berdirinya per­guruan tinggi yang lahir tidak lepas dari kemelut yang terjadi di tubuh Universitas Darul Ulum, yaitu UNIPPDU (Uni­ver­sitas Pondok Pesantren Darul Ulum). Semakin me­ro­sot­nya jumlah santri yang belajar di Pesantren Darul Ulum sejak tahun 2002 diduga akibat dari krisis ekonomi yang sema­kin dirasakan masyarakat, sehingga hal itu pada gilirannya berimplikasi pada penurunan minat belajar di Pesantren Darul Ulum yang memang cukup banyak membutuhkan biaya.

Saat ini Pesantren Darul Ulum memiliki sekitar 5000 santri yang belajar di berbagai unit pendidikan di lingkungan Pe­san­tren Darul Ulum. Berikut ini adalah jumlah siswa Darul Ulum dari berbagai unit pendidikan di lingkungan Darul Ulum:

**Tabel: 4**

**Penyebaran Santri Pada Unit Pendidikan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Unit Pendidikan** | **Status** | **Jumlah Siswa** | | **Jml** |
| **Pa** | **Pi** |
| 1 | MIN Darul Ulum | Negeri | 280 | 281 | 561 |
| 2 | MTs N Darul Ulum | Negeri | 217 | 208 | 425 |
| 3 | MTs PK Darul Ulum | Diakui | 71 | 64 | 135 |
| 4 | SMP Darul Ulum 1 | Disamakan | 90 | 41 | 131 |
| 5 | SMP Darul Ulum 2 | Diakui | 40 | 14 | 54 |
| 6 | SMPN 3 Darul Ulum | Negeri | 406 | 468 | 874 |
| 7 | MAN Darul Ulum | Negeri | 199 | 402 | 601 |
| 8 | MAK Darul Ulum | Diakui | 270 | 222 | 492 |
| 9 | SMA Darul Ulum 1 | Disamakan | 343 | 421 | 764 |
| 10 | SMA Darul Ulum 2 (BPPT) | Disamakan | 37 | 147 | 184 |
| 11 | SMA Darul Ulum 3 | Disamakan | 21 | 50 | 71 |
| 12 | SMK Darul Ulum 1 (SMEA) | Diakui | 138 | 0 | 138 |
| 13 | SMK Darul Ulum 2 (STM) | Diakui | 258 | 96 | 354 |
| 14 | SMK Darul Ulum 3 (STM Telkom) | Diakui | 52 | 28 | 80 |
| **Jumlah** | |  | **2.422** | **2.442** | **4.864** |

Tabel di atas menunjukkan bahwa preferensi siswa ter­ha­dap sekolah umum yang menawarkan keilmuan umum ter­nyata lebih besar daripada preferensi terhadap madrasah, ter­utama madrasah keagamaan. Ini juga mencerminkan adanya pergeseran motivasi belajar di Pesantren di kalangan para santri Darul Ulum.

H. Profil Alumni

Alumni Pesantren Darul Ulum telah tersebar ke berbagai penjuru Nusantara. Sebagaimana visi dan misi Pesantren Darul Ulum yang tidak hanya mencetak kiai saja, tetapi juga ahli-ahli keilmuan yang lain, seperti akademisi, intelektual, cendekiawan, birokrat, politisi, TNI/Polri, Pengusaha, dan profesi yang lainnya.

Salah satu alumni Pesantrren Darul Ulum yang bisa di­se­but di sini adalah Prof. Dr. Amin Syukur, M.A.[[207]](#footnote-207) yang meru­pa­kan alumni Pesantren Darul Ulum. Beliau hampir meng­habiskan masa remajanya di Pesantren Darul Ulum. Beliau menamatkan SMP dan SMA di Pondok Pesantren Darul Ulum. Kemudian menempuh Sarjana Muda di Fakultas Ushuluddin juga di Universitas Darul Ulum. Dari sini dapat dipahami bahwa sebagian besar kepribadian dan karakter beliau dicetak dan dipengaruhi oleh kultur dan sistem pendidikan Pesantren Darul Ulum.

Saat ini, Amin Syukur merupakan salah seorang Guru Besar Bidang Tasawuf IAIN Walisongo Semarang dan cen­dekiawan muslim ternama di Jawa Tengah. Untuk aktivitas sosial kemasyarakatan yang beliau geluti selama ini, selain ak­tif sebagai Guru Besar, juga pernah aktif di ICMI Jawa Tengah. Bahkan saat ini beliau adalah Direktur LEMBKOTA (Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Tasawuf).

Dari deskripsi singkat di atas, nampak ada hubungan yang menarik antara latar belakang beliau yang notabe alum­nus Pesantren Darul Ulum dengan bidang keahlian dan karier yang dia geluti saat ini. Nampaknya Amin Syukur banyak dibentuk oleh kultur dan sistem pendidikan ala Pesantren Darul Ulum yang mempunyai ciri khas bidang tarekat dan tasawuf, sehingga hal ini barangkali yang kemudian men­dorong dia untuk menekuni dan menggeluti bidang tasawuf. Hal ini bisa dilihat dari beberapa karya beliau yang banyak ber­bicara tentang tasawuf. Di antara karya-karya beliau adalah:

1. Pengantar Studi Akhlak

2. Pengantar Ilmu Tauhid

3. Pengantar Studi Islam

4. Menggugat Tasawuf

5. Tanggung Jawab Sosial Abad XXI

6. Zuhud di Abad Modern

7. Intelektualisme Tasawuf

8. Tasawuf Kontekstual

9. Tasawuf Bagi Orang Awam

10. Insan Kamil

11. Terapi Hati

12. Zikir Menyembuhkan Kankerku

Meski demikian, satu hal yang perlu dicatat bahwa pres­tasi Amin Syukur tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh sistem pendidikan Pesantren Darul Ulum. Ada banyak faktor yang berperan membentuk karakter dan pilihan bidang keah­lian saat ini. Satu hal lagi yang perlu digarisbawahi di sini adalah keberhasilan Amin Syukur saat ini adalah juga ke­ber­hasilan para Pembaru Pesantren Darul Ulum, seperti Kiai Musta’in Romly, yang berhasil meletakkan pondasi moder­ni­sasi Pesantren Darul Ulum, sehingga pada akhirnya bisa me­ne­lorkan *out put* yang tidak saja mampu membaca kitab kuning, tetapi juga literatur-literatur modern seperti yang di­lakukan oleh Amin Syukur. Seandainya Pesantren Darul Ulum belum bergumul dengan sistem pendidikan modern saat itu, barangkali hampir tidak ada alumni pesantren yang menjadi Guru Besar dan cendekiawan muslim yang mampu meng­inte­grasikan ilmu-ilmu keislaman klasik dengan ilmu-ilmu mo­dern seperti Amin Syukur. Seperti yang tampak dari karya-karya Amin Syukur, seperti buku berjudul *Menggugat Tasawuf* dan *Zuhud di Abad Modern,* nampak kajian tasawuf Amin Syukur lebih diarahkan pada kajian tasawuf kritis.[]

BAB V

IMPLIKASI MODERNISASI PESANTREN

M

odernisasi pesantren terjadi mulai tahun 1960-an, diantaranya pesantren Darul Ulum dalam kepe­mim­pinan Kiai Musta’in Romly. Pesantren yang ini mulai membuka diri atas perubahan sosial dan keberanian melakukan diversifikasi keilmuan dalam tradisi pendidikan pesantren, mengantarkan Pesantren Darul Ulum menjadi besar dan sarat dengan nuansa modernisme. Langkah berani pe­san­tren ini adalah meng­awin­kan tiga tradisi keilmuan yang cen­derung berbeda, yaitu tra­disi pengamalan tarekat, tradisi ke­ilmuan agama, dan tradisi keilmuan sekuler.

Perkawinan tiga tradisi keilmuan tersebut ditandai dengan tetap bertahannya pengajian tarekat, kemudian berdiri pendidikan madrasah yang merupakan embrio pembaruan sistem pendidikan pesantren, sekolah-sekolah umum sebagai pemantapan pembaruan, dan berdirinya universitas sebagai pe­nyempurnaan pembaruan dan sekaligus sebagai bentuk inovasi dan ijtihad baru dalam tradisi pesantren di tengah himpitan modernitas.

140

Dikatakan sebagai inovasi karena memang hal itu me­rupakan sesuatu yang baru. Pada awal berdirinya, fungsi pe­san­tren tidak lebih hanya sekadar sebagai tempat mempelajari ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) seperti pengajian al-Qur’an, tafsir, hadits, fikih, dan pelajaran-pelajaran Islam dasar seperti tata cara wudlu, shalat, dan sebagainya. Metode yang di­gu­na­kan dalam pembelajaran di pesantren juga masih bersifat se­derhana dan tradisional, seperti sorogan dan bandongan. Dengan kata lain, fungsi pesantren pada awalnya hanya ter­ba­tas untuk mencetak ahli-ahli agama (kiai/ulama). Dalam kon­teks ini, wajar jika pesantren selalu diberi label pejoratif se­ba­gai lembaga yang berorientasi “ganjaran” dan “kuburan.”

Seiring proses modernisasi, kualifikasi pendidikan seperti itu memang mendapat tantangan. Dalam banyak hal, alam mo­dern berbeda dengan alam tradisional. Dunia modern me­nuntut kualifikasi manusia yang terampil dan fungsional se­hingga dapat mendukung program-program pembangunan, di samping juga untuk mengikuti perkembangan ilmu penge­ta­huan dan teknologi yang berkembang pesat sering dengan laju modernisasi tersebut. Melihat tantangan yang berbeda dengan dunia masa lalu, maka modernisasi pesantren meru­pa­kan sebuah ikhtiar yang tidak dapat ditunda-tunda lagi agar fungsi pesantren sebagai agen pembaruan dan perubahan sosial sebagaimana terjadi pada awal berdirinya pesantren te­tap lestari dan relevan.

Langkah dan strategi yang diambil oleh pimpinan Pesan­tren Darul Ulum tersebut merupakan wujud respon pesantren dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi sebagai kon­sekuensi dari gelombang modernisasi, terutama ketika peme­rin­tah orde baru menerapkan kebijakan *develop­menta­lis­me* dan modernisasi dalam setiap aspek kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Kecenderungan seperti itu tidak hanya terjadi di Pesantren Darul Ulum. Be­be­rapa Pe­san­tren lainnya juga tergerak untuk melakukan hal yang sama demi melestarikan kontinuitas pesantren di tengah derasnya laju modernisasi yang menjalar ke dalam hampir seluruh as­pek kehidupan.

Namun demikian, di balik kesuksesan dan manfaat besar modernisasi Pesantren Darul Ulum[[208]](#footnote-208) yang booming pada de­kade 1970-an ternyata muncul dampak negatif dari mo­der­ni­sasi dan menyisakan problem yang sangat rumit. Mastuhu men­­jelaskan bahwa kecenderungan modernisasi pesantren se­bagai bentuk respon terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada gilirannya melahirkan “terjadinya per­geseran-pergeseran nilai di pesantren, baik nilai yang me­nyang­kut sumber belajar maupun nilai yang menyangkut penge­lolaan pendidikan.”[[209]](#footnote-209)

Perubahan tata nilai dan sistem kehidupan masyarakat merupakan buah dari sebuah inovasi dan pembaruan yang me­­rupakan sebuah keniscayaan. Tidak ada sesuatu yang stagnan. Menurut Ivor Morrish, “things never just stay as they are, they change whether they improve or decay.”*[[210]](#footnote-210)* Dalam beberapa kondisi tertentu, inovasi dan per­ubahan dapat melahirkan instabilitas *(instability)*. Meski demi­kian, inovasi dan perubahan *(change)* tidak selamanya berim­pli­kasi pada instabilitas, jika perubahan dan inovasi itu dilaku­kan dengan terencana dan terarah. Dalam hal ini, Ivor Morrish menulis:

*Change, however, does not necessarily involve instability, and provided change is gradual and innovations are steadily tested and absorbed, the stability of society and of its institutions is not seriously affected. If, on the other hand, the institutions them­sel­ves are attacked and are the subject of sudden innovational change, then instability can quickly result.[[211]](#footnote-211)*

Dalam konteks Pesantren Darul Ulum, modernisasi dan inovasi pendidikan yang digagas oleh Kiai Musta’in Romly –tokoh kunci yang merupakan pelopor pembaruan pesantren– ternyata berdampak pada perubahan tata nilai dan pola ke­hidupan masyarakat pesantren itu sendiri, seperti: 1) ter­jadi­nya pergeseran tujuan pendidikan pesantren, 2) per­geseran kiblat pendidikan keluarga kiai, 3) pergeseran otoritas kiai, dan 4) pergeseran pola interaksi santri-kiai. Secara rinci dampak modernisasi Pesantren Darul Ulum adalah sebagai berikut:

A. Pergeseran Tujuan Pendidikan Pesantren

Berdirinya sebuah pesantren pada umumnya tidak bisa lepas dari misi dakwah Islam, yaitu sebagai lembaga pe­nyia­ran agama Islam yang bertujuan untuk membekali dan meng­ajar­kan ilmu-ilmu dasar keislaman, seperti membaca al-Qur’an, tata cara wudlu dan shalat, dan mengajarkan kitab kuning yang merupakan khazanah ilmu pengetahuan Islam warisan ulama-ulama klasik.[[212]](#footnote-212) Kitab-kitab kuning itulah yang menjadi kurikulum inti dari tradisi pengajaran Islam di pesantren.

Mayoritas pesantren, pada awal rintisannya menun­juk­kan hal yang sama, yaitu sebagai tempat pembinaan umat dalam bidang agama. Pesan­tren yang pendiriannya bertujuan untuk mengajarkan syariat agama Islam kepada masyarakat sekitar­nya, seperti pengajian al-Qur’an, fikih, dan tasawuf. Dengan de­mikian, Pesantren diklaim se­ba­gai lembaga produksi ulama/kiai yang mem­pu­nyai kuali­fi­kasi keilmuan yang cukup dalam bidang ilmu-ilmu agama, sedangkan orientasi pen­di­dik­an di Pesantren lebih menekankan pada kepentingan ukhra­wi daripada duniawi.

Berangkat dari sejarah awal berdirinya pesantren, dapat dijelaskan bahwa tujuan pendidikan di Pesantren adalah untuk membentuk watak dan kepribadian santri melalui pe­ngamalan tasawuf/tarekat dan pembelajaran ilmu-ilmu agama, seperti al-Qur’an dan fikih. Sedangkan orientasi pen­di­dikan­nya lebih diarahkan pada terwujudnya pesantren sebagai se­buah lembaga *tafaqquh fi al-din*. Pada fase ini, para santri belajar topik-topik keislaman yang kebanyakan merujuk pada kitab-kitab karya ulama tradisional. Topik-topik ke­islam­an itu meliputi bidang tafsir, hadits, bahasa Arab, fikih, dan akhlak.[[213]](#footnote-213) Jadi, diversifikasi keilmuan belum begitu tampak pada fase ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren meng­alami lompatan-lompatan yang telah melewati dunia tra­di­sionalisme menuju modernisme. Bahkan di dunia modern saat ini, dunia pesantren menunjukkan karakteristik yang unik dan melahirkan budaya masyarakat baru yang mempunyai be­berapa karakteristik, antara lain tata hubungan semakin ra­sional, dinamis, kompetitif, barang-barang yang dikonsumsi ber­sifat *massive* dan *standard*, dan juga terspesialisasi.[[214]](#footnote-214) Karena itu, beberapa pengamat mengaku sulit memetakan pesantren. Dawam Rahardjo, misalnya, mengatakan bahwa usaha meme­takan tipologi pesantren yang sedang berkembang di dunia modern hanya berujung pada oversimplifikasi.[[215]](#footnote-215)

Tuntutan modernitas seperti itu tidak bisa hanya mengan­dal­kan institusi pesantren dengan sistem pendidikan tradi­sio­nal­nya. Di tengah tantangan modernitas tersebut, para santri tidak cukup hanya dibekali seperangkat ilmu-ilmu agama te­tapi juga ilmu-ilmu lain yang diperlukan untuk dapat ber­par­ti­si­pasi dalam pembangunan dan mampu menghadapi tan­tang­an zaman. Dasar pemikiran itulah yang melahirkan konsep modernisasi sistem pendidikan Pesantren dan berakibat pada perubahan tujuan pendidikan, sistem pendidikan, manajemen, dan materi pembelajaran.

Berkembangnya pesantren modern berimplikasi terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan (baca: politik pendidikan) yang diambil mengarah pada pen­ting­nya penguasaan ilmu-ilmu keislaman, tetapi pengua­saan ilmu-ilmu umum melalui pen­didikan di madrasah dan sekolah umum harus mendapat prioritas.

Sebagai bentuk tuntutan dan komitmendalam mema­ju­kan pesantren, maka pesantren modern mulai melakukan pe­na­taan kurikulum dan mendirikan lembaga pendidikan yang beragam, seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Me­nengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Mene­ngah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Universitas.

Berkembangnya model pendidikan seperti itu, meng­aki­batkan bergesernya tujuan pendidikan dan berubahnya minat santri dalam menuntut ilmu di pesantren dan menjadikan ku­ri­kulum ilmu-ilmu agama menjadi sedikit dan semakin ter­ping­girkan, atau dengan kata lain pelajaran-pelajaran ke­aga­maan menjadi pelajaran nomor dua dan cenderung hanya sebagai pelengkap yang tidak diberdayakan secara maksimal.

Hal ini berbeda dengan sistem pendidikan sekolah yang diterapkan di pesantren di pagi hari yang cenderung lebih di­urus secara maksimal. Pesantren modern menuntut untuk mem­prioritaskan keberadaan sekolah-sekolah umum dengan mengesampingkan tradisi pengajian kitab kuning adalah ka­rena faktor ekonomi, karena mengurus pendidikan di seko­lah lebih menguntungkan daripada mengurus pengajian kitab kuning di pesantren.[[216]](#footnote-216) Dengan demikian, modernisasi pen­di­dikan pesantren berdampak pada lahirnya sistem kapi­ta­lis­me dankomersialisasi pendidikan yang bertentangan dengan visi misi pendiri pesantren yang sangat ikhlas dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat yang membutuh­kan.

Munculnya sistem pendidikan sekolah di pesantren men­jadi sebab mundurnya pengajaran kitab-kitab klasik, karena dengan sistem sekolah yang mengikuti kurikulum pemerintah mengakibatkan santri hanya mempunyai sedikit waktu untuk mendalami kitab-kitab kuning. Di samping itu, orientasi santri untuk memperoleh sertifikasi ijazah juga mendominasi tujuan belajar dan lebih banyak santri memilih belajar di sekolah umum (SMA) daripada di madrasah agar dapat melanjutkan kuliah atau mencari kerja.[[217]](#footnote-217)

Fenomena santri yang belajar di sekolah umum juga ter­jadi pada santri yang belajar di perguruan tinggi, di mana se­ba­gian santri lebih memilih program studi umum daripada program studi agama. Karena para santri memilih program studi yang sekiranya dapat menjadikan mereka *survive* di tengah derasnya arus kemajuan ilmu pengetahuan dan tek­no­logi yang menuntut penguasaan ilmu-ilmu yang fungsional seperti ekonomi, politik, hukum, keperawatan, pertanian, dan sebagainya. Dalam konteks ini, studi-studi keislaman pada program studi agama menjadi kurang banyak diminati oleh para santri. Sebab, penguasaan ilmu-ilmu keagamaan saja di­rasa kurang untuk bersaing di dunia modern.

Dunia modern menuntut tersedianya SDM yang unggul dalam berbagai bidang yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan, seperti ekonomi, hukum, politik, dan sebagai­nya. Untuk konteks Indonesia, pergeseran pola tujuan pe­san­tren tersebut tidak bisa lepas dari peranan orde baru melalui ke­bijakan *developmentalisme* dan pembangunan yang dikenal­kan oleh Soeharto di awal-awal kekuasaannya.[[218]](#footnote-218) Karena­nya, wajar kalau banyak pesantren pada dekade 1970-an yang me­lakukan sejumlah *adjustment* atau penyesuaian dengan alam modern dengan mendirikan beberapa sekolah-sekolah umum.

Meski demikian, pergeseran tujuan Pesantren Ulum itu tidak berarti menjadikan ciri khas lembaga keagamaan hilang dari tujuan pendirian pesantren. Misi keagamaan tetap di­pertahankan di pesantren. Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan kurikulum keagamaan, baik bagi santri yang belajar di madrasah maupun di sekolah umum. Mereka mem­punyai standar kurikulum keagamaan yang sama. Jadi, semua santri pondok pesantren diharapkan mempunyai standar mi­nimal penguasaan ilmu keagamaan. Dari paket minimal kurikulum keagamaan itulah diharapkan dapat menjadi lan­dasan moral bagi mereka yang memilih bidang studi umum. Bagi mereka yang akan menekuni dan mendalami studi-studi keislaman, maka para santri melanjutkan ke madrasah di mana mereka dapat menerima kurikulum ke­aga­maan yang lebih besar daripada mereka yang belajar di sekolah umum.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa di tengah tuntutan di­ver­­sifikasi keilmuan pesantren seiring dengan proses mo­der­nisasi, pesantren menghadapi dilema tentang arah dan tujuan pendidikan pesantren. Di mana dalam proses modernisasi pen­­didikan di pesantren, tujuan dan arah pendidikan pe­san­tren berada dalam persimpangan jalan yaitu pergeseran arah dan tujuan pendidikan pesantren yang sangat jelas, yaitu dari fokus pengembangan pendidikan pada studi-studi ke­is­la­man klasik bergeser menjadi fokus studi-studi yang menun­jang kebutuhan modernisasi yang bersifat duniawi.

Akibat pergeseran tujuan dan arah pendidikan di pesan­tren ini, maka seringkali studi-studi keislaman menjadi ter­mar­­jinalkan, bahkan posisi studi keagamaan seolah hanya men­­­­jadi pelengkap saja.

B. Pergeseran Orientasi Pendidikan Putra-putri Kiai

Modernisasi pesantren tidak hanya berakibat pada per­ubahan tujuan pendidikan pesantren, tetapi berpengaruh juga pada manajemen dan kepemimpinan pesantren. Salah satu masalah krusial dalam manajemen pesantren adalah suksesi kepemimpinan. Karenanya, meninggalnya kiai senior dalam pesantren menjadi masalah baru penting dalam pesantren itu sendiri, yaitu masalah penggantian pucuk pimpinan pesantren itu sendiri. Hal ini sering terjadi pada pesantren tradisional ataupun modern.

Meskipun pesantren telah menyandang predikat modern, suksesi kepemimpinan pesantren biasanya masih meng­guna­kan tradisi warisan, yaitu penggantian pucuk pimpinan dengan cara penunjukan keturunan kiai yang dianggap paling senior dan dari garis keturunan kiai yang paling dekat.[[219]](#footnote-219) Oleh karena kiai junior yang termasuk golongan “Gus” atau “darah biru” dari keluarga pesantren mempunyai peluang besar dalam memimpin pesantren.[[220]](#footnote-220) Santri senior yang bukan ketu­ru­nan kiai baru bisa menjadi pemimpin pesantren jika santri senior tersebut menikah dengan salah satu putri kiai.[[221]](#footnote-221)

Melihat realitas seperti itu, maka peranan ahli waris/ ke­turunan kiai sangat penting dan besar dalam menjaga kon­ti­nui­tas pesantren sepeninggal ayahnya. Karena itu, pada ge­ne­rasi pertama kiai akan membekali putra-putrinya dengan pengetahuan keagamaan yang cukup melalui pendidikan pe­san­tren. Dengan belajar di pesantren, putra-putra kiai dapat mendalami beberapa kitab kuning yang diklaim sebagai sumber ilmu-ilmu keagamaan sebagai modal utama me­mim­pin pesantren pada nantinya.

Seiring dengan masuknya modernisasi ke dalam pesan­tren, makamodel pendidikan umum banyak didirikan di ling­kungan pesantren, sehingga mempengaruhi tradisi ke­ilmuan di pesantren dan pola pikir para kiai di lingkungan pesantren. Pada era modernisasi pesantren ini, putra-putra kiai tidak lagi dikirim ke pesantren untuk mendalami ilmu agama, tetapi meng­­alihkan pandangan ke perguruan tinggi umum untuk mem­­pelajari ilmu-ilmu sekuler. Sebab, dalam perkem­bangan dan kemajuan pesantren yang modern ini memerlukan tenaga ahli yang mampu menjaga kelangsungan pesantren dari tan­tangan modernisasi.

Kecenderungan pergeseran orientasi pendidikan putra-putri kiai seperti itu mempunyai nilai positif dan negatif. Nilai positifnya adalah para putra kiai lebih siap dan mampu untuk menghadapi tantangan zaman yang memang memerlukan beberapa keahlian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, kebijakan yang diambil oleh pimpinan pesan­tren dalam mengintrodusir tradisi keilmuan umum ke dalam pesantren, maka pergeseran orientasi pendidikan putra-putri kiai merupakan konsekuensi logis dari pergulatan pesantren dengan modernitas.

Kemudian, nilai negatif dari pergeseran orientasi pen­didikan tersebut antara lain lahirnya Gus-Gus (panggilan pu­tra kiai) di lingkungan pesantren yang dangkal kualitas ilmu-ilmu keagamaannya. Sebab para putra kiai lebih banyak mem­pe­lajari ilmu keagamaan secara instan melalui buku-buku ter­jemahan bahasaIndonesia yang lebih praktis daripada belajar dari sumberaslinya. Akibatnya, muncul generasi “Gus” yang kurang mampu membaca dan memahami literatur-literatur kitab klasik berbahasa Arab, meskipun mereka fasih berbicara tentang isu-isu keislaman melalui pendekatan dan sumber be­lajar yang lain, bukan dari literatur klasik berupa kitab-kitab kuning.

Dampak modernisasi tidak hanya berhenti pada per­ge­seran orientasi pendidikan putra-putri kiai, sebab hasil pen­di­dikan putra-putri kiai yang dangkal ilmu agama ini men­jadi­kan pergeseran peran dan fungsi kiai di dalam pesantren. Pe­ran dan fungsi kiai pada fase awal berdirinya pesantren adalah sebagai pembimbing dengan keteladanan dan seka­li­gus se­ba­gai tempat rujukan dan pertanyaan tentang masalah-masalah ke­agamaan, tetapi peran dan fungsi kiai pada fase pembaruan saat ini lebih banyak muncul kiai junior, yang ini lebih cende­rung sebagai seorang manajer dan adminis­tratur pesantren.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dampak mo­der­­­nisasi pesantren berakibat pada pergeseran orientasi pen­didikan putra-putri kiai, dan sekaligus berakibat berubah­nya pada fungsi kiai di pesantren. Sebab, sebagian besar pe­mim­­pin pesantren bukan kiai-kiai lulusan pesantren yang mem­punyai tingkat pengetahuan keislaman yang lebih man­tap, melainkan dipimpin oleh kiai-kiai junior yang bergelar sarjana yang me­ru­pakan produk sekolah-sekolah umum dan perguruan tinggi umum.

C. Fragmentasi Otoritas Kiai

Dalam suatu kehidupan nyata diperlukan suatu tata nilai yang disepakati oleh bersama dan kehadiran seorang pemim­pin yang aktif dinamis sangat diperlukan guna melaku­kan perubahan dan inovasi.[[222]](#footnote-222) Sebab, tanpa tata nilai yang jelas dan pemimpin yang tegas, komunitas tersebut tidak akan bertahan lama. Semakin besar komunitas mayarakat yang dipimpin, maka semakin komplek masalah yang dihadapi dan semakin besar pulapengaruh dan otoritas seorang pemimpin.

Pesantren sebagai suatu sistem komunitas sosial diper­lu­kan seorang pemimpin yang dapat menggerakkan masyarakat pesantren menjadi lebih maju dan berkembang. Kiai sebagai pemimpin pesantren memiliki otoritas sesuai dengan besar kecilnya masyarakat pesantren yang dipimpin. Bahkan, otori­tas kiai di pesantren jauh lebih besar dibanding otoritas se­orang pemimpin di komunitas lain. Sebab, kedalaman ilmu dan karisma yang dimiliki seorang kiai memunculkan sim­pati dan ketaatan masyarakat pesantren yang lebih besar terhadap kiai.[[223]](#footnote-223)

Dalam dunia pesantren, kedudukan kiai sangat kuat dan menjadi kekuatan sentral sebagai pemimpin tunggal di pesan­tren. Kiai di pesantren memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengembangkan pesantren,[[224]](#footnote-224) maka pola hubungan patron-klien antara kiai dengan santri­nya menjadi sebuah tradisi dan pola hubungan yang masih berkembang di beberapa pesantren. Pada aras ini, dapat dipahami bahwa tra­disi dan kultur yang berkembang di pesantren lebih mirip sebuah tradisi feodalisme kerajaan. Sistem suksesi yang dikem­bangkan juga masih mengedepankan pola suksesi tertutup, dalam arti hanya mengandalkan keturunan atau ahli waris kiai sebagai penggantinya.

Pada sebagian pesantren, mulai menerapkan model ke­pe­mim­pinan kolektif,[[225]](#footnote-225) yaitu kepemimpinan pesantren yang terdiri dari beberapa kiai dan pengurusan secara bersama-sama. Sehingga tanggung jawab pesantren tidak dibebankan pada kiai tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab tim secara bersama-sama. Dengan model kepemimpinan yang de­mi­kian, diharapkan kontinuitas dan masa depan pesantren lebih terjamin,[[226]](#footnote-226) karena kepemimpinan pesantren tidak lagi ber­­pusat pada satu atau dua orang saja, melainkan pesantren di­pimpin secara kolektif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Masuknya pola kepemimpinan kolektif di pesantren ter­nya­ta membawa pengaruh—yang semakin kecil—terhadap otoritas kiai, baik di lingkungan pesantren itu sendiri maupun lingkungan masyarakat luas.[[227]](#footnote-227) Sebab, dengan pola kepemim­pinan seperti ini, seorang kiai pesantren tidak lagi berkuasa penuh, dan kebijakan pesantren tidak lagi bersifat mutlak di tangan kiai, melainkan bersifat kolektif ditangani bersama me­nurut pembagian tugas masing-masing.

Penyelenggaraan pendidikan pesantren dengan model ke­pemimpinan kolektif ini, kekuasaan kiai mengalami frag­mentasi yang signifikan.[[228]](#footnote-228) Bahkan, model kepemimpinan ini me­nim­bul­kan beberapa implikasi serius pada hubungan pe­san­tren dengan masyarakat. Sebab, pada kepemimpinan tung­gal, hu­bung­an pesantren dengan masyarakat lebih men­cer­min­kan hubungan patron-klien, yaitu seorang kiai dengan karisma dan otoritasnya yang besar, dapat mem­pengaruhi ma­sya­rakat luas yang menghormatinya. Namun, dengan ke­pemim­pinan kolek­tif, fragmentasi otoritas dan karisma kiai menjadi sangat ke­lihatan, karena hubungan pesantren dengan masyarakat di­pandang sebagai bentuk kelembagaan pesan­tren, bukan hu­bung­an karisma kiai pesantren dengan masya­ra­kat.[[229]](#footnote-229)

Dengan demikian, bentuk kepemimpinan kolektif mem­batasi kewenangan dan otoritas kiai secara individual dalam mengatasnamakan sebuah pesantren, karena pesantren sudah tidak lagi milik kiai perorangan, tetapi pesantren sudah dimi­li­ki beberapa kiai secara kolektif. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan atau pernyataan sikap yang bersifat pribadi tidak boleh mengatasnamakan lembaga pesantren. Disinilah oto­ritas kekuasaan kiai mengalami fragmentasi.

Dinamika pesantren seperti itu sebenarnya membawa nuansa baru bagi tumbuhnya demokrasi di dalam dunia pe­san­­tren. Kalau dilihat dari bentuk kepemimpinan kolektif, bisa dikatakan bahwa pesantren telah mengalami kemajuan yang memungkinkan nilai-nilai demokrasi masuk dalam ma­na­je­men pesantren. Namun, kalau dilihat dari gaya kepemim­pinan kolektif yang diterapkan di pesantren saat ini, maka masih ter­lihat nuansa feodalisme yang cukup kental di dalam struktur kepemimpinan pesantren. Kondisi demikian sesung­guh­nya bukan hal yang menggembirakan dalam kultur de­mokrasi.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa modernisasi yang merambah dalam dunia pesantren membawa pengaruh yang besar terhadap semakin terfragmentasinya kekuasaan dan otoritas kiai, karena sebelum adanya modernisasi, otoritas kiai begitu kuat dan bersifat mutlak dan mengikat pada diri santri. Namun, seiring dengan proses modernisasi yang masuk dalam dunia pesantren, terutama dalam sistem manajemen organisasinya, kekuasaan dan otoritas kiai tidak lagi mengikat dan bersifat mutlak.

Fragmentasi otoritas kiai ini antara lain dipengaruhi oleh sistem pengelolaan pesantren yang modern, kepemimpinan pe­santren yang bersifat kolektif. Sehingga kebijakan dan pengam­bilan keputusan yang menyangkut dinamika pesan­tren tidak lagi tersentral pada seorang figur kiai, melainkan kekuasaan kiai berada di pundak para kiai secara kolektif.

D. Pergeseran Pola Interaksi Santri-Kiai

Pola interaksi yang baik digambarkan seperti model hu­bung­an kekerabatan (persahabatan), yaitu pola hubungan yang didasarkan atas kesadaran yang tinggi bukan dasar ke­ter­­paksaan. Seseorang yang memiliki nilai manfaat lebih banyak kepada orang lain, maka ia akan diambil manfaat oleh temannya dengan perasaan senang. Model interaksi yang de­mi­kian akan melahirkan hubungan yang alamiah dan ber­lang­sung lama, karena komunikasi dijalin atas dasar ketulusan hati atas dasar nilai manfaat yang diterimanya.

Pola interaksi seperti tersebut di atas merupakan bentuk pola interaksi patron-klien. James C. Scott sebagaimana dikutip oleh Sukamto mendefinisikan pola interaksi patron-klien sebagai berikut:

Hubungan timbal balik di antara dua orang dapat diar­ti­kan sebagai sebuah kasus khusus yang melibatkan per­ka­wanan secara luas, dimana individu yang satu memiliki status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (patron), yang meng­guna­kan pengaruh dan sumber-sumber yang dimiliki­nya untuk mem­berikan perlindungan atau keuntungan-keun­tungan kepada individu lain yang memiliki status lebih rendah (klien), dalam hal ini klien mempunyai kewajiban membalas dengan mem­beri­kan dukungan dan bantuan secara umum, termasuk pe­layanan-pelayanan pribadi kepada patron.[[230]](#footnote-230)

Dengan demikian, dalam konteks tradisi pesantren, kiai dengan karisma dan kedalaman ilmunya menduduki sebagai *patron*, sedangkan santri yang memiliki ketaatan yang tinggi dan menyadari manfaatnya ilmu dari kiai menempati sebagai *klien*. Pola hubungan inilah yang kemudian melahirkan pola hubungan yang tertutup dan vertikal. Satu pihak lebih ber­kuasa daripada pihak lain. Pola hubungan patron-klien an­tara kiai-santri barangkali terinspirasi oleh ungkapan Ali bin Abi Thalib: “Aku rela menjadi hamba sahaya guruku yang telah mengajariku satu huruf, terserah padanya, aku mau di­jual, dimerdekakan, atau tetap dijadikan hamba sahaya.”[[231]](#footnote-231)

Kedudukan kiai sebagai patron di atas sangat erat kaitan­nya dengan karisma kiai yang lahir berkat beberapa kelebihan dan kualifikasi keilmuan kiai, sehingga hal ini menyebabkan hubungan dependensi antara kiai sebagai pihak yang mem­punyai kekuasaan dan santri yang membutuhkan kehadiran kiai di tengah-tengah komunitas pesantren. Dari sinilah, ka­ris­ma seorang kiai lahir yang merupakan patron atas santri se­ba­gai klien, sehingga kiai memiliki otoritas dan kekuasaan yang besar dalam mempengaruhi dan mewarnai kehidupan pe­santren,[[232]](#footnote-232) sehingga kiai memiliki pengaruh yang besar se­ba­gai pemegang otoritas tertinggi dalam pesantren. Dalam kon­teks ini, pola hubungan antara kiai dan santrinya mencermin­kan pola hubungan patron-klien, bukan sebagai pola hu­bungan yang lebih impersonal-rasional.

Bentuk distorsi hubungan santri-kiai akibat fragmentasi otoritas kiai setidaknya dapat dilihat dari pola hubungan kiai-santri yang jauh dari etika dasar pesantren, yaitu melemahnya etika dan sopan santun santri kepada kiai,[[233]](#footnote-233) dan merosotnya wibawa kiai dihadapan santri.[[234]](#footnote-234) Setidaknya, ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya fragmentasi otoritas kiai, yaitu: (1) lahirnya generasi santri modern dan budaya baru di pe­san­tren, (2) meningkatnya jumlah kelas menengah muslim *(middle class Muslims)* yang lebih terdidik, dan (3) meluasnya wilayah operasi negara di balik upaya peningkatan kualitas kehidupan umat Islam.

*Pertama,* lahirnya generasi santri modern, yaitu santri yang tidak hanya *mondok* untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman, tetapi mereka juga belajar ilmu-ilmu lain di sekolah-sekolah umum yang ada di komplek pesantren tempat mereka tinggal. Generasi santri modern sangat berbeda dengan santri tra­di­sional, sebab sumber-sumber belajar dan tradisi yang dikenal­kan di sekolah umum lebih variatif bagi santri modern. Semen­tara, santri tradisional cenderung monolit dalam hal sumber be­lajarnya, yaitu mengandalkan sumber belajar dari kitab-kitab kuning melalui kiai-kiai mereka. Perbedaan sumber be­lajar ini membawa dampak yang cukup serius dalam pola hu­bungan santri terhadap kiai, yaitu munculnya sikap kritis, ra­sional, dan komunikasi timbal balik (bukan searah).

Salah satu bentuk fragmentasi otoritas kiai yang di­aki­bat­kan oleh lahirnya santri modern adalah munculnya sikap kritis para santri terhadap kebijakan. Bahkan sikap kritis santri mo­dern sampai dalam bentuk demonstrasi, kritik baik disam­pai­kan langsung, maupun tulisan-tulisan di

Munculnya santri-santri modern di pesantren akan mela­hir­kan generasi neo-santri modern. Karena para santri modern tidak hanya diberikan sumber belajar yang monolitik dari kiai saja, tetapi juga dari sumber-sumber alternatif keislaman selain kitab kuning, seperti buku-buku berbahasa Indonesia ataupun terjemahan bahasa Indonesia yang ditulis oleh para sarjana dalam negeri seperti bukunya Harun Nasution, Munawir Sjadzali, Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Kun­to­wijoyo, dan lain-lain- maupun para sarjana luar negeri –seperti karya Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, Muhammad Arkoun, Nashr Hamid Abu Zayd, dan Shahrur.

Seiring dengan semakin mudahnyamengakses sumber-sumber belajar tersebut, para santri modern mulai menemukan aneka sumber belajar alternatif di luar kitab kuning melalui kiai. Kecenderungan seperti itu jelas tidak bisa lepas dari kehadiran universitas yang memungkinkan para mahasiswa mengakses beberapa literatur-literatur tersebut secara lebih bebas. Mastuhu melaporkan bahwa sejak 1970-an telah banyak buku agama Islam yang berisi pembaruan pemikiran Islam yang ditulis dalam bahasa Indonesia masuk ke dalam pesan­tren dan dipelajari oleh santri dan kiai-kiai muda di pesan­tren.[[235]](#footnote-235) Hal ini semua membawa dampak yang luas, yang meng­­­getarkan seluruh jaringan kehidupan pesantren, sehing­ga lebih terbuka dengan sistem lain di luar dirinya.

Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya pergeseran pola interaksi santri-kiai, adalah meningkatnya jumlah kelas menengah muslim *(middle class Muslims)* yang lebih terdidik. Yaitu, lahirnya generasi muda terdidik dari keluarga pesantren yang merupakan lulusan perguruan tinggi, baik dalam mau­pun luar negeri, kini jumlahnya makin meningkat. Munculnya intelektual-intelektual muda, baik yang sekular maupun yang religius di kalangan NU maupun pesantren ini tidak hanya mem­buat posisi kiai sebagai legitimator menjadi tersaingi, tetapi juga membuat kredibilitas dan otoritas kiai mulai dipertanyakan.[[236]](#footnote-236)

Faktor ketiga adalah meluasnya wilayah operasi negara di balik upaya peningkatan kualitas kehidupan umat Islam. Dalam hal ini, negara sangat peduli dengan ketidaksetaraan (*inequality*) dalam praktek kehidupan masyarakat yang terlibat dalam berbagai hal, dimana masalah itu sebelumnya berada di bawah otoritas dan wilayah kekuasaan kiai. Misalnya, masalah hukum nikah, waris, dan poligami yang sebenarnya masuk wilayah hukum Islam, sehingga para kiai pesantren memiliki otoritas untuk memberikan jawaban atas masalah tersebut, karena menyangkut masalah hukum Islam yang sesuai dengan dalil-dalil al-Qur’an, al-Hadits, maupun sumber li­te­ra­tur klasik. Namun, karena masalah nikah, waris, dan poli­gami tidak hanya menyangkut masalah hukum Islam saja, me­lain­kan berhubungan dengan masalah administrasi pemerin­tahan, maka negara ikut terlibat dalam wilayah otoritas kiai dalam menentukan hukum.

Faktor-faktor tersebut melahirkan kalangan Islam muda yang kritis terhadap kepemimpinan kiai, juga memberikan alternatif mengenai adanya bentuk-bentuk kepemimpinan yang lain, sehingga posisi dan kepemimpinan karismatik kiai kemudian berubah secara tak terelakkan. Termasuk pola inte­raksi kiai-santri yang mengalami perubahan dari pola interaksi patron-klien, menjadihubungan yang rasial antara kiai-santri.

Dari pembahasan implikasi modernisasi pesantren ini, setidaknya dapat dikemukakan beberapa karakteristik pesan­tren tradisional dan pesantren modern yang dalam banyak hal me­miliki perbedaan cukup signifikan. Perbedaan itu bisa di­lihat dari tujuan dan orientasi pendidikan, bentuk pen­di­dikan, pola kepemimpinan, otoritas kiai, pola interaksi santri-kiai, metode pembelajaran, sumber belajar, kualifikasi, dan kiblat pendidikan para ahli waris kiai.

Lebih rinci tentang perbedaan-perbedaan itu adalah se­bagai berikut:

Tabel: 5

**Perbandingan Pesantren Tradisional dan Modern**

| **Aspek** | **Pesantren Tradisional** | **Pesantren Modern** |
| --- | --- | --- |
| Tujuan pendidikan | Mencetak ahli ilmu agama | Mencetak manusia unggul dalam IPTEK |
| Orientasi pendidikan | Ukhrawi | Duniawi dan sedikit ukhrawi |
| Bentuk pendidikan | Pengajian al-Qur’an dan kitab kuning di surau | Sekolah umum danmadrasah |
| Pola kepemimpinan | Kepemimpinan tunggal kiai | Kepemimpinan kolektif berbentuk yayasan |
| Otoritas kiai | Sangat dominan | Terfragmentasi |
| Pola interaksi santri-kiai | Hubungan patron-klien | Rasional |
| Metode pembelajaran | Sorogan dan wetonan | Sistem klasikal |
| Sumber belajar | Kitab kuning | Buku-buku terjemahan non kitab kuning |
| Kualifikasi | Tanpa ijazah formal | Dengan ijazah formal |
| Orientasi pendidikan putra-putri kiai | Pondok pesantren | Universitas dan IAIN |

BAB VI

PROBLEM PASCAMODERNISASI PESANTREN

M

odernisasi Pesantren akan membawa perubahan yang positif bagi kehidupan masyarakat di ling­kung­annya, seperti perkembangan sosial budaya, sosial ekonomi, dan kemajuan ilmu pengatahuan teknologi.[[237]](#footnote-237) Tetapi di balik keberhasilan modernisasi tersebut muncul ma­salah baru yang dapat mengganggu keberadaan pesantren ini.

Problem baru yang muncul di pesantren yang tergolong mo­dern adalah semakin terbukanya organisasi pesantren dengan kehadiran tokoh yang benar-benar kompeten dan pe­duli dalam pengem­bangan pendidikan. Demikian juga kema­juan ilmu penge­tahun, semakin memperkuat tradisi keilmuan pesantren dan memancarkan sikap toleran dalam menghadapi perbe­da­an ide atau gagasan pengembangan pendidikan.

Akan tetapi, transformasi pesantren akan memunculkan problem-problem baru, terutama perdebatan-perdebatan me­nge­nai tujuan awal ber­diri­nya pesan­tren dan prinsip mo­der­nisasi pendidikan.

A. Sentralisasi Kekuasaan

Modernisasi pesantren berpotensi terhadap munculnya potensi konflik di lembaga pesantren. Hal tersebut biasanya ter­jadi setelah tidak adanya sosok atau karismatiknya *kiai sepuh.* Seorang *kiai sepuh* yang mempunyai kewibawaan dan karismatik mempunyai *patron* yang menjadi tokoh kunci di balik kesuksesan modernisasi pendidikan Islam pesantren. Se­hingga mampu meminimalisir potensi konflik pasca mo­dernisasi pesantren.

Ada banyak faktor yang mendorong ketokohan kiai atau pemimpin pesantren begi­tu piawai dan berhasil mengantarkan sebuah pesantren menjadi pesantren modern yang akomo­datif terhadap moder­nitas.

*Pertama,* bahwa seorang Kiai adalah sosok karismatik dan sekaligus tokoh masyarakat dan pemilik pesantren itu sen­diri. Karena itulah wajar jika karisma yang dimiliki oleh kiai mam­pu meredam berbagai konflik terhadap kelompok yang yang setuju dan tidak setuju dengan modernisasi di dalam pe­san­tren yang juga berimbas terhadap tata kelola, kurikulum dan kultur di pesantren.

*Kedua*, keberhasilan seorang kiai dalam memodernisasi pesantren tidak semata-mata berkat karisma yang bersumber dari keberadaannya sebagai pemimpin pesantren, melainkan karisma tersebut juga lahir karena kecerdasan dan keilmuan yang dimiliki oleh kiai.

*Ketiga*, keberhasilan modernisasi pesantren tidak bisa lepas dari sepak terjang dan kepiawaian seorang kiai dalam mem­berikan pemahaman alternatif terhadap politik Islam.

B. Timbulnya Konflik Pascamodernisasi Pesantren

Ketika pesantren telah berkembang pesat,potensi konflik akan muncul di lingkungan pesantren. Sebab, meninggalnya sosok kiai yang karismatik pada gilirannya menciptakan goncangan-goncangan dalam suksesi kepemimpinan di pe­santren. Sehingga, sentralisasi kekuasaan pesantren yang di­bangun oleh kiai pertama, pada akhirnya menyisakan problem-problem baru bagi generasi penerusnya, terutamaten­tang suksesi kepemimpinan. Problem yang paling besar adalah terjadinya perebutan kekuasaan di dalam keluarga.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mun­cul­nya konflik di pesantren. Namun, faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi atau *collective fear of future.* Hal ini ter­jadi karena sebagai hasil modernisasi pesantren adalah ber­dirinya beberapa lembaga pendidikan, baik berupa mad­rasah dan sekolah umum maupun universitas yang mem­pu­nyai ma­hasiswa dan fasilitas yang cukup. Dalam perspektif bisnis, hal ini sewajarnya menjadi lahan ekonomi yang menggiurkan. Aki­bat­nya banyak pihak, terutama pihak yang mengklaim lebih berhak dari kalangan keturunan pendiri pesantren, men­coba berebut kekuasaan di pesantren tersebut. Mereka saling berebut pengaruh kekuasaan. Akibatnya, pihak yang merasa pa­ling berhak tersebut mencoba berjuang semaksimal mung­kin agar kekuasaan tidak jatuh ke tangan orang lain. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem mana­je­men tradisional-feodal yang masih dibangun di tengah lem­baga pendidikan modern. Ini juga akibat sistem mana­jemen yang dibangun masih me­ngedepankan garis keturunan yang bertentangan dengan sis­tem manajemen modern yang mem­berikan ruang bagi pihak lain untuk ikut dalam sistem manajemen tersebut.

C. Implikasi bagi Pengembangan Pesantren

Sebenarnya, faktor pemicu konflik yang terjadi di pesan­tren bukanlah akibat modernisasi pesantren, tetapi hubungan modernisasi Pesantren dengan konflik yang terjadi hanya bersifat korelatif, bukan kausatif. Artinya, konflik yang terjadi tidak disebabkan adanya modernisasi, tetapi ada faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya konflik berkepanjangan di pesantren tersebut, yaitu faktor ekonomi dan politis.

Problem yang terjadi di pesantren pasca­mo­der­nisasi mem­­­punyai pelajaran yang baik bagi strategi pengem­bangan pesantren. Sistem manajemen dan pengem­bangan pesantren seharusnya tidak lagi didasarkan pada sistem manajemen ber­ba­sis keturunan, tetapi seharusnya didasarkan pada profe­sio­na­­lisme. Hal ini perlu dilakukan agar kontinuitas pesantren dapat terjaga, di samping untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan para ahli waris pendiri pesantren, sehingga para ahli waris tidak secara otomatis mengklaim bahwa mereka yang paling berhak atas peninggalan kekuasaan keturunan di atasnya.

Karena itulah, menjadi sebuah keniscayaan dan sesuatu yang urgen pesantren didirikan di bawah yayasan yang ber­badan hukum, sehingga sistem manajemen dan kaderisasi di pesantren tersebut tidak akan mengalami goncangan yang berarti saat suksesi kepemimpinan terjadi. Dengan strategi ini, keberadaan pesantren akan semakin berkembang pesat, kare­na pesantren tidak hanya dimiliki oleh para ahli waris pe­san­tren, tetapi milik pihak-pihak yang mempunyai komit­men dan dedikasi yang tinggi dalam mengabdikan diri dalam pengem­bangan pesantren, meski bukan dari keturunan ahli waris pesantren.[]

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkan sebagai pedoman hidup ke­se­harian. Pesantren telah hidup sejak ratusan tahun yang lalu, serta telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat muslim. Pesantren telah diakui sebagai lem­baga pendidikan yang telah ikut mencerdaskan kehi­dup­an bangsa. Pada masa kolonialisme berlangsung, pesan­tren merupakan lembaga pendidikan agama yang sangat berjasa bagi masyarakat dalam mencerahkan dunia pen­didikan. Tidak sedikit pemimpin bang­sa yang ikut mem­perjuangkan kemerdekaan bangsa ini.

2. Modernisasi pesantren ternyata tidak hanya meng­hasil­kan kondisi yang memungkinkan *(necessary condition)* untuk lahirnya santri modern yang siap menopang pem­bangunan, tetapi ternyata berdampak pada bergesernya nilai-nilai dasar dan karakter pesantren itu sendiri. Ada empat pergeseran nilai yang terjadi akibat modernisasi pesantren, 1) terjadinya pergeseran tujuan pendidikan pesantren, 2) pergeseran orien­ta­si pendidikan keluarga kiai, 3) pergeseran otoritas kiai, 4) pergeseran pola in­terak­si santri-kiai.

3. Problem yang muncul setelah berubah menjadi lembaga pendidikan modern adalah munculnya konflik kepemim­pinan di pesantren. Pada awalnya, konflik itu hanya meli­bat­kan keluarga internal, tetapi dalam perkembangan se­lan­jutnya, konflik tersebut melebar dengan melibatkan kubu eksternal pro pembaruan yang didominasi oleh non “darah biru” kiai yang berhadapan dengan kubu pro-sta­tus quo yang didominasi oleh kubu “darah biru” kiai.

B. Penutup

Modernisasi pendidikan pesantren merupakan jawaban pe­santren terhadap perubahan zaman dan kebutuhan ma­sya­rakat. Dalam konteks ini, pesantren telah melakukan per­ubah­an-perubahan yang dalam skala terbatas untuk menjamin keber­langsungan dan ketahanan pendidikan yang diseleng­gara­kannya. Perubahan-perubahan di atas menyentuh aspek-aspek kurikulum (materi pembelajaran), metode, dan sistem eva­luasi.

Hal yang sebaiknya dilakukan adalah bahwa pesantren se­bagai lembaga pendidikan yang secara istiqamah menjaga nilai-nilai dan ajaran Islam, tetap mempertahankan sistem pen­di­dikan tradisional yang menekankan pada penguasaan kitab-kitab klasik, dan pada sisi lain tetap melakukan inovasi pen­didikan yang dilaksanakan.[]

DAFTAR PUSTAKA

A. Qodry Azizy, *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

A. Soenarjo (Ketua Tim), *al-Qur’an dan Terjemahnya*.

Abdul Moqsith Ghazali, “Upaya Mereformasi Pendidikan Pesantren,” dalam *Mozaik Pesantren*, Jakarta: 2005.

Abdurrahman Mas’ud, *The Pesantren Architects and Their Socio-Religious Teaching (1850-1950*), Disertasi Doktor di UCLA Tahun 1997.

Abdurrahman Wahid, “Pesantren sebagai Subkultur”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaruan,* Jakarta: LP3ES, 1988.

Agus Salim, *Perubahan Sosial, Sketsa, dan Refleksi Metodologi: Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).

Ahmad Zaini, *KH. Wahid Hasyim Pembaharu Pendidikan Islam dan Pejuang Kemerdekaan*, Jakarta: Yayasan Wahid Hasyim, FIS, 2003.

Akbar S. Akmed, *Postmodernisme and Islam, Predicament and Promise,* London: Routledge, 1992.

Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial,* Bandung: Mizan, 1994.

Anton M. Moeliono *et. al.* (ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Astrid S. Susanto-Sunarto, *Masyarakat Indonesia Memasuki Abad XXI* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998).

B.J. Cohen, *Theory and Problem of Introduction to Sociology* (New York: MacGrow-Hill, 1979).

Bronislaw Malinowski*, The Dynamic of Culture Change* (New Haven: Yale University Press, 1961).

Clifford Geertz, *The Religion of Java*, terj. Aswab Mahasin,Jakarta: Pustaka Jaya, 1983*.*

Dawam Rahardjo, *“The Kiai, the Pesantren, and the Village: A Preliminary Sketch”,* dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique, dan Yasmin Hussain (ed.), *Readings on Islam in Southeast Asia,* Singapore: Institue of Southeast Asian Studies, 1985.

-----------, *Pergulatan Dunia Pesantren; Membangun dari Bawah*, Jakarta: P3M, 1985.

Fahry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru, Rekontruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru,* Bandung : Mizan, 1990.

Fazlur Rahman, *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago-London: The University of Chicago Press, 1982).

Fuad Jabali, *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.

Hadimulyo, “Dua Pesantren Dua Wajah Budaya”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah* (Jakarta: LP3ES, 1985).

Hamzah Ya’qub, *Etos Kerja Islami: Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syariat Islam,* Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 2003.

HAR Gibb, *Modern Trend in Islam* (New York: Octagon Books, 1978).

Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial,* terj. Umar Basalim (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987).

Ivor Morrish, *Aspects of Educational Change,* London: George Allen & Unwin, 1978.

James MacGregor Burns, *Leadership*, New York: Row Publishers, 1978.

Joachim Wach, *Sociology of Religion* (Chicago: University of Chicago Press, 1971).

Josept S.Szyliowies,*Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam*, Dr. Ahmad Djainuri, MA (ed.), Surabaya: Al-Ikhlas, 2001.

*Jurnal Edukasi*, Volume 5, Nomor 4, Desember 2007.

Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern,* Jakarta: LP3ES, 1986.

-----------, *Beberapa Aspek Agama di Indonesia Abad XIX,* Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Komaruddin Hidayat, “Pesantren dan Elit Desa,” dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren*.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991).

M. Amin Abdullah, “Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Islam”, dalam M. Anies dkk. (ed.), *Religiusitas Iptek: Rekonstruksi Pen­didikan dan Tradisi Pesantren,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

M. Dawam Rahardjo, (ed.), *Pesantren dan Pembaruan,* Jakarta, LP3ES, 1995.

-----------, “Pembangunan Masyarakat dalam Perspektif Pesan­tren”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah,* Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Masyarakat Pesantren – P3M, 1985.

-----------, “The Kiai, the Pesantren, and the Village: A Preliminary Sketch,” dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique, dan Yasmin Hussain (ed.), *Readings on Islam in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985).

M. Munandar Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

M.M. Billah, “Pikiran Awal Pengembangan Pesantren”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren,* Jakarta: P3M.

Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendjojo, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat - P3M, 1986.

Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999).

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren,* Jakarta: INIS, 1994.

Mohtar Mas’oed, *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta, UII Press, 1997.

Muhammad Ansorudin Sidik, *Pengembangan Wawasan IPTEK Pondok Pesantren,* pengt. B.J. Habibie (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

Mujammil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2005.

Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997.

Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Per­ja­lanan,* Jakarta: Paramadina, 1997.

Prasodjo S, et all, *Profil Pesantren al-Falah dan Delapan Pesantren di Bogor*, Jakarta; LP3ES, 1974.

Rahman, *Kepemimpinan dalam Konteks Pemberdayaan Kepala Sekolah*, Bandung:Alqaprin, 2005.

S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan,* cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, ed. Mawardi Ja’far (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999).

Soekamto, *Pendidikan Muhammadiyah Meyongsong Era Industri dalam Seputar Percakapan Pendidikan dalamMuham­madiyah,* Yogyakarta: Pustaka SM, 1994.

-----------, *Sosiologi: Suatu Pengantar*(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999).

-----------,*Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren,* Jakarta: LP3ES, 1999.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999).

Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad IX,* Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

*Study Islamica,* Vol. III No. 2, Tahun 1996.

Sumarsono Mestoko, *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Uday Mashudi Abdurahman, “Metamorfosa Pesantren: Tradisi, Modernitas, dan Postradisionalisme,” dalam *Mozaik Pesantren,* Jakata: 2005.

Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Utami Munandar, *Creativity and Education*, Jakarta: UI, 1977.

Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan,* cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

Zamachsyari Dhofier, “Relevansi Pesantren dan Pengembangan Ilmu di Masa Mendatang.” dalam *Majalah Pesantren,* Jakarta: P3M, Desember 2004.

-----------, “Pesantren and the Development of Islam in the New Order,” dalam A.G. Muhaimin (ed.), *Zamakhsyari Dhofier on: Tradition and Change In Indonesian Islamic Education*(Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 1995.

-----------,*Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai,* Jakarta: LP3ES, 1985.

-----------,*Tradition & Change in Indonesian Islamic Education* dalam A.G. Muhaimin (ed.) (Jakarta: Office of Religious Research and Development Ministry of Religious Affairs the Republic of Indonesia, 1995).

Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial,* terj. Butche B. Soendjojo, ed. Siregar (Jakarta: P3M, 1996.

TENTANG PENULIS

**Dr. H. A. Umar, MA.** lahir di Grobogan, 9 Januari 1964. Menyelesaikan pen­didikan di MI Miftahul Islam di Desa kelahirannya, kemudian melan­jutkan pendidikan di MTs dan MA NU Demak. Pria yang meng­ha­biskan waktu belajar di madrasah ini lulus S.1 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (1990), Program Pascasarjana (S.2) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1993), dan Program Doktor (S.3) dise­le­sai­­kan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). Secara ber­turut-turut penulis me­niti karir sebagai dosen pada IAIN Walisongo Semarang (1994-2005), ke­mudian men­jabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabu­pa­ten Grobogan (2005-2008), Kota Salatiga (2008-2010), dan Kabu­pa­ten Pekalongan (mulai 2010- sekarang).

Kepedulian penulis terhadap dunia pendidikan dibuk­ti­kan dengan pengalamannya mengajar di beberapa sekolah, seperti SMP Hasanuddin 6 Semarang, MTs Sabilurrahman, dan MA YAUMI Gubug di Grobogan. Disamping itu penulis juga mengajar di beberapa Perguruan Tinggi, seperti IAIN Wali­songo, Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, STAIN Kudus dan Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Wonosobo (sekarang UNSIQ), serta mengikuti *short course on education manajemen* di Edit Cowan University (ECU), Pert, Western Australia pada 2004).

Suami dari Ir. Tri Hartini dan ayah dari dua putri, Isyna Izzal Muna dan Marwa Nailul Muna ini juga sempat menjadi Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Wono­sobo dan Ketua Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin IAIN Wali­songo, saat ini tercatat sebagai pengajar pada Program Pascasarjana (S-2) Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang. Di luar itu, pria humoris ini pernah dan atau masih aktif pada beberapa organisasi seperti PMII, IPNU, LP Maarif NU Jawa Tengah, MUI Jawa Tengah, GP Ansor Jawa Tengah, PCNU Grobogan, dan LDNU Kota Semarang. Pemikiran mengenai pendidikan dan keagamaan dipubli­kasi­kan dalam berbagai bentuk atikel, ko­lom, paper, laporan pe­ne­litian dan buku. Buku yang telah diterbitkan antara lain: *Revolusi Madrasah, Mozaik “Perjuangan” Tiga Kota* (April, 2014), *Madrasah Transformatif, Best Practices “Pengelolaan Madrasah” di Kota Santri* (Agustus 2015).

Penulis sangat terbuka untuk melakukan diskusi dengan siapa saja, dan jika ingin menghubunginya, silahkan meng­hu­bungi­nya lewat email: ahmad.umar024@gmail.com atau di nomor HP. 085225263359.[]

1. Modernisasi yang memiliki bentuk kata dasar “modern” dimak­sud­kan sebagai proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai tuntutan masa kini. Lihat Anton M. Moeliono *et. al.* (ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 589. Sedangkan modernisasi itu sendiri merupakan suatu proses yang lingkup dan intensitasnya melibatkan tranformasi masyarakat yang kontinyu dan mampu membangkitkan segala bentuk perubahan yang terjadi. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 66. [↑](#footnote-ref-2)
3. Modernisasi pesantren dimaksudkan dengan kemampuan pesantren menjawab tantangan yang diakibatkan oleh kehidupan modern. Apabila pe­san­tren tidak mampu meresponnya dengan baik, maka lembaga ­pendidikan ini biasanya dikualifikasikan sebagai lembaga pendidikan yang menunjukkan sifat ketinggalan zaman, seperti *kolot* dan konservatif. Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 88. [↑](#footnote-ref-3)
4. Karena itu, banyak peneliti dan penulis yang mengkaji pesantren dari aspek tradisional dan konservatifnya. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradition & Change in Indonesian Islamic Education* dalam A.G. Muhaimin (ed.) (Jakarta: Office of Religious Research and Development Ministry of Religious Affairs the Republic of Indonesia, 1995), hlm. 87. Namun sebenarnya istilah tradisional tidak menunjukkan konservatif. “*Tradisitional” is not necessarily intellectually conservative.* Lihat Abdurrahman Mas’ud, *The Pesantren Architects and Their Socio-Religious Teaching (1850-1950),* Disertasi Doktor di UCLA Tahun 1997, hlm. 258. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Dawam Rahardjo, “Pembangunan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Mem­bangun dari Bawah* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Masyarakat Pesantren – P3M, 1985), hlm. vii-xxii. [↑](#footnote-ref-5)
6. Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendjojo (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat - P3M, 1986), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Karena pengaruh pesantren yang begitu kuat sehingga lembaga ini dinyatakan sebagai subkultur dari masyarakat. Lihat Abdurrahman Wahid, “Pesantren sebagai Subkultur”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaruan* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 39-60. [↑](#footnote-ref-7)
8. Maksud itu sempat direalisasikan murid Dewantoro, Ki Sarino Mangun­pranoto, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), berupa Sekolah Farming di Ungaran, Jawa Tengah. Lihat M. Dawam Rahardjo, “Pem­bangunan Masyarakat”, hlm. viii. Adapun keunikan pesantren ditegaskan dalam pernyataan: “Pondok Pesantren *is a unique educational institution for Islamic studies in Indonesia*”. Lihat Abdurrahman Mas’ud, “Why the Pesantrenin Indonesia Remains Unique and Stronger”, dalam Ima-ae Alee dkk. (ed.), *Islamic Studies in Asean: History, Approaches and Future Trends – Presentations of an International Seminar* (Thailand: College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus, 2000), hlm. 191-201. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdurrahman Mas’ud, “Why the Pesantren”*,* hlm. 198. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dawam Rahardjo. “The Kiai, the Pesantren, and the Village: A Preliminary Sketch”, dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique, dan Yasmin Hussain (ed.), *Readings on Islam in Southeast Asia* (Singapore: Institue of Southeast Asian Studies, 1985), hlm. 246. [↑](#footnote-ref-10)
11. M.M. Billah, “Pikiran Awal Pengembangan Pesantren”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren* (Jakarta: P3M), hlm. 289-98. [↑](#footnote-ref-11)
12. Azyumardi Azra, “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan”, dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. ix. [↑](#footnote-ref-12)
13. K.H. A. Wahid Hasjim, *Kedudukan Agama dalam Kementerian Agama*, (Penyiaran Kementerian Agama No. 12 Tahun 1951), sebagaimana dikutip Suyoto, “Pesantren dalam Pendidikan Nasional”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaruan*, hlm. 73. [↑](#footnote-ref-13)
14. A. Mukti Ali, *Pembaruan Sistem Pendidikan pada Pondok Pesantren dalam Rangka Merealisir Tujuan Pendidikan Nasional*, (Prasaran Seminar Pustaka pada Perguruan Agama, 31 Mei – 4 Juni 1974). Sebagaimana dikutip Suyoto, “Pesantren dalam Pendidikan Nasional”, hlm. 73. [↑](#footnote-ref-14)
15. Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 215. [↑](#footnote-ref-15)
16. Selain itu, juga dipertanyakan pesantren yang mengembangkan sistem pendidikan umum dan keterampilan untuk disebut sebagai pesantren. Sudirman Tebba, “Dilema Pesantren: Belenggu Politik dan Pembaruan Sosial”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren*, hal. 284; M. Dawam Rahardjo, “Kehidupan Pemuda Santri: Penglihatan dari Jendela Pesantren di Pabelan” dalam Taufik Abdullah, *Pemuda dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1974), hlm. 107. [↑](#footnote-ref-16)
17. Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-17)
18. Selain itu, pesantren juga menjadi rujukan moral bagi kehidupan masyarakat umum. Masyarakat umum memandang pesantren sebagai ko­mu­nitas khusus yang ideal terutama dalam bidang kehidupan moral keagamaan. Sehingga setiap pesantren tampak memiliki semacam daerah pengaruh sendiri-sendiri, yaitu komunitas-komunitas dalam masyarakat sesuai dengan aliran yang dibawakannya. Lihat Mastuhu, *Dinamika Sistem*, hlm. 59-60 [↑](#footnote-ref-18)
19. Mastuhu, *Dinamika Sistem*, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-19)
20. Namun realitas ini kurang mendapatkan perhatian sehingga menjadi lahan baru bagi para peneliti. Maka tranformasi, perkembangan dan mo­der­ni­sa­si, yang sadar atau tidak mengikuti contoh dari masyarakat industri di Barat, diproyeksikan pada negara-negara berkembang dengan dalih untuk penye­lidikan. Lihat Ziemek, *Pesantren,* hlm. 8. [↑](#footnote-ref-20)
21. Soetjipto Wirosardjono, “Pesantren dan Peranan Islam di Indonesia”, dalam Oepen dan Karcher (ed.), *Dinamika Pesantren*, hlm. 82. Lihat juga M. Nashihin Hasan, “Karakter dan Fungsi Pesantren”, dalam Oepen dan Karcher (ed.), *Dinamika Pesantren* , hlm. 110-111. [↑](#footnote-ref-21)
22. Richard G. Kraince,“The Modernization of the National Institute for Islamic Studies (IAIN) and the Advancement ofMuslim Intellectualism in Indonesia”, Ima-ae Alee *et.al.* (ed.), *Islamic Studies*, hlm. 185. [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdurrahman Wahid, “Prospek Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan”, dalam Oepen dan Karcher (ed.), *Dinamika Pesantren.*, hlm. 268. Bandingkan dengan Winarno Surakhmad, “Kependidikan Alternatif dalam Peta Kependidikan Nasional”, *Pesantren,* No. 1, Vol. II/1985, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-23)
24. Zamakhsyari Dhofier, “Relevansi Pesantren dan Pengembangan Ilmu di Masa Datang”, *Pesantren,* No. 1, Vol. II/1985, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-24)
25. Namun masalah itu sejujurnya juga terletak pada masyarakatnya, terutama orang tua santri. *The difficult problem of modernising the pesantren is probably very much dependent on the Kiai, the “owner of the pesantren” … In fact, modernisation does not just depend on the Kiai but also on the community, and especially on the parent of santri. A Kiaimay change orientation, but he may also be deserted by his followers. A Kiai who wants to make reforms, then, must posses charisma, influence and sound knowledge*. Lihat Dawam Rahardjo. *“The Kiai, the Pesantren*, hlm. 245. [↑](#footnote-ref-25)
26. M. Amin Abdullah, “Problem Epistemologis-Metodologis Pen­di­dikan Islam”, dalam M. Anies dkk. (ed.), *Religiusitas Iptek: Rekonstruksi Pen­didikan dan Tradisi Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 65. [↑](#footnote-ref-26)
27. Josept S.Szyliowies,*Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam*, Dr. Ahmad Djainuri, MA (ed.) (Surabaya: Al-Ikhlas, 2001), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ahmad Zaini, *KH. Wahid Hasyim Pembaharu Pendidikan Islam dan Pejuang Kemerdekaa*n (Jakarta: Yayasan Wahid Hasyim, FIS, 2003), hlm. 44 – 46. [↑](#footnote-ref-28)
29. Josept S.Szyliowies,*Pendidikan dan Modernisasi,* hlm. 4. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial,* terj. Butche B. Soendjojo, ed. Siregar (Jakarta: P3M, 1996), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-30)
31. Fuad Jabali, *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 94. [↑](#footnote-ref-31)
32. Agus Salim, *Perubahan Sosial, Sketsa, dan Refleksi Metodologi: Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 67. [↑](#footnote-ref-32)
33. Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999), hlm. 337. [↑](#footnote-ref-33)
34. HAR Gibb, *Modern Trend in Islam* (New York: Octagon Books, 1978), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-34)
35. Bronislaw Malinowski*, The Dynamic of Culture Change* (New Haven: Yale University Press, 1961), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-35)
36. Astrid S. Susanto-Sunarto, *Masyarakat Indonesia Memasuki Abad XXI* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 35. [↑](#footnote-ref-36)
37. Sebagaimana dikutip Eva Efzioni Halevy, *Social Change: The Advent and Maturation of Modern Society* (London: Routledge & Kegan Paul, 1987), hlm. 22; Sugihen, *Sosiologi Pedesaan* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 55. [↑](#footnote-ref-37)
38. Joachim Wach, *Sociology of Religion* (Chicago: University of Chicago Press, 1971), hlm. 19-27. [↑](#footnote-ref-38)
39. Wach, *Sociology,* hlm. 107. [↑](#footnote-ref-39)
40. Susanto-Sunarto, *Masyarakat Indonesia,* hlm. 93. [↑](#footnote-ref-40)
41. M. Munandar Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 115. [↑](#footnote-ref-41)
42. M. Dawam Rahardjo. “The Kiai, the Pesantren, and the Village: A Preliminary Sketch,” dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique, dan Yasmin Hussain (ed.), *Readings on Islam in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985), hlm. 246. [↑](#footnote-ref-42)
43. James MacGregor Burns, *Leadership* (New York: Row Publishers, 1978), hlm. 290. [↑](#footnote-ref-43)
44. Nurcholish Madjid, “Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren,” dalam DawamRahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren*, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-44)
45. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, ed. Mawardi Ja’far (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999)*,* hlm. 147. [↑](#footnote-ref-45)
46. A. Soenarjo (Ketua Tim), *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Sambutan Menteri Agama RI (Madinah Munawwarah: Mujamma’ Khadim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Fahd li tiba’ah al-Mushaf al-Syarif, 1413 H), hlm. 623. [↑](#footnote-ref-46)
47. M. Yusuf Hasyim, “Peranan dan Potensi Pesantren dalam Pem­bangunan,” dalam Oepen dan Karcher (ed.), *Dinamika Pesantren.*, hlm. 93. [↑](#footnote-ref-47)
48. A. Soenarjo (Ketua Tim), *al-Qur’an dan Terjemahnya,*hlm. 371. [↑](#footnote-ref-48)
49. Patrick Diaz, “Sistem Pendidikan Nasional: Relevansi Sosio-Kultural dan Berbagai Alternatifnya,” dalam Oepen dan Karcher (ed.), *Dinamika Pesan­tren*, hal. 236-7. Masa depan bangsa terletak di tangan anak-anak sekarang. Mempersiapkan mereka untuk masa depan yang diliputi kera­ha­siaan meru­pa­kan tugas pendidikan yang harus mempunyai pandangan jauh ke depan. S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan,* cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 159. [↑](#footnote-ref-49)
50. Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan,* cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 126. [↑](#footnote-ref-50)
51. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ciri utama pesantren modern menurut Bull adalah penggunaan teori dan praktik pengajaran ala Barat. Ciri lainnya adalah: (1) penggunaan bahasa Arab dan Inggris dalam pengajarannya; (2) kurang memperhatikan pendidikan agama karena pengajarannya didasarkan pada teks suntingan; (3) peserta didik (santri) tidak belajar dari kitab kuning; (4) memberikan ijazah yang diakui pemerintah; (5) model kepemimpinannya lebih terbuka dan demokratis atas dasar keilmuan kiai, bukan karena faktor keturunan atau kharisma. Lihat Bull, *A Peaceful Jihad*, hal. 98. Lebih lanjut Bull mengutip pendapat Dhofier yang menyebutnya dengan pesantren *khalaf*, karena pesantren telah mengajarkan pelajaran sekuler. Bull, *A Peaceful Jihad*, hlm. 99. [↑](#footnote-ref-52)
53. Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, hlm. 132. [↑](#footnote-ref-53)
54. Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999), hlm. 333. [↑](#footnote-ref-54)
55. Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-55)
56. Muhammad Ansorudin Sidik, *Pengembangan Wawasan IPTEK Pondok Pesantren,* pengt. B.J. Habibie (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 23. [↑](#footnote-ref-56)
57. Fazlur Rahman, *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago-London: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 46-7. [↑](#footnote-ref-57)
58. Billah, “Pikiran Awal,” hlm. 294-5. [↑](#footnote-ref-58)
59. Richard G. Kraince, “The Modernization of the National Institute for Islamic Studies (IAIN) and the Advancement of Muslim Intellectualism in Indonesia”, Isma-ae Alee dkk. (ed.), *Islamic Studies In Asean*, Presentation of an International Seminar (Thailand: College of Islamic Studies, 2000), hlm. 179. [↑](#footnote-ref-59)
60. Zamakhsyari Dhofier, “History of Islamic Studies in Indonesia,” dalam Ima-ae Alee dkk. (ed.), *Islamic Studies in Asean ...*, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-60)
61. Hadimulyo, “Dua Pesantren Dua Wajah Budaya”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 113. [↑](#footnote-ref-61)
62. Kiai, menurut Dhofier, menjadi sektor kepemimpinan Islam yang dianggap paling dominan dan selama berabad-abad telah memainkan peranan yang menentukan dalam proses perkembangan sosial, kultural, keagamaan, dan bahkan politik. Dalam periode sekarang pun para kiai me­nun­jukkan vitalitasnya dalam kepemimpinan Islam sehingga mereka menjadi rujukan bagi problema hidup umatnya. M.A. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari,* hal. 1; Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 171. [↑](#footnote-ref-62)
63. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 262-263. [↑](#footnote-ref-63)
64. Mastuhu, *Dinamika Pesantren*, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-64)
65. Komaruddin Hidayat, “Pesantren dan Elit Desa,” dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren*, hlm. 96. [↑](#footnote-ref-65)
66. B.J. Cohen, *Theory and Problem of Introduction to Sociology* (New York: MacGrow-Hill, 1979), hlm. 71. [↑](#footnote-ref-66)
67. Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial,* terj. Umar Basalim (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987), hlm. 6-7. [↑](#footnote-ref-67)
68. Ziemek, *Pesantren,* hlm. 3. [↑](#footnote-ref-68)
69. Horikoshi, Kiai dan Perubahan, hlm. xvii. [↑](#footnote-ref-69)
70. Prasodjo S, et all, *Profil Pesantren al-Falah dan Delapan Pesantren di Bogor* (Jakarta; LP3ES, 1974), hlm. 113. [↑](#footnote-ref-70)
71. Berasal dari kata santri yang berawalan pe- dan berakhiran –an berarti tempat tinggal santri. Atau juga kata *sant* dan *tra* yang berasal dari bahasa Sansekerta, *sant* (manusia baik) dan *tra* (suka menolong), maka pesantren berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Lihat Dhofier, *Tradisi Pesantren,* hlm. 18. [↑](#footnote-ref-71)
72. Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 19. [↑](#footnote-ref-72)
73. Karl A. Streenbrink, *Beberapa Aspek Agama di Indonesia Abad XIX* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 98. [↑](#footnote-ref-73)
74. Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 44-60. Ini juga dalam buku Manfred Ziemek bahwa lingkungan pondok pesantren memang mayoritas mempunyai fasilitas yang paling penting pondokan kiai dan tempat mengaji/mushalla. [↑](#footnote-ref-74)
75. Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakata: INIS, 1994)*,* hlm. 73. [↑](#footnote-ref-75)
76. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-76)
77. Pesantren diklaim sebagai lembaga pendidikan tradisional disebabkan lembaga ini masih mengajarkan Islam ortodok secara tradisional. Lihat M. Dawam Rahardjo, *Pembangunan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren*, dalam idem (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah,* (Jakarta: Perhimpunan Pengmbangan Masyarakat Pesantren – P3M, 1985), hlm. vii-xxii. [↑](#footnote-ref-77)
78. Clifford Geertz, *The Religion of Java*, terj. Aswab Mahasin (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983),hlm. 241-254*.* [↑](#footnote-ref-78)
79. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-79)
80. Azyumardi Azra, “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan*,* dalamNurcholish Madrid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan,* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. x. [↑](#footnote-ref-80)
81. Zamakhsyari Dhofier, “Pesantren and the Development of Islam in the New Order,” dalam A.G. Muhaimin (ed.), *Zamakhsyari Dhofier on: Tradition and Change In Indonesian Islamic Education*(Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 1995), hlm. 88. [↑](#footnote-ref-81)
82. Mujammil Qomar dalam studinya telah membahas panjang lebar tentang beberapa transformasi dalam bidang sistem pendidikan, kepemim­pinan, dan sebagainya. Di situ, Qomar melihat beberapa transformasi tersebut secara umum. Ini artinya beberapa transformasi yang dibahas oleh Qomar tersebut merupakan pengamatan umum terhadap beberapa pesantren di Indonesia. Lihat Mujammil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2005). [↑](#footnote-ref-82)
83. Zamachsjari Dhofier, *Pesantren and the Development*, 88. [↑](#footnote-ref-83)
84. Azyumardi Azra, *Pesantren: Kontinuitas dan* …. , hlm. xii [↑](#footnote-ref-84)
85. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-85)
86. *Ibid.* Bandingkan dengan M. Sirozi, *Politik Pendidikan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. vii. [↑](#footnote-ref-86)
87. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-87)
88. *Ibid.* Hal yang sama dijelaskan oleh Mujammil Qomar, bahwa sejak tahun 1926 beberapa madrasah telah mengajarkan bahasa Indonesia (melayu), matematika, ilmu alam. Baca Mujammil Qomar dalam *Pesantren Dari Transformasi*, hlm. 130. [↑](#footnote-ref-88)
89. *Ibid.* Lebih tegas dijelaskan oleh Karl A. Streenbrink, bahwa pesantren di Indonesia pasca kemerdekaaan telah melakukan perubahan metode pengajaran dan sistem pendidikan dengan menggunakan sistem klasikal. Baca Karl A Steenbrink dalam *Beberapa Aspek Agama.,* hlm. 88. [↑](#footnote-ref-89)
90. Patrick Diaz, “Sistem Pendidikan Nasional: Relevansi Sosio-Kultural dan Berbagai Alternatifnya”, dalam Oepen dan Karcher (ed.), *Dinamika Pesantren.*, hal. 236-7. Masa depan bangsa terletak di tangan anak-anak se­karang. Mempersiapkan mereka untuk masa depan yang diliputi kerahasiaan merupakan tugas pendidikan yang harus mempunyai pandangan jauh ke depan. S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 159. [↑](#footnote-ref-90)
91. Hal ini disebabkan pesantren mengembangkan sistem pendidikan umum dan keterampilan. Bandingkan juga Sudirman Tebba, “Dilema Pesantren: Belenggu Politik dan Pembaruan Sosial”, dalam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren,* hlm. 284; M. Dawam Rahardjo, “Kehidupan Pemuda Santri: Penglihatan dari Jendela Pesantren di Pabelan”, dalam Taufik Abdullah, *Pemuda dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1974), hlm. 107. [↑](#footnote-ref-91)
92. Ziemek, *Pesantren dalam*, hlm. 138 [↑](#footnote-ref-92)
93. Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning,* hlm. 17. [↑](#footnote-ref-93)
94. E. Shobirin, “Perspektif Kepemimpinan dan Menajemen Pesantren,” dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Kehidupan Pemuda Santri: Penglihatan dari,* hlm. 117. [↑](#footnote-ref-94)
95. Affandi Mukhtar, “Mulahazah ‘Ammah al-Kutub Al-Safrah fi Ma’aahid al-Diniyyah”*,* dalam *Study Islamica,* Vol. III No. 2, Tahun 1996, hlm. 126. [↑](#footnote-ref-95)
96. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 51. [↑](#footnote-ref-96)
97. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad IX* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 54-58. [↑](#footnote-ref-97)
98. *Ibid.,* hlm. 58. Bandingkan pula Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning,* hlm. 27-30. [↑](#footnote-ref-98)
99. *Ibid.,* hlm. 27-28. [↑](#footnote-ref-99)
100. Amir Faishol, *Tradisi Keilmuan.,* hlm. 106.*.* [↑](#footnote-ref-100)
101. Contohnya adalah pesantren ini membantu meningkatkan pen­dapatan masyarakat. Lihat M. Bahri Ghazali, *Pengembangan Lingkungan,* hlm. 240. [↑](#footnote-ref-101)
102. Dalam perkembangan sejarahnya, Pondok Pesantren Modern Gontor sejak lama menerapkan model kurikulum yang berbeda dengan pesantren lainnya. Kurikulum pendidikannya disusun berdasarkan keperluan masya­rakat dan disusun sendiri oleh pengasuh pesantren itu sendiri. [↑](#footnote-ref-102)
103. Sesuai fungsinya, pesantren tidak hanya sebagai lembaga pen­di­dikan, tetapi juga sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama. Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 7. Sehubungan dengan ketiga fungsi itu, maka pe­santren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya. Selain itu, pesantren juga menjadi rujukan moral bagi kehidupan masyarakat umum. Masyarakat umum memandang pesantren sebagai komunitas khusus yang ideal, terutama dalam bidang kehidupan moral keagamaan. Sehingga setiap pesantren tampak memiliki semacam daerah pengaruh sendiri, yaitu komunitas-komunitas dalam masyarakat sesuai dengan aliran yang dibawakannya. Lihat Mastuhu, *Dinamika Sistem*, hlm. 59. [↑](#footnote-ref-103)
104. *Ibid*, hlm. 6. Sistem pendidikan yang ada di dalam pesantren memang tidak ada kategori *economic class* artinya semua santri diperlakukan sama di hadapan segala peraturan internal pondok pesantren. [↑](#footnote-ref-104)
105. *Ibid.*, hlm. 58. Mastuhu menganggap pesantren mempunyai nilai-nilai agama yang memiliki kebenaran mutlak bercorak *fikih-sufistik* dan berorientasi untuk kehidupan ukhrawi, serta nilai-nilai agama yang memiliki kebenaran relatif, bercorak empiris dan pragmatis untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan sehari-hari menurut hukum agama. [↑](#footnote-ref-105)
106. Dawan Rahadjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren; Membangun dari Bawah* (Jakarta: P3M, 1985), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-106)
107. Akbar S. Akmed, *Postmodernisme and Islam, Predicament and Promise* (London: Routledge, 1992), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-107)
108. A. Qodry Azizy, Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-108)
109. Sumarsono Mestoko, *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 234. Bandingkan dengan Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi*. hlm. 93. [↑](#footnote-ref-109)
110. *Ibid.*, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-110)
111. *Ibid.,* Munculnya sistem klasikal, penjenjangan, kurikulum di komu­nitas pesantren adalah realitas adopsi yang dilakukan oleh sistem pesantren dengan pertimbangan akan lebih membawa manfaat bagi santri. Seperti, Pesan­tren Mambaul Ulum Surakarta pada tahun 1906 oleh Pakubuwono sis­tem pendidikan santri telah menerima mata pelajaran umum. Kemudian pada tahun 1916 diikuti oleh Pesantren Tebuireng dengan mendirikan Madrasah Salafiyah. Tahun 1927 diterapkan oleh Pesantren Rejoso Jombang dengan mem­berikan materi aljabar, ilmu hitung, ilmu bumi, bahasa Melayu, dll. Bahkan berbeda lagi yang terjadi di Pondok Pesantren Modern Gontor. [↑](#footnote-ref-111)
112. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-112)
113. Seperti yang terjadi saat kekuasaan Orde Baru dalam upaya per­tum­buh­an ekonomi juga menaruh harapan kepada pesantren sebagai salah satu agen perubahan dan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, pesantren di­­harapkan tidak hanya memainkan fungsi-fungsi tradisionalnya, yakni *pertama,* transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam; *kedua,* pemeliharaan tradisi Islam; *ketiga,* reproduksi ulama. Modernisasi saat kekuasaan Orde Baru, pe­san­tren hendak mengarah pada pengembangan pandangan dunia dan subtansi pendidikan pesantren agar lebih responsif terhadap kebutuhan tantangan zaman. M. Dawam Raharjdo (ed.), *Pesantren dan Pembaruan* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 30. Bandingan dengan Martin Van Bruinessen, “Pesantren dan Kitab Kuning: Pemeliharaan dan Kesinambungan Tradisi Pesantren, “*Jurnal Ulumul Qur’an* Vol. III, No. 4, 1994, hlm. 73. [↑](#footnote-ref-113)
114. Soekamto, *PendidikanMuhammadiyah Meyongsong Era Industri dalam SeputarPercakapanPendidikandalamMuhammadiyah,* (Yogyakarta: Pustaka SM, 1994), hlm. 39. [↑](#footnote-ref-114)
115. Utami Munandar, *Creativity and Education* (Jakarta: UI, 1977), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-115)
116. Hamzah Ya’qub, *Etos Kerja Islami: Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syariat Islam,* (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 2003), hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-116)
117. Mohtar Mas’oed, *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, (Yogyakarta, UII Press, 1997), hlm. 112. Bahkan Gramsci menurunkan pemi­kiran­nya dari Marx dan Lukacs, bahwa setiap kelas sosial memerlukan kelom­pok cendekiawan masing-masing, yang sebaliknya harus memiliki kelas sosial tempat mereka menjadi bagian kehidupan. Terbukti bahwa perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh pendidikan dari kelas sosial yang ada, sebab jalur pendidikan dengan menghasilkan cendekiawan akan mampu merumuskan ke­pentingan-kepentingan dan ideologi dari suatu kelas sosial. [↑](#footnote-ref-117)
118. Fuadudin, “Diversifikasi Pendidikan Pesantren: Tantangan dan Soslusi,” dalam *Jurnal Edukasi*, Volume 5, Nomor 4, Desember 2007, hlm. 22-24. [↑](#footnote-ref-118)
119. Komarudin Hidayat, “Pesantren dan Elit Desa”, dalam M. Dawam Raharjo, (ed.) *Pergulatan Dunia Pesantren*, hlm. 96. [↑](#footnote-ref-119)
120. A. Qodry Azizy, *Melawan Globalisas*, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-120)
121. Susanto-Sunarto, *Masyarakat Indonesia Memasuki Abad XXI* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 35. Bila perubahan itu ter­jadi karena ada paksaan dari faktor ekternal, seperti instruksi kebijakan baru itu disebut *ethnocide*. [↑](#footnote-ref-121)
122. Fahry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru, Rekontruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung : Mizan, 1990), hlm. 31. [↑](#footnote-ref-122)
123. Abdurrahman Wahid, “Pesantren Sebagai Sub Kultur” dalam M. Dawam Rahardjo, (ed.), *Pesantren dan Pembaruan* (Jakarta, LP3ES, 1995), hlm. 58-60. Bandingkan dengan pendapat Mastuhu*, Dinamika Sistem Pendidikan*, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-123)
124. *Ibid* [↑](#footnote-ref-124)
125. Zamachsyari Dhofier, “Relevansi Pesantren dan Pengembangan Ilmu di Masa Mendatang.” dalam *Majalah Pesantren* (Jakarta: P3M, Desember 2004), hlm. 20-24. [↑](#footnote-ref-125)
126. Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan*, hlm. 66-68. Dahulu kiai berperan sebagai sumber belajar yang paling utama, kini sumber belajar santri semakin luas, tidak hanya pada buku-buku klasik (baca: kitab kuning), tetapi literatur asing telah menjadi rujukan belajar para santri. Tujuan belajar para santri tidak lagi belajar ilmu agama secara ikhlas, tetapi sudah mengharapkan formalitas ijazah dari pemerintah. Kemudian budaya santri yang santun dan ramah telah berubah menjadi budaya santri yang keras dan kurang memperhatikan etika. [↑](#footnote-ref-126)
127. Dalam catatan sejarah, Pesantren Darul Ulum dirintis mulai sekitar tahun 1885, tetapi memiliki sarana ibadah dan sekaligus sebagai tempat belajar para santri baru sekitar tahun 1898 yaitu berupa mushalla yang sampai sekarang masih terawat dengan baik (baca: *Panduan Pesantren Darul Ulum*, 2005, hlm. 10-11). Meskipun di sekitar masjid telah berdiri bangunan gedung yang cukup megah, tetapi bangunan masjid utama ini masih dipertahankan sesuai aslinya. [↑](#footnote-ref-127)
128. Pesantren Rejoso diberi nama Darul Ulum pada tahun 1933 oleh K.H. Dahlan Cholil, yaitu seorang kiai muda yang baru pulang belajar agama dari Makkah pada tahun 1932. Penamaan Darul Ulum adalah sebagai identitas nama pesantren Rejoso agar terkenal seperti Madrasah Darul Ulum di mana K.H. Dahlan Cholil belajar selama di Makkah. Lebih dari itu, dimaksudkan agar lembaga pendidikan ini diharapkan dapat menjadi tempat penempaan ilmu agama yang kuat bagi para santri untuk menjadi generasi muslim yang tahan cuaca, tidak tergoda oleh pergantian zaman dan tetap taat kepada Allah. *Panduan Pesantren*, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-128)
129. Tamim muda adalah seorang pemuda yang tangguh. Konon, beliau adalah murid Kiai Kholil Bangkalan Madura. Pada awalnya, Pengembaraan Tamim muda ke tanah Jawa (Jombang) hanya untuk berkunjung ke rumah sanak keluarganya yang telah lama tinggal dan menetap di Jombang agar dapat membantu keluarganya tadi dalam mengurus ladang. Ternyata, selain mengurus ladang, Tamim muda juga meluangkan waktunya untuk belajar ilmu al-Qur’an dan *kanuragan* di beberapa pesantren terdekat. Dari sinilah, bakat kekiaian Tamim muda mulai tumbuh. [↑](#footnote-ref-129)
130. Kiai B adalah salah seorang anggota Majelis Pimpinan Pondok (MPP) Darul Ulum yang secara jelas menerangkan asal usul pesantren dilihat dari asek ketokohan, bahwa tanpa izin atau *ijazah* dari Mbah Hasyim Asy’ari Jombang, maka mustahil Pesantren Darul Ulum dapat berdiri dan ber­kem­bang begitu cepat. [↑](#footnote-ref-130)
131. Dalam tradisi pesantren, putra-putra kiai (Gus) sering kali menem­pat­kan dirinya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan posisi ayahnya dan diperlakukan oleh para santri seperti tuan yang harus dihormati dan dituruti apa kemauannya. [↑](#footnote-ref-131)
132. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-132)
133. *Panduan Pondok Pesantren Darul Ulum*, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-133)
134. Tokoh masyarakat Jombang menjelaskan, pada awalnya Kiai Tamim Irsyad -pendiri utama Pesantren Darul Ulum- tidak mempunyai keinginan untuk mendirikan sebuah pesantren di daerah ini. Setelah beliau men­dapatkan restu dari K.H. Hasyim Asy'ari untuk mendirikan pesantren, beliau kemudian menemukan sebuah daerah yang dinilai sangat rawan. Dinilai rawan karena daerah ini merupakan basis kejahatan. [↑](#footnote-ref-134)
135. Karena kelebihan dalam ilmu *kanuragan* ini, Kiai Tamim disegani oleh masyarakat dan berhasil dalam mengajarkan agama Islam di wilayah Jombang. [↑](#footnote-ref-135)
136. Konsep Trisula yang dikembangkan oleh Kiai Musta’in Romly ini tidak lepas dari latar belakang keilmuan dan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat kepada kiai kharismatik ini, yaitu sebagai pemimpin pondok pesantren, sebagai mursyid (baca: guru) tarekat, dan sebagai Rektor UNDAR. baca: Riwayat Hidup Kiai Musta’in Romly dalam *PanduanPesantren*. [↑](#footnote-ref-136)
137. Ada beberapa pesantren di wilayah Jombang yang mengarah pada pesantren modern, seperti Pesantren Tebuireng dengan perguruan tingginya IKAHA, Pesantren Tambak Beras dengan pendidikan umumnya, tetapi perkembangannya belum sebesar Pesantren Darul Ulum. [↑](#footnote-ref-137)
138. Keunikan Pesantren Darul Ulum dibanding dengan pesantren lain di Jombang atau bahkan di Nusantara ini adalah dari aspek tasawuf yang melekat dalam pesantren. Meskipun tidak semua santri belajar tasawuf, tetapi pesantren ini memiliki santri atau jamaah yang khusus menekuni bidang pengajian tasawuf. [↑](#footnote-ref-138)
139. Kiai dianggap sebagai hamba pilihan Tuhan yang diberi anugerah ilmu pengetahuan yang serba bisa, sehingga memiliki otoritas yang sangat besar. Lihat Abdul Moqsith Ghazali, “Upaya Mereformasi Pendidikan Pesantren,” dalam *Mozaik Pesantren* (Jakarta: 2005), hlm. 42. [↑](#footnote-ref-139)
140. Uday Mashudi Abdurahman, “Metamorfosa Pesantren: Tradisi, Mo­der­nitas, dan Postradisionalisme,” dalam *Mozaik Pesantren* (Jakata: 2005), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-140)
141. Baca *Panduan Pesantren Darul Ulum*, 2005, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-141)
142. Profil Pondok Pesantren Darul Ulum, Mei 1997. [↑](#footnote-ref-142)
143. Kondisi bangunan surau itu sampai sekarang masih terawat baik dan digunakan sebagai balai pertemuan dan pengajian tarekat. [↑](#footnote-ref-143)
144. Mengingat kebesaran tokoh dan kharisma Kiai Tamim, pengajian tasawuf yang dilembagakan menjadi tempat pertemuan (baca: tawajjuhan dalam bahasa pesantren) khususnya pengamal tarekat ini yang diiikuti oleh sebagian besar orang tua yang datang khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui bimbingan *mursyid* (baca: guru Tarekat) [↑](#footnote-ref-144)
145. Profil Pondok Pesantren Darul Ulum, Mei 1997. [↑](#footnote-ref-145)
146. Kondisi Pesantren Darul Ulum saat itu mengalami kemunduran cukup drastis, bahkan cenderung menurun jumlah santrinya karena Kiai Khalil berjuang sendirian, bahkan dapat dikatakan hampir putus asa. Wawanacara dengan Kiai A, 4 Februari 2006, baca juga Profil Pondok, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-146)
147. Kedua ilmu tersebut dapat melahirkan kharisma bagi orang yang memilikinya, karena kedua ilmu tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi dilengkapi dengan ilmu *kanuragan*. Dengan berbekal ilmu *kanuragan*, maka seorang kiai mempunyai beberapa kelebihan dan kekuatan yang tidak dimiliki masyarakat yang pada gilirannya menyebabkan pola ketergantungan antara masyarakat dan kiai melalui hubungan patron-klien. [↑](#footnote-ref-147)
148. Wafatnya Kiai Tamim seolah menyertai kematian atau kemunduran Pesantren Darul Ulum, pada saat itu pesantren ini mengalami goncangan paling serius. [↑](#footnote-ref-148)
149. Perbaikan sistem pendidikan di pesantren itu dimulai dari pem­bagian tugas pengelolaan pesantren yang integral, model pembelajaran yang klasikal, dan sistem pendidikan yang mulai mengadopsi ilmu pengetahuan umum, seperti berdirinya koperasi, poliklinik, dan ilmu retorika. [↑](#footnote-ref-149)
150. Profil Darul Ulum diakses dari [www.darululum.net](http://www.darululum.net). [↑](#footnote-ref-150)
151. Profil Pondok Pesantren Darul Ulum, Mei 1997. [↑](#footnote-ref-151)
152. Keunikan Pesantren Darul Ulum sudah mulai terlihat sejak awal berdirinya di mana pengasuh pesantren, KH. Tamim Irsyad, di samping sebagai ulama juga sebagai pedagang. [↑](#footnote-ref-152)
153. Gagasan Kiai Tamim bahwa pesantren tidak sekadar berfungsi sebagai tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman, tetapi pesantren harus bisa menjadi ajang penempaan diri sebagai bekal hidup di masyarakat, *Ibid* [↑](#footnote-ref-153)
154. Dikatakan tidak tertulis, karena visi misi pendidikan pesantren tersebut sebatas dalam pembicaraan diskusi para kiai pada saat melakukan halaqah (perteman para kiai), belum tertuang dalam sebuah kerangka sistimatik yang dapat dibaca oleh masyaraka atau para santri. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-154)
155. Pembagian tugas masing-masing kiai didasakan atas keahlian dalam ilmu yang dimiliki, teruatama dalam bidang pengajaran kitab, sementara untuk pembagian tugas organisasi kepemimpinan pesantren lebih diper­timbangan faktor keluwesan.Di samping itu, kepemimpinan di pesantren ini telah melibatkan para santri senior untuk membantu perjalanan organisasi, seperti Kiai Ustman al-Isyaqi yang berasal dari Surabaya dalam praktikum Qadiriyah wa Naqsabandiyah. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-155)
156. Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Darul Ulum adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan sistem sekolah klasikal pertama yang ada di Pesantren Darul Ulum. *Ibid*, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-156)
157. Lembaga pendidikan ini bertujuan untuk mendidik dan membekali para santri menjadi calon calon pendidik dan juru dakwah. Madrasah tersebut dihuni oleh sekitar 3000 siswa. Baca *Profil Pondok Pesantren Darul Ulum*, Mei 1997. hlm 3. [↑](#footnote-ref-157)
158. Perkembangan pengajian tarekat yang semakin besar meluas di luar Jombang ini menjadikan jumlah pengikutnya semakin besar pula sekitar mencapai puluhan ribu orang. Hal ini dapat disaksikan di pusat pelatihan Rejoso di mana para anggota jamaah tarekat tersebut berkumpul dan berzikir kepada Allah. [↑](#footnote-ref-158)
159. Profil Pondok Pesantren Darul Ulum, Mei 1997, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-159)
160. Kebesaran Pesantren Darul Ulum ini tidak dapat dilepaskan dari peran para kiai pada fase kedua ini dalam mendirikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Muallimin-Muallimat. Karena dari madrasah ini muncul inspirasi mendirikan sekolah umum bahkan perguruan tinggi UNDAR. [↑](#footnote-ref-160)
161. Hal ini dapat dilihat dari kepemimpinan pada fase ini, yaitu pem­bagian tugas memimpin pesantren sudah mulai dirasakan. Kiai Tamim menangani bidang pengajian al-Qur’an, sedangkan Kiai Kholil bertanggung jawab dalam hal tasawuf dan pengajian tarekat. Profil Pondok Pesantren Darul Ulum, Mei 1997, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-161)
162. Menurut catatan sejarah, K.H. Dahlan Kholil dan K.H. Romly Tamim meninggal dunia pada tahun 1958 dan Kiai Ma’shum Kholil wafat pada tahun 1961. (baca: Profil Podok Pesantren Darul Ulum, Mei 1997, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-162)
163. Kiai Romly dan Kiai Dahlan tergolong tokoh ulama yang sangat keras dan konsisten (*istiqomah)* dalam bidang ilmu yang diajarkan, sehinga keahlian dalam bidang masing-masing telah diakui oleh ulama-ulama lain pada zamannya. [↑](#footnote-ref-163)
164. Dewan Kiai merupakan badan tertinggi yang beranggotakan para sesepuh pondok pesantren. Badan ini merupakan dewan penentu kebijakan di Pesantren Darul Ulum. [↑](#footnote-ref-164)
165. Dewan Guru merupakan badan pelaksana kebijakan Dewan Kiai yang beranggotakan para guru beranggung jawab dalam bidang pengajaran serta kontinuitas pendidikan di Pesantren Darul Ulum . [↑](#footnote-ref-165)
166. Dewan Harian merupakan dewan pelaksana harian yang berang­gotakan para santri senior bertanggung jawab dalam bidang administrasi manajemen dan kegiatan sosial. [↑](#footnote-ref-166)
167. Dewan Keuangan merupakan dewan yang beranggotakan orang-orang tertentu dari kalangan kiai bertujuan untuk lebih menertibkan administrasi dan manajemen keuangan. [↑](#footnote-ref-167)
168. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-168)
169. Pamflet *Pondok Pesantren Darul Ulum*. [↑](#footnote-ref-169)
170. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-170)
171. Kiai A, seorang saksi sejarah yang hidup semasa dengan Kiai Musta’in Romly, menuturkan bahwa Kiai Musta’in Romly memang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, di samping beliau memang juga berasal dari golongan “darah biru” pesantren. Konon, kharisma yang luar biasa yang dimiliki oleh Kiai Musta’in Romly terlihat ketika beliau menyampaikan pidato atau *mau’izah hasanah* di depan para pengikut tarekatnya. [↑](#footnote-ref-171)
172. Tiga bidang ilmu tersebut mestinya dipimpin oleh kiai yang berbeda. Karena keahlian Kiai Musta’in Romly, maka para kiai di pesantren ini memberikan kepercayaan pada Kiai Musta’in Romly. Oleh Kiai Musta’in Romly, hal tersebut kemudian dikembangkan menjadi konsep Trisula yang mengatur hubungan sinergis antara ketiga unsur tadi – pesantren,sekolah umum, dan tarekat. [↑](#footnote-ref-172)
173. Munculnya model kepemimpinan berbentuk majelis (MPP) sebenarnya dilatarbelakangi suatu motivasi untuk membina pesantren yang lebih terbuka, elegan, dan jauh dari konflik. Sebab, jumlah lembaga pendiidikan dan jumlah santri yang ditangani semakin besar, sehingga memerlukan peran serta para kiai lebih jelas dan manajemen organisasi yang lebih jelas. [↑](#footnote-ref-173)
174. Sistem pembagian kekuasaan dengan model mawaris ini dirasakan cukup adil dan dapat menghindari konflik dalam intern keluarga pesantren. [↑](#footnote-ref-174)
175. *Pamflet Pondok Pesantren Darul Ulum*. [↑](#footnote-ref-175)
176. Seperti dijelaskan oleh Kiai C alasan bahwa struktur MPP masih dikuasai secara mutlak oleh Bani Tamim Irsyad adalah demi menjaga dan mengawal visi-misi perjuangan Islam yang dilakukan oleh kakeknya. [↑](#footnote-ref-176)
177. Salah seorang dosen UNDAR yang juga alumni pesantren ini men­jelaskan, bahwa generasi muda Pesantren Darul Ulum yang berasal dari garis keturunan non-Kiai selalu melancarkan kritiknya terhadap pola ke­pe­mim­pinan Pesantren Darul Ulum yang masih melanggengkan sistem feodalisme, meski pesantren tersebut sudah melakukan transformasi modernisasi. [↑](#footnote-ref-177)
178. Wafatnya Kiai Hanan cukup berpengaruh terhadap kinerja kepe­mim­pinan pesantren, namun tidak begitu mengancam eksistesi Pesantren Darul Ulum, karena masih terdapat beberapa kiai junior (Gus) yang masuk dalam kepemimpinan kolektif dalam MPP. Panduan Pesantren Darul Ulum, 2002, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-178)
179. Hal ini bisa dipahami, karena orientasi pengembangan pesantren banyak diarahkan pada pengembangan ilmu-ilmu umum daripada ilmu agama, sehingga wajar kalau berimbas pada preferensi pendidikan keluarga kiai. [↑](#footnote-ref-179)
180. Kepemimpinan kolektif tetap dipertahakankan dengan harapan dapat menjadi alternatif pola kepemimpinan yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan demi kemajuan pesantren. [↑](#footnote-ref-180)
181. Karena dalam fase ini kepemimpian pesantren tetap berbasis keluarga (Bani Tamim), sehingga tidak memberikan lubang kecil bagi masuknya kader lain dari luar keluarga bani Tamim. [↑](#footnote-ref-181)
182. Hal yang demikian, merupakan suatu kewajaran dan hal yang lumrah, karena sebagai keturunan ahli waris tidak menginginkan warisan leluhurnya itu dikuasai oleh orang lain, bahkan khawatir visi misi pesantren menjadi bias. [↑](#footnote-ref-182)
183. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* Bab II, pasal 3. [↑](#footnote-ref-183)
184. *Buku panduan Pesantren Darul Ulum*, 2002, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-184)
185. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-185)
186. *Buku Panduan Pesantren Darul Ulum*, 2002, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-186)
187. *Profil Pondok Pesantren Darul Ulum*, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-187)
188. Tiga pilar pendidikan Pesantren Darul Ulum memiliki kekuatan yang sama dan saling terkait antara yang satu dengan lainnya, meskipun dalam praktik pendidikan masing-masing pilar tersebut memiliki penekanan yang berbeda, yaitu pengajaran tarekat yang lebih menekankan pada pondasi akhlak praktiknya lebih sederhana daripada pendidikan agama di pondok pesantren yang lebih komplek dan lebih rumit, mengingat pendidikan di pondok pesantren mencakup beberapa hal meliputi fikih, ushul fikih, hadis, tarikh, dll., demikian juga dibandingkan dengan pendidikan umum yang cakupan ilmunya lebih luas tentu memerlukan perhatian yang lebih besar. [↑](#footnote-ref-188)
189. Kiai Musta’in Romly sangat prihatin terjadinya kerusakan moral masyarakat dan juga akhlak para santri, sehingga konsep zikir yang dilembagakan menjadi tarekat ini menjadi perhatian utama Kiai Musta’in. [↑](#footnote-ref-189)
190. Untuk menjaga keseimbangan antara tarekat dan pendidikan pesantren, maka pada kurun waktu yang hampir bersamaan Kiai Musta’in Romly menunjukkan komitmennya dalam membangun peradaban Islam yang sufistik di pesantren berupa bangunan masjid, pondok pesantren, dan gedung tawajuhan (tempat pertemuan pengajian tarekat), *Ibid*. [↑](#footnote-ref-190)
191. Untuk memberikan simbol modernisasi pesantren, maka lembaga pendidikan ini sangat serius mempersiapkan beberapa pendidikan umum dengan berbagai disiplin ilmu yang menggambarkan modernisasi, seperti STM Telkom, Akademi Bahasa Asing, dan Fakultas Umum di UNDAR. [↑](#footnote-ref-191)
192. Meskipun bentuk pendidikan yang mengikuti kurikulum pemerintah telah diterapkan di pesantren ini, tetapi sistem pengajian tradisional tetap dipertahankan. [↑](#footnote-ref-192)
193. Kiai Musta’in Romly termasuk figur ulama yang tidak membeda-be­dakan ilmu. Bahwa semua ilmu adalah datang dari Allah yang harus dipelajar oleh manusia agar selamat dunia dan akherat.Nampak bahwa Kiai Musta’in Romly tidak sepakat dengan adanya dikotomi ilmu keislaman, Makanya, seiring dengan tuntutan modernitas, Kiai Musta’in Romly mulai menawarkan beberapa terobosan penting seperti memasukkan kurikulum ilmu-ilmu umum ke dalam pesantren. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-193)
194. Dalam catatan sejarah, UNDAR berdiri pada tanggal 18 September 1965 yang dibidani oleh para pengasuh pondok pesantren, seperti Kiai Musta’in Romly, Kiai Bisri Cholil, Kiai Muh. As’ad Umar, para alumni, wali santri, pejabat pemerintahan, dan tokoh mayarakat. Baca Panduan UNDAR tahun 2002. [↑](#footnote-ref-194)
195. Pada awal perintisan sistem pendidikan modern mengalami hambatan terutama, pertentangan dari para pengasuh yang menganggap bahwa ilmu-ilmu Barat apalagi yang berbau Belanda haram hukumnya, sehingga untuk memasukkan model pendidikan modern diperlukan pemikiran dan telaah yang cukup lama dari para pengasuh pesantren. [↑](#footnote-ref-195)
196. Lembaga pendidikan milik pemerintah yang berada di lingkungan pesantren merupakan sesuatu yang unik, karena model pendidikan seperti ini tidak banyak dijumpai di pesantren lain. Hal yang demikian, merupakan hal yang wajar, karena pengaruh pesantren yang sangat besar dan hubungan pesantren dengan pemerintah sangat dekat. [↑](#footnote-ref-196)
197. *Profil Pondok Darul Ulum*, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-197)
198. Dalam era modern, tuntutan masyarakat terhadap alumni pen­didikan adalah tersedianya tenaga-tenaga terampil, apalagi di awal-awal Orde Baru berkuasa, banyak dicari tenaga-tenaga terampil untuk mendukung kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah Orde Baru.. [↑](#footnote-ref-198)
199. Pendidikan agama bagi para santri yang mengikuti pendidikan di sekolah umum semata-mata untuk memberikan bekal ilmu agama untuk mencegah sekularisasi ilmu pengetahuan, agar kelak menjadi orang yang ahli ilmu umum tetapi taat beribadah. [↑](#footnote-ref-199)
200. Lepasnya UNDAR dari Pesantren Darul Ulum tidak semata-mata karena faktor perpecahan keluarga Bani Musta’in Romly yang dominan di UNDAR dengan Bani Muh. As’ad Umar yang dominan di Pesantren Darul Ulum. Pemisahan UNDAR pada awalnya dimaksudkan sebagai bagi-bagi tugas agar pendidikan di UNDAR dan pesantren dapat berjalan dengan baik. Tetapi kurangnya koordinasi akhirnya lepas secara kelembagaan ataupun struktural. [↑](#footnote-ref-200)
201. Meskipun bahasa Arab sebenarnya bukanlah merupakan penge­tahuan keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan sebagainya, tetapi dalam kenyataannya di beberapa pesantren materi bahasa Arab ini sangat penting diajarkan kepada santri, dengan alasan, dengan pengetahuan bahasa Arab diharapkan santri bisa lebih mudah memahami literatur-literatur keislaman yang berbahasa Arab. [↑](#footnote-ref-201)
202. Kurikulum pendidikan tradisional ini masih dipertahankan guna menjaga karakter pesantren ini sebagai benteng moral dan agama. [↑](#footnote-ref-202)
203. Kurikulum pendidikan modern dilaksanakan pada pendidikan formal di pagi hari yang disesuaikan dengan ketentuan pemerintah. Sebab, kurikulum pendidikan modern ini sebagai ukuran keberhasilan pendidikan dengan predikat pendidikan modern. Untuk menuju pendidikan yang maju dan berkembang dengan baik, kurikulum yang telah dibakukan oleh pemerintah ini justru dielaborasi menjadi ciri khas pendidikan pesantren, sehingga kurikulum ini benar-benar dirancang sesuai kemampuan peserta didik. [↑](#footnote-ref-203)
204. Kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren tersebut sebenarnya tidak seluruhnya diikuti oleh para santri. Masing-masing santri memilih beberapa kitab sesuai dengan jenjang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Bahkan banyak dijumpai beberapa santri yang sekadar mengikuti pengajian kitab kuning padahal tidak menguasai materi pelajaran tersebut. Inilah kelemahan model pengajaran sistem bandongan. [↑](#footnote-ref-204)
205. Santri mengakubahwa belajar kitab kuning di pesantren ini rasanya sangat berat, sebab di samping model pengajian (bandongan) yang terlalu cepat para santri masih harus berfikir untuk mengerjakan tugas sekolah di pagi hari. [↑](#footnote-ref-205)
206. Data tersebut menurut penelitian penulis, baru dilihat dari aspek minat belajar santri. Apabila dilihat dari kecenderungan santri mempelajari kitab kuning dan mengerjakan PR dari sekolah sungguh sangat mem­prihatinkan, sebab santri lebih memilih mengerjakan PR daripada mengikuti pengajian kitab kuning. [↑](#footnote-ref-206)
207. Prof. Dr. Amin Syukur, M.A. lahir di Gresik, 17 Juni 1952. Saat ini beliau tinggal di Perum BPI Blok S-18 Ngaliyan Semarang. Amin aktif mengajar di IAIN Walisongo sejak 1980. [↑](#footnote-ref-207)
208. Di antara manfaat besar modernisasi pesantren adalah terjaganya kontinuitas sistem pendidikan pesantren di tengah arus perubahan sosial karena pesantren juga tanggap dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, pesantren tidak ditinggalkan oleh masyarakat karena pesantren juga menawarkan beberapa keilmuan yang *marketable* melalui madrasah dan sekolah-sekolah umum. Manfaat lain adalah para santri mendapat pengakuan pemerintah untuk dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Seandainya pesantren tidak menempuh langkah modernisasi sistem pendidikannya, maka akan banyak kita saksikan pesantren gulung tikar dan ditinggalkan oleh masyarakat. [↑](#footnote-ref-208)
209. Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 66. [↑](#footnote-ref-209)
210. Ivor Morrish, *Aspects of Educational Change* (London: George Allen & Unwin, 1978), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-210)
211. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-211)
212. Karl. A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Kurun Modern* (Jakarta:LP3ES, 1986), hlm. 10-13. [↑](#footnote-ref-212)
213. Dalam bidang Tafsir, kitab-kitab yang diajarkan di Pesantren Darul Ulum adalah *Tafsir al-Jalalain, Ibnu Katsir, Qurtubi,* dan *Tafsir Khamami*. Dalam bidang hadis, kitab-kitab yang berlaku adalah *Bukhari Muslim, Tajrid al-Sharih, Bulugh al-Maram, Riyadz al-Shalihin, Jawahir al-Bukhari,* dan *Arba’ al-Nawawi.* Kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu alat bahasa Arab adalah *Jurumiah, Alfiah Ibnu al-Malik, Milhat al-I’rab,* dan *Qawaid al-Lughah.* Dalam bidang fikih, para santri mengkaji kitab-kitab seperti *Mabadi’ al-Fikihiyyah, Safinat al-Naja, Sullam al-Taufiq, Fath al-Qarib, Fath al-Muin,* dan *Kifayat al-Akhyar.* Dalam bidang akhlak, para santri mempelajari kitab-kitab kuning seperti *Akhlak li al-Banat, Akhlak li al-Banin, Uqud al-Lijain, Ta’lim al-Muta’allim, Durrot al-Nasihin, Bidayat al-Hidayah, Nashaih al-Ibad, Hikam,* dan *Ihya Ulumuddin.* [↑](#footnote-ref-213)
214. Mastuhu, *Dinamika Sistem,* hlm. 66. [↑](#footnote-ref-214)
215. M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaruan* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-215)
216. Keberadaan sekolah-sekolah umum dalam lingkungan Pesantren Darul Ulum sejak kepemimpinan Kiai Musta’in Romly sampai Kiai Muh. As’ad Umar secara tidak langsung menggeser keberadaan pengajian kitab-kitab kuning, baik melalui sorogan maupun bandongan.Di samping itu program pengajian kitab kuning mengalami penyusutan secara bertahap. Gejala ini dapat diperhatikan dari kitab-kitab yang diajarkan dan jumlah kiai yang benar-benar menekuni kitab tersebut sangat sedikit. [↑](#footnote-ref-216)
217. Ketika para santri sedang makan malam, secara tidak sengaja para santri mengungkapkan bahwa beban belajar yang sangat berat di pesantren ini karena tugas dari sekolah sudah berat masih ditambah belajar kitab kuning yang belum jelas manfaatnya. Kalau belajar di sekolah masih ada yang diharapkan di masa mendatang, sehingga sebagian santri lebih memilih untuk mengerjakan tugas dari sekolah daripada mengikuti pengajian kitab kuning. Pernyataan yang lebih lugas dari seorang santri yang selalu berbahasa Indonesia ini mengatakan bahwa tujuan belajar di pesantren ini adalah belajar di sekolah sambil belajar ilmu agama. [↑](#footnote-ref-217)
218. Pada masa Orde Baru, kekuasaan pemerintah sangat dominan dan pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan bangsa, termasuk perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Presiden Soeharto dalam upaya mem­per­ta­han­kan kekuasaan selalu mendekati tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk kalangan pesantren. Sebab, dunia pesantren termasuk memiliki daya tarik sendiri bagi penguasa, karena tokoh pesantren dikate­gorikan sebagai panutan umat dan memiliki pengaruh besar di masyarakat. Salah satu alat komunikasi penguasa Orde Baru saat itu adalah mengunjungi pesantren sembari memberikan bantuan untuk pengembangan pesantren. [↑](#footnote-ref-218)
219. Keturunan kiai sangat berpeluang besar dalam menerima tongkat estafet kepemimpinan pesantren dari ayahnya. Bahkan, pesantren sering digambarkan sebagai sebuah kerajaan kecil di mana kiai sebagai rajanya. Seperti layaknya kerajaan, suksesi kepemimpinan dilakukan secara tertutup oleh para ahli waris/keluarga kiai. [↑](#footnote-ref-219)
220. Pesantren yang sudah modern ini ternyata masih melestarikan tradisi feodalisme kerajaan di pesantren. Kepemimpinan pesantren tidak mungkin pindah dari garis keturunan kiai, meskipun secara keilmuan kurang men­dukung. Sebab, menyerahkan kepemimpinan kepada kiai yang bukan ahli waris dapat mengakibatkan lemahnya kontrol menuju kekuasaan kapitalisme. [↑](#footnote-ref-220)
221. Kiai yang bukan garis keturunan kiai pesantren tidak mungkin bisa memimpin pesantren sebelum masuk struktur keluarga, misalnya menikah dengan putri kiai yang masih mempunyai garis keturunan yang kuat. Hal ini yang terjadi pada Kiai Kholil setelah menikahi putri Kiai Tamim Irsyad sehingga Kiai Kholil dapat menjadi pemimpin pesantren. Di samping itu, kemungkinan “orang luar” bisa memimpin pesantren jika memang keturunan kiai tidak ada yang mampu dan bersedia menggantikan ayahnya. [↑](#footnote-ref-221)
222. Rahman, *Kepemimpinan dalam Konteks Pemberdayaan Kepala Sekolah.* (Bandung:Alqaprin, 2005), hlm. 104. [↑](#footnote-ref-222)
223. Dari sini muncul kesan bahwa dunia pesantren ibarat kerajaan, dimana seorang kiai sebagai pemimpin di pesantren seolah memiliki kekuasaan yang sangat luas seperti seorang raja yang mempunyai otoritas luas dan tak terbatas. [↑](#footnote-ref-223)
224. Dalam banyak kasus pesantren di Indonesia, seorang kiai di pesantren seolah-olah menjadi penentu utama dalam setiap masalah yang berkembang di pesantrennya, bahkan di lingkungan masyarakat pesantren. Mulai dari merancang bangunan pesantren, mencari dana pembangunan, membangun fasilitas belajar, bahkan mencari tukang untuk membangun pesantren, sampai merancang kurikulum dan mengajar santri. [↑](#footnote-ref-224)
225. Meskipun kepemimpinan kolektif masih terbatas dalam keluarga kyai dan tertutup dari keluarga lain, tetapi model kepemimpinan kolektif ini jauh lebih baik karena pesantren diurus secara berama-sama. [↑](#footnote-ref-225)
226. Dalam kepemimpinan tunggal, pesantren akan mengalami keman­degan atau bahkan kemunduran apabila tokoh utama pesantren telah wafat, sehingga kelangsungan pendidikan di pesantren akan terancam bangkrut karena persoalan tokoh pengganti. [↑](#footnote-ref-226)
227. Dalam kepemimpinan kolektif, seorang kiai dibatasi ruang gerak dan peransertanya di masyarakat. Sebab ia tidak mungkin melakukan tindakan yang berhubungan dengan kepentingan pesantren sebelum mendapat persetujuan kiai lain atau majelis kiai. [↑](#footnote-ref-227)
228. Maksudnya, otoritas dan kekuasaan kiai menjadi lebih sederhana atau terbatasi oleh sistem kelembagaan pesantren. Karena dalam kepemim­pin­an kolektif pesantren, seorang kiai dibatasi untuk bertindak dan bersikap yang mengatasnamakan pesantren sebelum mendapat persetujuan majelis kiai. [↑](#footnote-ref-228)
229. Dari aspek ini, kebesaran dan ketokohan seorang kiai tidak lagi dilihat karena keilmuan dan kharismanya yang besar, tetapi karena kebesaran lembaga pesantrennya. [↑](#footnote-ref-229)
230. Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 78. [↑](#footnote-ref-230)
231. Ungkapan Ali bin Thalib tersebut menggambarkan betapa besar jasa seorang guru terhadap murid, karena manfaat ilmu bagi kehidupan seorang murid dan murid tersebut merasa belum mampu membalas kebaikan seorang guru, maka murid menyerahkan dirinya atau mengamba/mengabdi kepada gurunya dengan total. [↑](#footnote-ref-231)
232. Karena besarnya pengaruh kiai dalam kehidupan pesantren, maka sekecil apa pun persoalan yang muncul dan berkembang di pesantren yang luput dari perhatian dan keterlibatan kiai. [↑](#footnote-ref-232)
233. Misalnya, santri yang tidak lagi membungkukkan badan ketika berjalan di depan kiai, naik sepeda motor yang tetap tancap gas walupun lewat depan rumah kiai, bahkan ada beberapa santri yang berani masuk kamar ustaz walaupun tanpa permisi. [↑](#footnote-ref-233)
234. Pada fase-fase awal perkembangan pesantren, para santri merasa takut (sungkan: bahasa jawa) ketika mendengar teguran halus (misalnya dahem: dalam bahasa Jawa) dan bergegas memperhatikan apa kesalahan yang dilakukan santri, tetapi dewasa ini para santri tetap saja tidak peduli dengan teguran keras kiai apabila menjalankan kesalahan, dalam bahasa lain tidak menghiraukan teguran kiai. [↑](#footnote-ref-234)
235. Buku-buku yang berbahasa asing telah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan diterbitkan oleh INIS, Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. [↑](#footnote-ref-235)
236. Situasi ini dapat dilihat pada pertemuan yang diselenggarakan oleh pesantren maupun jam’iyyah NU yang tumbuh subur di pulau Jawa ini, bahwa dewasa ini seorang anak muda kalangan pesantren merasa lebih terbuka melakukan diskusi apa saja dengan kiai senior, tanpa mempedulikan etika atau kepantasan, tetapi lebih mengedepankan faktor keilmuan dan teori-teri yang didapatkan dalam berbagai sumber pengetahuan. Sekarang ini orang-orang dapat pergi ke berbagai agen yang dapat memberikan kepada mereka pengetahuan Islam dan kepemimpinan dalam pengertian yang lebih umum. [↑](#footnote-ref-236)
237. Dampak modernisasi pesantren, kehidupan masyarakat di ling-kungan pesantren ini relatif maju dibanding dengan masyarakat pesantren lain­nya, seperti penataan lingkungan yang rapi, pertumbuhan ekonomi yang baik, sarana transportasi (mobil para kiai) yang cukup mewah, dan kemajuan tek­nologi komunikasi yang relatif bagus. [↑](#footnote-ref-237)